



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Jl. Imam Bonjol No. 4A Pariaman Telp. (0751) 92202, 91012
Fax. (0751) 91012 www.pariamankota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subbhanahuwata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman ini adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Pariaman dalam kurun waktu setahun. Pada laporan ini, disajikan perencanaan kinerja tahun 2023, yang disertai target dan realisasi berupa output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan ini juga merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban dari amanah yang diemban Pemerintah Daerah sebagai pengguna sumberdaya untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah serta menginformasikannya terkait dengan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sangat disadari, laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, perbaikan yang terus menerus akan terus Kami lakukan seperti pengembangan dan mensinkronkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistem perencanaan

dan sistem penganggaran, peningkatan SDM, pengembangan anggaran berbasis kinerja dan manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja dan manajemen kinerja dimasa yang akan datang.

Berkenaan dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, manajemen maupun keuangannya.

Kami juga mengharapkan laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang terkait dan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan guna perbaikan perencanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pariaman dimasa yang akan datang.

Pariaman, Maret 2024

Pj. Wali Kota Pariaman

Ttd.

Dr. Roberia, SH, MH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pariaman kepada masyarakat atas pelaksanaan mandat yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 03 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023, dimana Visi Pembangunan Kota Pariaman adalah “

" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"

Visi tersebut diwujudkan melalui beragam misi, kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang akan di capai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja Tahun ke kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023.

Untuk mewujudkan misi yang diemban, Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 telah menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman yang terdiri dari :



Adapun rata-rata capaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 meliputi :

Misi 1 : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra

Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata yang didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian 5 %.

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran terwujudnya Daya Saing Wisata dengan target akhir RPJMD 2018-2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pertumbuhan spending of money	%	5,5	3,5	4,5	3,5	3,7	3,9	26,2	(21,38)	1.17	1.93	0,002

Misi 2 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 99,35 %;

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berkualitas dan Berbudaya dengan target akhir RPJMD 2018-2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI & CAPAIAN TAHUN				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,58	14,54	14,60	14,55	14,56	14,70	14,53 (99,59%)	14,54 (99,9%)	14,55 (100%)	14,61 (100,3%)	14,79 (101%)
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,34	10,60	10,90	10,84	10,80	11	10,37 (98%)	10,59 (97,16%)	10,67 (98%)	10,78 (99,8%)	10,79 (98%)

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 104,24%;

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Target Akhir RPJMD 2018-2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,18	70,07	70,30	70,53	70,88	71,18	70,15	70,28	70,38	70,67	74,2

Sasaran 3 : Menurunnya Prevelensi Stunting dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian 116 %.

Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Prevalensi Stunting dengan target akhir RPJMD 2018-2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Stunting	%	8,9	-	-	10,02	16,8	12,5	9,8	10,8	10,03	17,26	10,50

Sasaran 4 : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat yang didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian rata-rata sebesar 95%.

Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	Juta (Rp.)	14,00	-	-	13,15	13,55	14	-	-	12,82	13,15	13,355

Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City

Sasaran 1 : Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 94%.

Perbandingan Realisasi Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel dengan target akhir RPJMD 2018-2023, adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	70,05	60,00	71,00	61,50	61,50	70,01	56,15 (94%)	56,50 (80%)	60,06 (98%)	61,08 (87,2%)	61,49 (87,8%)
Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sasaran 2 : Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 99%.

Perbandingan Realisasi Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel dengan target akhir RPJMD 2018-2023, adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	Indeks	3,25	2,7	2,8	3,1	2,6	2,7	2,87	2,87	2,42	2,64	2,65
Indeks Profesional ASN	Indeks	62	-	-	55	54,2	85,5	-	-	45,8	45,9	85,96

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 94,1%.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan target akhir RPJMD 2018-2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	kategori	88,35	-	-	84,5	86,25	88,36	0	0	84,5	79,21	83,12

Misi 4 : Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 84,3%

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan target akhir RPJMD 2018-2023, adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	70	60,20	65,45	65,45	66,27	70	61,48	76,50	65,71	62,09	59,01

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni di dukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 260%;

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni dengan target akhir RPJMD 2018-2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
% Pengurangan luas Permukiman Kumuh	%	51,49	-	-	21,8	7,69	11,5	-	-	42,81	47,09	48,87
% Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	83,33	-	-	80,2	78,19	83,3	-	-	77,21	92,44	81,43

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan di dukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 89%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI				
	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan	64,06	64,42	55	59,10	63,60	64,06	47,2	60,29 (Kurang)	54,93 (Waspada)	56,35 (Kategori Sedang)	56,80

Sasaran 4 : Meningkatnya Mitigasi Bencana didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 93%.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana dengan target akhir RPJMD 2018-2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Resiko Bencana	Kategori	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	158,28

Sasaran 5 : Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dengan 1 (satu) indikator dengan rata-rata capaian sebesar 132%.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	70,4	-	-	66,7	68,5	70,4	-	-	63,49	84,4	93

Misi 5 : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal

Sasaran 1 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebesar 99,2%.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dengan target akhir RPJMD 2018-2023, adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15,59	-	-	22,5	15,43	15,59	-	-	14,90	15,45	15,47

Sasaran 2 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 98%.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dengan target akhir RPJMD 2018-2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
% Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	18,67	-	-	22,5	18,57	18,01	-	-	14,90	17,73	17,67

Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi di dukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar -5%.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Nilai Investasi dengan target akhir RPJMD 2019-2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Investasi	%	2,0	0,03	0,5	3,5	1,85	2,20	0,16	0,79	-0,18	0,73	-0,11

Sasaran 4 : Menurunnya Angka Kemiskinan didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 95%.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
% Angka Kemiskinan	%	3,50	4,80	4,65	3,90	4,10	4,00	4,76	4,10	4,38	4,13	4,20

Sasaran 5 : Menurunnya Angka Pengangguran dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 87 %.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Angka Pengangguran dengan target akhir RPJMD 2018-2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,80	-	-	5,43	5,10	5,01	-	-	6,09	5,19	5,68

Sasaran 6 : Meningkatkan Kemandirian Desa dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 101,96 %.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dengan target akhir RPJMD 2018-2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Desa Membangun	Nilai	0,0792	0,6850	0,6880	0,7400	0,7710	0,7800	0,7200	0,7250	0,7485	0,7744	0,7744

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Kota Pariaman.....	5
1.4 Analisis Isu-Isu Startegis.....	10
1.5 Startegi Pembangunan Daerah.....	25
1.6 Sistimatika Penulisan.....	43
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	44
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023	44
a. Visi	44
b. Misi	46
c. Tujuan dan Sasaran	51
2.2 Indikator Kinerja Utama	69
2.3 Perjanjian Kinerja	70
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	78
3.1 Pengukuran Kinerja	78
3.2 Metode Pengukuran Pencapaian Target Kinerja	78
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023	80
B. Analisis Capaian Kinerja 2023	83
3.3 Akuntabilitas Keuangan	184
BAB IV PENUTUP	191
PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.....	194

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Kecamatan dan desa/kelurahan di Kota Pariaman
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023
Tabel 1.3	Kondisi Topografi Kota Pariaman
Tabel 1.4	Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman Menurut Kecamatan
Tabel 1.5	Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman
Tabel 1.6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022
Tabel 1.7	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah/Jiwa) Tahun 2018-2022
Tabel 1.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2018-2022
Tabel 1.9	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2017-2022
Tabel 1.10	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2017-2022
Tabel 1.11	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/kota Se Sumatera Barat Tahun 2017-2022
Tabel 1.12	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2017-2022 (Ribu Rp/Org/Tahun)
Tabel 1.13	Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017-2022
Tabel 1.14	Ketercapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Pariaman
Tabel 1.15	Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Pilar
Tabel 1.16	Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut OPD
Tabel 1.17	Sinkronisasi Program Unggulan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Program Unggulan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023
Tabel 2.1	Keselarasan Visi RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi dengan Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023
Tabel 2.2	Keselarasan Misi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi 2021-2026, RPJPD Kota Pariaman 2005-2025 Dan Perubahan RPJMD Kota Pariaman 2018-2023
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi 1
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi 2
Tabel 2.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi 3
Tabel 2.6	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi 4
Tabel 2.7	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi 5
Tabel 2.8	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.1	Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Kota Pariaman Dari Tahun 2018 - 2023
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Terwujudnya Daya Saing Wisata dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.3	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten Kota di Sumatera Barat tahun 2019-2023
Tabel 3.4	Data Perguruan Tinggi dan Mahasiswa SAGA SAJA tahun 2018-2023
Tabel 3.5	Data Mahasiswa SAGA SAJA yang sudah tamat dan bekerja
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.7	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2019-2023
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Target Akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.9	Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Prevalensi Stunting dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.10	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2019-2023
Tabel 3.11	Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.12	Perbandingan Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.13	Indeks Profesionalitas ASN beberapa Kabupaten Kota di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Tabel 3.14	Jumlah dan Jenjang Pendidikan PNS Tahun 2023
Tabel 3.15	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan /Eselon
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.17	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Perangkat Daerah Tahun 2023
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.19	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap
Tabel 3.20	Panjang Drainase Kota Dalam Kondisi Baik
Tabel 3.21	Panjang Jaringan Irigasi Berdasarkan Jenis Saluran
Tabel 3.22	Panjang jaringan irigasi berdasarkan Kondisi
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan target akhir RPJMD 2018-2023

Tabel 3.24	Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh 2019
Tabel 3.25	Lokasi Kawasan Kumuh Tahun 2020
Tabel 3.26	Nama Lokasi Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2023
Tabel 3.27	Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pariaman Tahun 2019-2023
Tabel 3.28	Capaian Variabel Pembentuk Indikator Perumahan Permukiman Layak Huni
Tabel 3.29	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Tabel 3.30	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.31	Indeks Kualitas Lingkungan dari Tahun 2019 -2023
Tabel 3.32	Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Kualitas Lingkungan dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.34	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.35	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.36	Data Produksi Pertanian Tahun 2020-2023
Tabel 3.37	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.38	Realisasi Investasi Kota Pariaman dari Tahun 2018-2023
Tabel 3.39	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Nilai Investasi dengan target akhir RPJMD 2019-2023
Tabel 3.40	Persentase Penduduk Miskin Kota Pariaman Tahun 2019-2023
Tabel 3.41	Persentase Penurunan Kemiskinan di Sumatera Barat Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2019-2023
Tabel 3.42	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2019-2023
Tabel 3.43	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dengan target akhir RPJMD 2018-2023
Tabel 3.44	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2023
Tabel 3.45	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran dengan target akhir RPJMD 2019-2023
Tabel 3.46	Nama –nama dan Status Desa Tahun 2022- 2023

- Tabel 3.47 Status Desa di Kota Pariaman pada tahun 2020 -2023
- Tabel 3.48 Data Komposit Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Pariaman Tahun 2019-2023
- Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya kemandirian Desa dengan target akhir RPJMD 2019-2023

Daftar Gambar

- Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Pariaman
- Gambar 1.2 Mata Rantai Permasalahan Utama dan Pokok Pembangunan Daerah Kota Pariaman
- Gambar 1.3 Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJMN 2005-2025
- Gambar 1.4 Nawacita kedua RPJMN 2020-2024
- Gambar 1.5 5 Arahana Utama Presiden

Daftar Grafik

- Grafik 3.1 Trend Angka Harapan Hidup di Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023
- Grafik 3.2 Angka Kematian Ibu di Kota Pariaman Tahun 2019 -2023
- Grafik 3.3 Angka Kematian Bayi di Kota Pariaman Tahun 2019-2023
- Grafik 3.4 Umur Harapan Hidup Penduduk Indonesia 2012-2023
- Grafik 3.5 Balita Stunting Tahun 2018 – 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan setiap tahun. Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya keuangan. Laporan Kinerja disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja disusun dalam kurun waktu satu tahun anggaran dan disampaikan setiap awal tahun pelaksanaan anggaran selanjutnya yang didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan perencanaan strategis, dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga pelaporan ini pada prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah (Dr. GENIUS UMAR, M.Si dan Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM) yang dituangkan kedalam visi, misi dan program



strategis RPJMD Kota Pariaman 2018-2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun terakhir dari RPJMD Kota Pariaman. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Pariaman, pada arah Visi dan Misi Kota Pariaman. RPJMD Kota Pariaman ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023, maka pengukuran akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dapat digambarkan dan pertanggungjawabkan secara lebih tepat. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan selama 5 dari 2018-2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun, juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, disamping itu juga menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Kota Pariaman. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang



tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, yang terdiri dari :

A. Walikota dan Wakil Walikota Pariaman

1. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
2. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
3. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM

B. Sekretaris Daerah membawahi 2 Asisten yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Pemerintahan
 - Bagian Hukum
 - Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional

B. SEKRETARIAT DPRD



C. INSPEKTORAT

D. DINAS

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang, dan Pertanahan
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Perhubungan
14. DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

E. BADAN

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

G. KANTOR

1. Kantor Kesbangpol & Linmas
2. Kecamatan.



1.3. Gambaran Umum Kota Pariaman

❖ Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara $00^{\circ} 33' 00''$ – $00^{\circ} 40' 43''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 04' 46''$ – $100^{\circ} 10' 55''$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar $73,36 \text{ Km}^2$, dengan panjang garis pantai $12,00 \text{ Km}^2$. Luas daratan daerah ini setara dengan 0,17 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat dengan 6 buah pulau-pulau kecil yaitu : Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 kilometer.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah sebesar $73,36 \text{ Km}^2$ dan luas lautan $282,56 \text{ km}^2$, dengan panjang garis pantai $12,00 \text{ Km}^2$ yang mencakup 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan dan desa/kelurahan di Kota Pariaman

No	Kecamatan	Ibu Kota	Kelurahan	Desa	Luas Daerah(Km ²)
1	Pariaman Utara	Naras	-	17	23.35
2	Pariaman Tengah	Pariaman	16	6	15.68
3	Pariaman Selatan	Kurai taji	-	16	16.82
4	Pariaman Timur	Sei,Pasak	-	16	17.51
Kota Pariaman			16	55	73.36

Sumber : Kota Pariaman Dalam Angka Tahun 2023



Kota Pariaman terdiri dari 4 kecamatan 16 Kelurahan 55 desa dengan jumlah penduduk Tahun 2023 berjumlah 101.680 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman Tahun 2018– 2023

No	Kecamatan	TAHUN						% Penduduk /Kec
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pariaman Tengah	31.413	31.690	31.947	32.349	33.183	34.232	33,67
2	Pariaman Utara	22.887	23.314	23.280	23.754	24.612	25.395	24,98
3	Pariaman Selatan	19.398	19.899	19.992	20.219	20.844	21.438	21,08
4	Pariaman Timur	18.244	18.871	19.140	19.318	20.051	20.615	20,27
	KOTA PARIAMAN	91.942	93.774	94.359	95.640	98.690	101.680	100

Sumber :Dinas Kependudukan dan Capil

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Penduduk per kecamatan kota Pariaman dari tahun 2018 - 2023 terus meningkat, dan terjadi penambahan jumlah penduduk tiap tahunnya.

Kota Pariaman secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan V Koto Kp. Dalam dan V Koto Timur (Kab. Padang Pariaman)
- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris (Kab. Pd. Pariaman)
- 3) Sebelah timur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab. Pd. Pariaman)
- 4) Sebelah Barat : Samudra Indonesia

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kota Pariaman



❖ Topografi

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Propinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Memiliki 6 buah pulau-pulau kecil yaitu Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. panjang pantai lebih kurang 12,7 kilometer.

Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh tiga buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah dan Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan.

Tabel 1.3
Kondisi Topografi Kota Pariaman

No	Kondisi Topografi	Pariaman Utara	Pariaman Tengah	Pariaman Selatan	Jumlah (Ha)
1	Datar - (0-2%)	2.479	2.313	1.994	6.786
2	Bergelombang - (3-15%)	0	64	120	184
3	Curam - (16-40%)	366	0	0	366
4	Sangat Curam - (>40%)	0	0	0	0
Jumlah (ha)		2.845	2.377	2.114	7.336

Sumber : Profil Kota Pariaman



Seperti pada umumnya daerah lain, Kota Pariaman yang berada di bagian Pantai Barat Pulau Sumatera, memiliki jenis batuan resen dan tunda vulkan. Kondisi tanah relatif subur dan sangat berpotensi untuk dikembangkan pada kegiatan pertanian. Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman terdiri dari tanah Glaisol Distrik, Latosol Kronik, Andosol Humik, dan Folkal Datar.

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan rata-rata pertahun mencapai angka sekitar 336 mm, dengan lama hari hujan 199 hari. Suhu rata-rata 25,14°Celsius, dengan kelembaban udara rata-rata 86,57% dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam.

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang berhawa cukup panas, hal ini disebabkan karena secara geomorfologi wilayah Kota Pariaman berada di daerah pesisir pantai dengan panjang garis pantai sekitar 12,00 Km dan ketinggian rata-rata 0-15 M dpl, sehingga suhu rata-rata pada siang hari cukup panas dan kelembaban yang cukup tinggi.

Tabel 1.4
Ketinggian, Panjang Garis Pantai Kota Pariaman
Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ketinggian (dpl)	Panjang Garis Pantai (Km)
Pariaman Selatan	0 – 10	3,30
Pariaman Tengah	0 – 10	4,30
Pariaman Timur	5 – 15	0,00
Pariaman Utara	0 – 10	4,40
Kota Pariaman	0 - 15	12,00

Sumber : Kota Pariaman Dalam Angka Tahun 2023

Ketersediaan air tanah di Kota Pariaman terdiri dari tiga tipe akuifer, yaitu pertama, akuifer produktif dengan penyebaran luas yang terdapat



disebagian besar wilayah kota. Kedua, akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas terdapat di bagian tenggara kota, dan ketiga, akuifer produktif sedang setempat terdapat di bagian tengah wilayah kota membelah dari utara ke selatan.

Geomorfologi Kota Pariaman terdiri atas dataran estuarin sepanjang hilir sungai pantai. Pada daerah sepanjang aliran sungai di bagian selatan terdapat dataran banjir pada sungai meander di bagian hilir pesisir. Dibagian tengah dan utara terdapat dataran vulkanik dan perbukitan vulkanik.

Kondisi tanah wilayah Kota Pariaman umumnya memiliki kondisi yang relatif subur. Dengan kondisi seperti itu, maka kegiatan pertanian sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut di Kota Pariaman. Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman yang tersebar di empat kecamatan Kota Pariaman, seperti Tabel

Tabel 1.5
Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman

Jenis Tanah	Luas (km ²)
Glaisol Distrik	1,335
Latosol Kronik	835
Andosol Humik	50
Volkan Datar	2,507
pasir pantai	826
glaisol autrik	1,254

Berdasarkan sistem klasifikasi Soil Survey Staff USDA, jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman yaitu:

- Satuan lahan tanah Dystropept, Paleudults, Tropaquept yang terdapat di dataran bergelombang di bagian utara.
- Satuan tanah Tropaquets, Dystropepts, Tropopsamments, Tropofluvents yang terdapat pada daerah aliran sungai di bagian utara.
- Satuan tanah Tropaquets, Tropohemist yang terdapat pada daerah dataran di bagian tengah



- d. Satuan tanah Tropopsammments, Tropaquents dan Sulfaquents yang terdapat di bagian barat di pesisir pantai.

1.4. Analisis Isu-Isu Strategis

Pembangunan daerah dilakukan bertujuan untuk mengatasi permasalahan daerah. Dengan pembangunan yang berkualitas diharapkan masyarakat akan merasakan dampaknya sehingga akan memperbaiki daya saing kualitas kehidupan masyarakat yang akan berakhir pada kesejahteraan masyarakat.

1.4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Kota Pariaman menghadapi permasalahan pembangunan secara makro antara lain sebagai berikut :

- 1) Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Permasalahan pembangunan ekonomi Kota Pariaman tergambar dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, antara tahun 2016 sampai 2020, memperlihatkan kecenderungan yang semakin melambat. Walaupun pada pada tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,59 % . Dan pada tahun 2017 mangalami sedikit peningkatan menjadi 5,61 Kemudian pada tahun 2018 dan 2019, turun lagi menjadi masing-masing 5,47 % dan 5,30 %, Kemudian pada tahun 2020



pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman sebesar -1,32 % akibat pandemi covid-19. Dan pertumbuhan yang minus ini hampir dialami oleh semua daerah di Indonesia. Memang secara data BPS tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman yang cenderung melambat, Hal yang sama juga dialami oleh provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman dalam 5 tahun terakhir tersebut masih diatas pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun jika dibandingkan dengan sesama Kota di Provinsi Sumatera Barat. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman berada pada nomor urut ke-3 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dianggap sebagai suatu permasalahan makro daerah Kota Pariaman yang harus secara bertahap bisa diatasi.

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera Barat (Provinsi)	5,05	-1,60	3,29	4,36	4,62
Kabupaten Kepulauan Mentawai	4,76	-1,85	2,89	4,94	4,04
Kabupaten Pesisir Selatan	4,81	-1,11	3,37	4,01	4,19
Kabupaten. Solok	5,07	1,12	3,32	4,28	4,36
Kabupaten Sijunjung	4,83	-1,10	3,15	3,93	4,26
Kabupaten Tanah Datar	5,01	-1,13	3,30	4,16	4,44
Kabupaten Padang Pariaman	2,51	-10,46	2,18	6,83	5,46
Kabupaten Agam	4,81	-1,38	3,70	4,21	4,56
Kabupaten Lima Puluh Kota	5,10	-1,16	3,33	4,02	4,55
Kabupaten Pasaman	4,84	-0,87	3,39	4,08	4,41
Kabupaten Solok Selatan	4,89	-1,24	3,35	4,01	4,57
Kabupaten Dharmasraya	4,98	-1,39	3,42	4,27	4,35
Kabupaten Pasaman Barat	4,49	-1,34	3,75	4,13	4,33
Kota Padang	5,65	-1,86	3,66	4,31	4,54
Kota Solok	5,49	-1,42	3,32	4,60	4,81
Sawah Lunto	5,49	-1,27	2,49	3,96	4,46
Padang Panjang	5,56	-1,44	3,46	4,39	4,84
Bukittinggi	5,84	-1,74	3,61	4,67	4,79
Payakumbuh	5,89	-1,66	3,58	4,51	4,70
Pariaman	5,30	-1,32	3,53	4,53	4,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat



Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama Tahun 2023 tercatat 4,79 persen. Angka ini diperoleh dari besarnya kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari 3.669.62 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 3.836.54 juta rupiah pada tahun 2022 sedangkan tahun 2023 menjadi Rp. Rp. 4.018.868,33..

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Pariaman pada tahun 2022 tercatat 5.881.85 juta rupiah, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun yang lalu dimana pada tahun 2021 tercatat 5.258.657,03 juta rupiah.

Struktur perekonomian Kota Pariaman tahun 2022 menunjukkan 4 kategori lapangan usaha yang kontribusinya diatas 10 persen dalam pembentukan nilai tambah bruto. Secara berurutan masing-masing yaitu kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 17,93 persen, kedua kategori lapangan usaha konstruksi sebesar 15,42 persen, dan yang ketiga kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,90 persen, dan yang keempat dari sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,21 persen.

Laju pertumbuhan PDRB Kota Pariaman pada tahun 2022 sebesar 3,53% berada pada urutan ke tujuh jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya se Sumatera Barat. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:



Tabel 1.7

PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah/Jiwa) Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat (Provinsi)	42,80	45,21	44,03	45,29	50,26
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	47,06	50,44	49,46	54,80	60,44
Pesisir Selatan	28,32	30,25	29,96	29,29	32,07
Kab.Solok	34,10	36,36	35,96	35,72	39,42
Sijunjung	36,31	38,46	37,87	40,31	44,34
Tanah Datar	35,13	37,58	37,34	36,31	39,72
Padang Pariaman	49,45	51,14	42,95	42,62	50,01
Agam	39,24	41,80	41,19	39,96	43,93
Lima Puluh Kota	38,27	40,79	40,24	41,99	45,69
Pasaman	29,87	31,66	31,32	31,12	33,70
Solok Selatan	30,97	32,57	31,81	31,26	34,19
Dharmasraya	40,14	41,78	40,41	46,52	51,88
Pasaman Barat	33,52	34,69	33,75	36,51	40,42
Kota :					
Padang	61,24	65,65	64,67	71,36	78,35
Kota Solok	53,43	57,00	56,05	57,10	62,88
Sawah Lunto	55,00	58,85	58,02	58,62	65,73
Padang Panjang	60,35	64,72	63,82	64,09	70,73
Bukittinggi	62,21	66,49	65,00	74,24	82,85
Payakumbuh	45,88	50,34	49,63	51,64	57,73
Pariaman	52,68	56,56	55,86	55,18	61,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan BPS Statistik Indonesia

Adapun permasalahan Pembangunan Ekonomi disebabkan oleh:

1. Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian ;
2. Masih belum optimalnya; serta
3. nilai investasi Produktivitas sektor pariwisata masih rendah

2) Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia Kota Pariaman selama 2018-2022 yang diindikasikan oleh indeks pembangunan manusia secara umum dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, capaian IPM Kota Pariaman adalah sebesar 76,26 dan pada tahun 2019 capaian IPM meningkat menjadi 76,70. pada tahun 2020 sebesar 76,90,



serta tahun 2021 sebesar 77,07, sedangkan Tahun 2022 IPM Kota Pariaman diangka 77,65, sedangkan. Angka IPM Kota Pariaman secara umum lebih tinggi dari IPM Provinsi yang sebesar 73,26 tahun 2022 dan IPM Nasional sebesar 72,91. IPM 19 Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota
Se Sumatera Barat Tahun 2018-2022**

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat (Provinsi)	71,73	72,39	72,38	72,65	73.26
Kabupaten :					
Kepulauan Mentawai	60,28	61,26	61,09	61,35	62.19
Pesisir Selatan	69,40	70,08	69,90	70,03	70.84
Kab.Solok	68,60	69,08	69,08	69,24	70.02
Sijunjung	66,97	67,66	67,74	67,86	68.69
Tanah Datar	71,25	72,14	72,33	72,46	73.29
Padang Pariaman	69,71	70,59	70,61	70,76	71.63
Agam	71,70	72,37	72,46	72,57	73.29
Lima Puluh Kota	69,17	69,67	69,47	69,68	70.28
Pasaman	65,60	66,46	66,64	66,77	67.41
Solok Selatan	68,45	68,94	69,04	69,23	69.71
Dharmasraya	70,86	71,52	71,51	71,76	72.30
Pasaman Barat	67,43	68,21	68,49	68,76	69.57
Kota :					
Padang	82,52	82,68	82,82	82,9	83.29
Kota Solok	77,89	78,38	78,29	78,41	79.23
Sawahlunto	71,72	72,39	72,64	72,88	73.73
Padang Panjang	77,30	78,00	77,93	77,97	78.78
Bukittinggi	80,11	80,71	80,58	80,7	81.42
Payakumbuh	78,23	78,95	78,90	79,08	79.53
Pariaman	76,26	76,70	76,90	77,07	77.65

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan BPS Statistik Indonesia

Permasalahannya akan lebih terlihat pada komponen pembentuk IPM meliputi :

- 1) Angka Harapan Lama Sekolah,
- 2) Angka Rata-Rata Lama sekolah,
- 3) Umur Harapan Hdup (UHH), dan,
- 4) Daya Beli Masyarakat.



Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah mencerminkan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan. Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1.9 dan Tabel 1.10 capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 capaian Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 14,51 dan menjadi 14,55 pada tahun 2021, dan ditahun 2022 14,61. Sementara itu capaian pada Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017 sebesar 10,10 dan menjadi 10,67 pada Tahun 2021 dan di tahun 2022 10,78. Namun jika dibandingkan dengan sesama Kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk capaian Angka Harapan Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman masih kalah dari Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi. Sedangkan untuk capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pemerintah Kota Pariaman berada di urutan ke-6 dari 7 Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.9
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/kota
Se Sumatera Barat Tahun 2017-2022

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat (Provinsi)	13,94	13,95	14,01	14,02	14,09	14,10
Kabupaten :						
Kepulauan Mentawai	12,07	12,39	12,76	12,82	12,89	12,89
Pesisir Selatan	13,06	13,30	13,31	13,32	13,33	13,65
Kab.Solok	13,01	13,02	13,03	13,04	13,05	13,30
Sijunjung	12,34	12,35	12,36	12,37	12,38	12,64
Tanah Datar	13,59	13,88	14,32	14,33	14,34	14,59
Padang Pariaman	13,56	13,57	13,62	13,67	13,68	13,93
Agam	13,94	13,85	13,86	13,87	13,88	13,88
Lima Puluh Kota	13,26	13,27	13,28	13,29	13,3	13,40
Pasaman	12,72	12,78	12,79	12,80	12,81	13,05
Solok Selatan	12,68	12,69	12,70	12,71	12,72	12,73
Dharmasraya	12,40	12,41	12,42	12,43	12,44	12,51
Pasaman Barat	13,06	13,22	13,40	13,61	13,68	13,69
Kota :						
Padang	16,15	16,50	16,51	16,52	16,53	16,54
Kota Solok	14,29	14,30	14,31	14,32	14,33	14,34



Sawah Lunto	13,14	13,15	13,16	13,17	13,18	13,42
Padang Panjang	15,03	15,04	15,05	15,06	15,07	15,07
Bukittinggi	14,94	14,95	14,96	14,97	14,98	14,98
Payakumbuh	14,23	14,24	14,25	14,26	14,27	14,29
Pariaman	14,51	14,52	14,53	14,54	14,55	14,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.10
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 202017-2022

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat (Provinsi)	8,72	8,76	8,92	8,99	9,07	9,18
Kabupaten :						
Kepulauan Mentawai	6,69	6,95	7,08	7,09	7,20	7,48
Pesisir Selatan	8,13	8,14	8,25	8,26	8,27	8,43
Kab.Solok	7,60	7,84	7,85	7,86	7,87	7,89
Sijunjung	7,72	7,77	8,10	8,11	8,12	8,30
Tanah Datar	8,14	8,44	8,45	8,61	8,62	8,90
Padang Pariaman	7,21	7,50	7,86	7,87	7,88	8,16
Agam	8,39	8,69	8,85	8,96	8,97	8,98
Lima Puluh Kota	7,96	7,97	7,98	7,99	8,07	8,08
Pasaman	7,65	7,66	7,86	8,09	8,10	8,11
Solok Selatan	8,00	8,15	8,16	8,28	8,32	7,89
Dharmasraya	8,24	8,25	8,46	8,47	8,55	8,56
Pasaman Barat	7,85	7,86	8,06	8,19	8,27	8,55
Kota :						
Padang	11,32	11,33	11,34	11,58	11,59	11,68
Kota Solok	10,95	11,01	11,02	11,03	11,04	11,35
Sawah Lunto	9,93	9,94	9,97	10,17	10,32	10,43
Padang Panjang	11,43	11,44	11,45	11,62	11,63	11,92
Bukittinggi	11,30	11,31	11,32	11,33	11,34	11,63
Payakumbuh	10,45	10,46	10,72	10,73	10,81	10,82
Pariaman	10,10	10,36	10,37	10,59	10,67	10,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Sementara itu pada Usia Harapan Hidup penduduk yang mencerminkan pembangunan manusia dalam bidang kesehatan, menunjukkan usia harapan hidup penduduk Pemerintah Kota Pariaman dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 Usia Harapan Hidup Kota Pariaman sebesar 70,38 menjadi sebesar 70,67



Pada Tahun 2022. Namun kondisi ini capaian usia harapan hidup ini masih berada pada nomor urut ke-6 dari 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya akses dan kualitas layanan kesehatan. Komponen pertama dalam pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.11
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/kota
Se Sumatera Barat Tahun 2017-2022

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat (Provinsi)	68,78	69,01	69,31	69,47	69,59	69,90
Kabupaten :						
Kepulauan Mentawai	64,37	64,49	64,68	64,73	64,73	64,93
Pesisir Selatan	70,23	70,45	70,73	70,86	70,96	71,25
Kab.Solok	67,65	67,95	68,34	68,58	68,79	69,19
Sijunjung	65,44	65,69	66,02	66,21	66,36	66,70
Tanah Datar	69,11	69,38	69,73	69,94	70,12	70,49
Padang Pariaman	67,96	68,23	68,58	68,79	68,97	69,34
Agam	71,57	71,83	72,17	72,37	72,53	72,89
Lima Puluh Kota	69,31	69,47	69,70	69,79	69,84	70,08
Pasaman	66,54	66,82	67,18	67,40	67,59	67,96
Solok Selatan	66,92	67,21	67,58	67,81	68,01	68,38
Dharmasraya	70,44	70,73	71,10	71,33	71,53	71,90
Pasaman Barat	67,15	67,37	67,67	67,82	67,94	68,25
Kota :						
Padang	73,20	73,55	73,57	73,65	73,69	73,93
Kota Solok	72,92	73,14	73,45	73,61	73,73	74,06
Sawah Lunto	69,39	69,59	69,87	70,00	70,1	70,40
Padang Panjang	72,46	72,58	72,77	72,82	72,82	73,93
Bukittinggi	73,69	73,91	74,22	74,38	74,5	74,82
Payakumbuh	73,13	7,33	73,61	73,74	73,84	74,14
Pariaman	69,67	69,87	70,15	70,28	70,38	70,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Untuk komponen yang lain dari pembentuk IPM yaitu Daya Beli Masyarakat/ Pengeluaran Per Kapita. Selama dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 Daya Beli Masyarakat/ Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp. 12.425,- menjadi pada



Tahun 2021 sebesar Rp. 12.818,-. Tahun 2022 sebesar Rp. 13,150,-. Kondisi ini sedikit lebih baik karena berada karena pada urutan ke-4 diantara 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.12
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2017-2022 (Ribu Rp/Org/Tahun)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat (Provinsi)	10.306	10.638	10.925	10.733	10.790	11.130
Kabupaten :						
Kepulauan Mentawai	6.010	6.211	6.429	6.281	6.321	7,08
Pesisir Selatan	8.819	9.089	9.444	9.212	9.270	6.567
Kab.Solok	9.743	10.035	10.309	10.171	10.215	10.539
Sijunjung	10.093	10.277	10.395	10.361	10.389	10.582
Tanah Datar	10.331	10.417	10.709	10.588	10.616	10.695
Padang Pariaman	10.579	10.919	11.158	10.998	11.050	11.159
Agam	9.388	9.489	9.780	9.651	9.662	10.171
Lima Puluh Kota	9.151	9.500	9.842	9.596	9.668	10.035
Pasaman	7.882	8.238	8.599	8.425	8.440	8.619
Solok Selatan	9.891	10.199	10.505	10.325	10.367	10.560
Dharmasraya	10.851	11.189	11.431	11.273	11.324	11.650
Pasaman Barat	8.704	8.979	9.180	9.047	9.089	9.381
Kota :						
Padang	13.957	14.312	14.728	14.481	14.540	14.889
Kota Solok	11.673	11.968	12.337	12.117	12.168	12.515
Sawah Lunto	9.343	9.765	10.238	10.182	10.195	10.537
Padang Panjang	10.240	10.440	11.013	10.734	10.754	11.153
Bukittinggi	12.816	13.035	13.586	13.282	13.331	13.633
Payakumbuh	12.858	13.114	13.464	13.281	13.317	13.687
Pariaman	12.425	12.611	12.958	12.796	12.818	13.150

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Pariaman dalam bidang Pembangunan Manusia yang berkualitas adalah:

- 1 Kualiras pendidikan masyarakat Kota Pariaman masih rendah;
 - 2 Kualits kesehatan masyarakat Kota Pariaman masih rendah;
 - 3 Pendapatan perkapita masyarakat masih rendah.
- 3) Permasalahan penerapan reformasi birokrasi yang masih belum optimal



Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah belum optimalnya penerapan program reformasi birokrasi untuk mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi belum didukung dengan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang memadai. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang masih terbatas bagi penyelenggara pemerintahan menjadi kendala dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kemudian dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilakukan merata secara optimal. SPIP dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Dalam cakupan 8 (delapan) program reformasi birokrasi, permasalahan yang mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang, meliputi:

1 Manajemen Perubahan

Pemerintahan Kota Pariaman merupakan Pemerintah Kota punya visi perubahan yang jelas dalam tatakelola pemerintahan. Beranjak dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Pariaman saat ini memiliki orientasi budaya kerja yang berbeda, tata nilai yang berbeda, serta etika kerja yang berbeda dalam menyelenggarakan pemerintahan. Keadaan seperti ini akan menjadi problem apabila tidak ditangani dengan benar dan tepat.

2 Penguatan Pengawasan

Di sisi lain, pemerintah Kota Pariaman juga menghadapi masalah dalam hal kurangnya kemampuan dan jumlah personil aparatur pengawas. Belum dapat diselenggarakannya kegiatan pencanangan



(launching) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan pemerintah Kota Pariaman secara menyeluruh. Masalah lain yang muncul terkait dengan hal di atas adalah masalah sistem dokumentasi dan monitoring yang terintegrasi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi itu dapat dilihat pengelolaan dokumentasi dan kearsipan yang masih bersifat manual dan belum terdokumentasi secara elektronik.

3 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN-RB tahun 2021, bahwa secara umum penerapan manajemen kinerja menunjukkan belum membaik dan bersifat implementatif sampai ke level operasional. Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah masalah pengukuran kinerja, khususnya indikator kinerja.

4 Penguatan Kelembagaan

Desain organisasi yang dirancang saat ini belum optimal menjawab kebutuhan organisasi yang ideal. Akibatnya masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi pada unit kerja pada unit utama serta masih terdapatnya besaran organisasi unit pelaksana teknis yang tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Dalam tataran implementasi, masih terdapat beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdapatnya ketidakseimbangan beban kerja antar bagian, serta kurang berimbangannya penjabaran tugas dan fungsi ke dalam program/kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibandingkan dengan program/kegiatan fasilitasi.

5 Penguatan Tata Laksana

Dalam bidang tata laksana masih ditemui beberapa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kota Pariaman yang belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi. Hal ini berakibat pada layanan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses



yang pasti karena terdapat sistem tata laksana yang tidak baik. Penerapan e-government telah dilaksanakan pada beberapa layanan di pemerintah Kota Pariaman, namun demikian pemanfaatannya belum efektif efisien, dan terintegasi dalam satu sistem. Selain itu manajemen kearsipan berbasis TIK belum berjalan baik dan belum diterapkan di semua unit utama.

6 Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

SDM pemerintah Kota Pariaman, masih belum memenuhi jumlah yang sesuai untuk menjalankan fungsi organisasi. Ditinjau dari aspek lain, jenis pegawai yang ada di pemerintah Kota Pariaman secara kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, serta belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja. Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi kepegawaian, yakni kurangnya kesadaran dan partisipasi unit kerja dalam mengelola data-data kepegawaiannya sehingga berpengaruh pada tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan pemanfaatannya secara terpadu. Sementara itu, pemerintah Kota Pariaman belum ada diklat yang digunakan sebagai tempat pelatihan dan pendidikan pegawai.

7 Deregulasi Kebijakan

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Banyak ditemukan problem kelembagaan dan masyarakat yang menyangkut pelayanan diantaranya: Ditemukan adanya keterlambatan pelayanan, menumpuk urusan pelayanan pada satu OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah), pegawai yang mempersulit pelayanan, rantai birokrasi pelayanan yang masih panjang. Untuk itu, maka perubahan yang besar di dalam reformasi birokrasi ini harus dikelola dengan baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik akan



dirancang serta diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada di pemerintah Kota Pariaman.

Secara umum, masing-masing program area perubahan pemerintahan memiliki tujuan spesifik sebagai berikut:

- Manajemen Perubahan bertujuan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.
- Penguatan Pengawasan bertujuan menciptakan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas KKN.
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber yang dipergunakannya.
- Penguatan Kelembagaan bertujuan mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
- Penguatan Tata Laksana bertujuan mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintah Kota Pariaman dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
- Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.
- Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman bertujuan terciptanya sistem peraturan perundang-undangan dan Peraturan di Lingkungan pemerintah Kota Pariaman yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.



Untuk menjalankan agenda reformasi ini, diperlukan adanya dukungan dana serta unit pelaksana yang bertanggung jawab menjalankan program ini. Garis besar rencana anggaran reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Pariaman dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 telah tersusun bagi terlaksananya reformasi birokrasi pada kedelapan program area perubahan.

Tabel 1.13
Capaian Nilai Sakip dan Indeks RB Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai Sakip	52,35 (CC)	53,22 (CC)	56,15 (CC)	56,50 (CC)	60,06 (B)	61,08 (B)
2.	Indeks RB	-		51,62 (CC)	53,42 (CC)	58,19 (CC)	62,68 (B)

Sumber : Kemenpan & RB Republik Indonesia

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu:

1. belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik;
2. belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel
3. belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah yang kapabel;

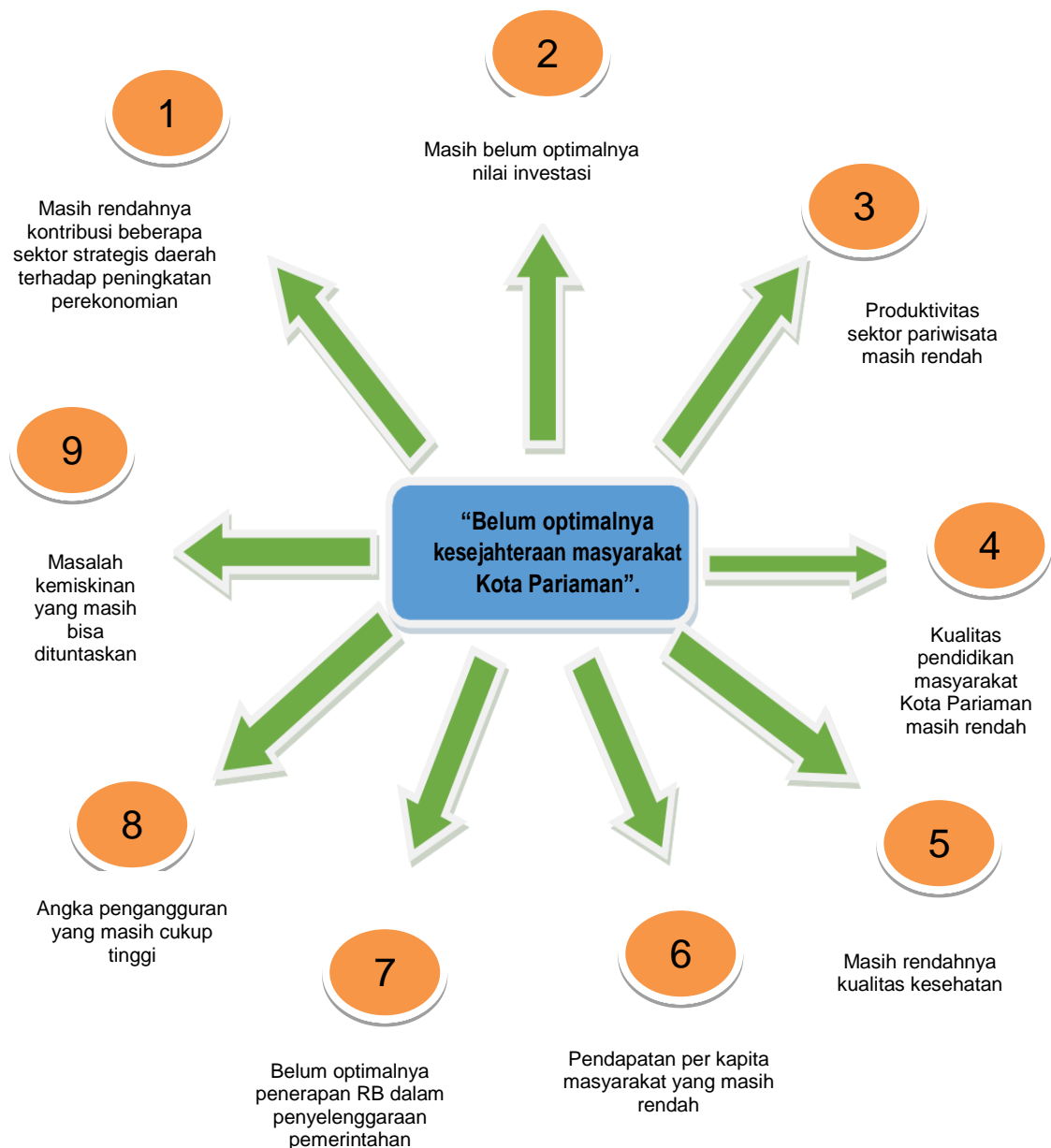
Permasalahan makro pembangunan Kota Pariaman tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 (delapan) pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1 Masih rendahnya kontribusi beberapa sektor strategis daerah terhadap peningkatan perekonomian.
- 2 Masih belum optimalnya nilai investasi.
- 3 Produktivitas sektor pariwisata masih rendah.
- 4 Kualitas pendidikan masyarakat Kota Pariaman masih rendah.
- 5 Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat
- 6 Pendapatan perkapita masyarakat yang masih rendah



- 7 Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 8 Angka pengangguran yang masih cukup tinggi
- 9 Masalah kemiskinan yang masih bisa dituntaskan

Gambar 1.2
Mata Rantai Permasalahan Utama dan Pokok Pembangunan Daerah Kota Pariaman





1.5 Strategis Pembangunan Daerah

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah 5 tahun, dimana identifikasi dan klasifikasi isu-isu didasarkan kepada asumsi pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, luas dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan dengan memperhatikan pada tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Perumusan isu strategis yang berangkat dari permasalahan pembangunan daerah, akan menjadi dasar yang tepat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang strategis.

- 1) Kajian Kebijakan dan Agenda Pembangunan Sektoral, Regional, Nasional dan Global
 - a) Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)

Melenium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG`s merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada bulan September 2015, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah (RPJMD) Kota.

Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan



Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.

Sustainable Development Goals terdiri dari tiga tujuan yang dibangun melalui 5 pondasi dan 4 pilar. Lima pondasi SDGs meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Sedangkan 4 Pilar SDGs yakni Sosial, Lingkungan, Ekonomi, dan Hukum & Tata Kelola dengan diturunkannya menjadi 17 tujuan .



Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Merujuk terhadap Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD dijelaskan, bahwa KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk



mengintegrasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Dari total 17 indikator kemudian diinterpretasikan melalui indikator yang dibagi sesuai prioritas kewenangannya. Total terdapat 222 indikator yang menjadi acuan Kota Pariaman, yang harus dicapai untuk mendukung indikator SDG`s. Berikut merupakan capaian KLHS Kota Pariaman yang dirumpunkan dari 17 Goals SDG`s.

Tabel 1.14
Ketercapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Pariaman

NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	25	14	9	1	1
TPB 2	Tanpa Kelaparan	11	7	3	1	0
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	29	4	1	0
TPB 4	Pendidikan berkualitas	13	8	5	0	0
TPB 5	Kesetaraan gender	14	9	4	1	0
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	18	8	7	1	2
TPB 7	Menjamin akses energi	2	0	0	0	2
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	7	8	4	0
TPB 9	Infrastruktur, industri dan inovasi	13	7	2	2	2
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	6	4	1	1	0
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	20	8	4	0	8
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	1	1	1	2
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	2	2	0	0	0
TPB 15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	1	0	2	1
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	13	5	3	0
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	8	5	2	0
Total		222	126	58	20	18
Persentase		100%	57%	26%	9%	8%

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2022

Menurut pilar, capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Pariaman, bahwa Pilar yang capaian tertinggi adalah pilar sosial (67 indikator dengan kategori SS), pilar ekonomi (26 indikator dengan kategori SS) dan pilar lingkungan (22 indikator dengan kategori SS). Kategori SB tertinggi adalah pilar sosial (25 indikator) sedangkan kategori NA tertinggi adalah pilar ekonomi (9 indikator). Rincian masing-masing indikator TPB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 1.15
Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman Menurut Pilar

NO	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Sosial	97	67	25	4	1
2	Ekonomi	55	26	16	9	4
3	Lingkungan	49	20	12	4	13
4	Hukum dan Tata Kelola	21	13	5	3	0
Total		222	126	58	20	18
Persentase		100%	57%	26%	9%	8%

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2022

Sedangkan capaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Pariaman yang diampu Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Capaian Pelaksanaan TPB Kota Pariaman menurut OPD

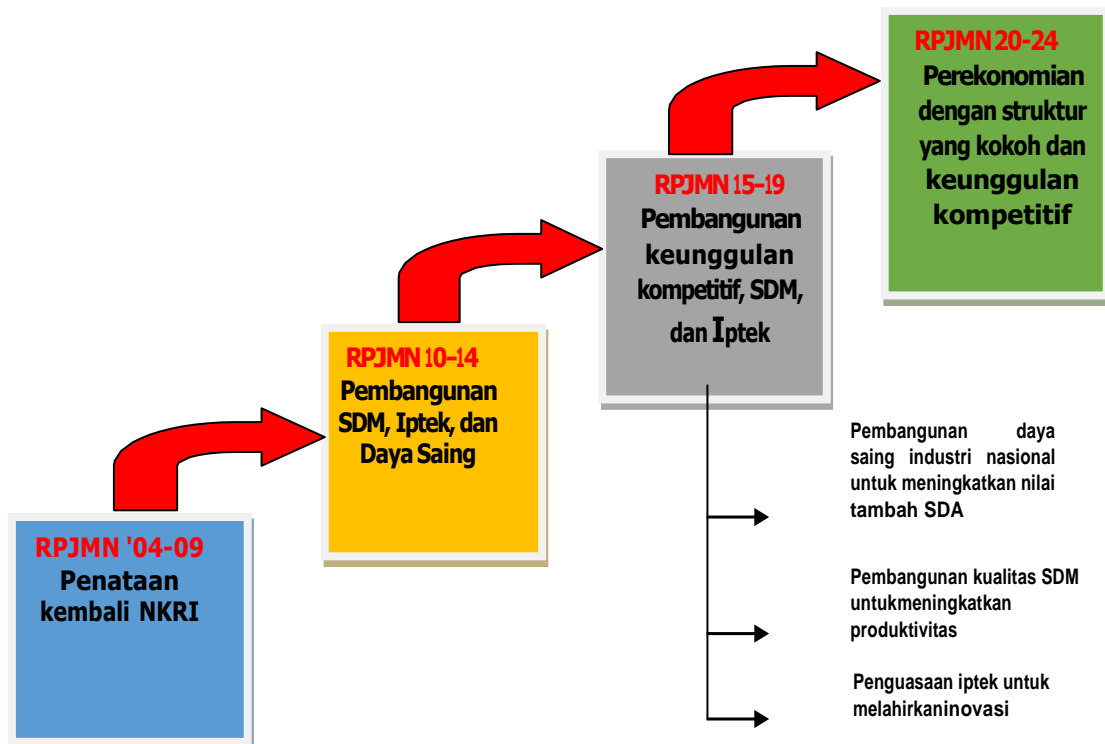
NO	Perangkat Daerah Pengampu TPB	Jml Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Bagian administrasi pembangunan	1	0	1	0	0
2	Bagian hukum	2	2	0	0	0
3	Bagian organisasi	3	1	1	1	0
4	Bagian pengadaan barang dan jasa	2	0	2		0
5	BAPPEDA	7	4	2	1	0
6	Badan keuangan daerah	5	4	1	0	0
7	BKPSDM	1	0	1	0	0
8	Badan penanggulangan bencana daerah	14	12	1	0	1
9	Badan pusat statistik	5	3	2	0	0
10	Dinas kesehatan	40	33	6	1	0
11	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	4	3	1	0	0
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	7	1	1	0
13	Dinas Koperindag	5	0	1	4	0
14	Dinas Pariwisata dan Budaya	4	1	2	1	0
15	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	17	9	7	0	1
16	Dinas Perhubungan	6	2	1	0	3
17	Dinas Perkim LH	20	6	2	4	8
18	Dinas P3AKB	12	10	1	1	0
19	Dinas PUPR dan Pertanahan	22	7	10	0	5
20	Dinas Sosial	16	7	9	0	0
21	Disdukcapil	5	5	0	0	0
22	DPMPTSP dan Naker	14	5	5	4	0
23	Inspektorat	1	0	0	1	0
Jumlah		222	126	58	20	18
Persentase		100%	57%	26%	9%	8%

Sumber : RPD Kota Pariaman, 2023

b) RPJPN Tahun 2005-2025

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Kota Pariaman pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN. Mengingat perodesasi RPJMD Kota Pariaman mengikuti periode RPJMN III dan IV, maka arah kebijakan RPJMD Kota Kota Pariaman menyelaraskan dengan periode RPJMN III (2015-2019) dan IV (2019-2024) yang mengacu pada RPJPN tahap ketiga (2015-2019) dan tahap ke empat (2019-2024)..

Gambar 1.3.
Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025



Arah kebijakan untuk RPJMN tahap III ditekankan pada pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah SDA, pembangunan kualitas SDM untuk meningkatkan



produktivitas, dan penguasaan IPTEK untuk melahirkan inovasi. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM tahap III, RPJM tahap III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kualitas sumber daya manusia terus mengalami perubahan positif yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin efektif dan efisien yang dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan

dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; makin selarasnya pembangunan



pendidikan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air; serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Wilayah perdesaan merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur perdesaan harus terus dike]mbangkan terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan bagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, dengan terpenuhinya kondisi tersebut semakin mendorong terwujudnya kabupaten/kota tanpa permukiman kumuh.

Berdasarkan telaahan RPJPN tahap III (2015-2019), maka pembangunan Kota Pariaman harus selaras dengan arahan RPJPN tahap III dengan menyesuaikan karakteristik lokal seperti:

- 1 Meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;



- 2 Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
- 3 Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta
- 4 Semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan untuk mendukung daya saing perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan kompetitif.

c) RPJMN Tahun 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Gambar 1.4
Nawacita kedua RPJMN 2020-2024



Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Gambar 1.5
5 Arahan Utama Presiden



Selanjutnya visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sebagai berikut :



- 1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2 mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3 meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 7 memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;

d) RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka Visi Provinsi Sumatera Barat untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah:



“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul



dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama kita dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. Pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Dalam pencapaian visi tersebut. Adapun misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
- 2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi
- 3 Syara', Syara' Basandi Kitabullah;



- 4 Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan;
- 5 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital;
- 6 Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
- 7 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- 8 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Prioritas Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- 1 Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat;
- 2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan;
- 3 Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan;
- 4 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- 5 Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis;
- 6 Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi;
- 7 Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan;
- 8 Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal;
- 9 Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur;
- 10 Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan visi, misi dan prioritas tersebut, Provinsi Sumatera Barat menekankan pembangunan daerah pada masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan melalui perbaikan sikap



mental yang sesuai dengan nilai agama, adat dan kearifan lokal budaya Minangkabau, yang kemudian diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan SDM, ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Prioritas pembangunan daerah provinsi yang diusulkan dikembangkan dari persyaratan minimum standar pembangunan daerah (SPM). Dan Memperhatikan kondisi daerah dan isu global Sustainable, maka prioritas pembangunan untuk provinsi Sumatera Barat juga difokuskan pada pengembangan sumber energi terbarukan dan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan, disamping kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Dalam rangka menunjang pembangunan berdimensi kewilayahan provinsi Sumatera Barat maka kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dilakukan pemerintah Kota Pariaman juga akan memperhatikan pembangunan berdimensi kewilayahan yang telah ditetapkan Provinsi Sumatera Barat untuk Kota Pariaman meliputi :

- 1 Pengembangan Sistem Perkotaan yang menetapkan Kota Pariaman sebagai salah satu daerah untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- 2 Sebagai Kawasan sepadan pantai.
- 3 Sebagai Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya. Dan Kota Pariaman ditetapkan sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau.
- 4 Sebagai Kawasan pengembangan Kawasan Sentra Industri dengan komoditi : 1) Industri Tekstil dan Produksi Tekstil, 2) Industri Makanan dan Ringan, 3) Industri Pengelohan Hasil Laut dan Perikanan.
- 5 Sebagai Kawasan Pariwisata dengan komoditi :
 - 1) Kawasan yang dikembangkan,
 - 2) Kawasan Pantai Gandoriah dan Pulau Angso Duo.



Tabel 1.17
Sinkronisasi Program Unggulan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
dan Program Unggulan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

NO	Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat RPJMD Tahun 2021-2026	NO	Program Unggulan Kota Pariaman RPJMD Tahun 2018-2023
1	Sumbar Sehat dan Cerdas	1	Lanjutkan Program Kesehatan Gratis
		2	Lanjutkan Program Pendidikan Gratis
		3	Kartu Pariaman Pintar
		4	Lanjutkan Bis Sekolah Gratis
		5	Program <i>satu keluarga satu sarjana</i>
		6	Kesejahteraan Guru honor PAUD, TK, SD, SMP
2	Sumbar Religius dan Berbudaya	1	Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran (Read Alquran Centre)
		2	Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tk. SD), MDW (tk. SLTP), MDU (tk. SLTA)
		3	Magrib Mengaji dan Subuh Mubarakah
		4	Lanjutkan Pembangunan Masjid Terapung Pariaman
3	Sumbar Sejahtera dan Berkeadilan	1	Program Pariaman Sejahtera
		2	Kesempatan Kerja Keluarga Miskin
		3	Revitalisasi Pasar Yang Ada Di Kota Pariaman

e) Isu Regional Provinsi Sumatera Barat

- a. Peningkatan jalan dan jembatan lintas pantai barat Sumatera dan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Peningkatan jalan dan jembatan Simpang Duku (Ketaping) — Pariaman sebagai jalan alternatif dan Padang menuju Padang Pariaman/Agam/Pasaman/Pasaman Barat.

f) RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025

RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kota Pariaman. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke



periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah disusun. Visi RPJPD Kota Pariaman tahun 2005-2025 adalah

“Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani ”.

Rumusan visi tersebut dapat diterjemahkan adanya cita dan citra Kota Pariaman dimasa mendatang untuk menjadi salah satu Kota Perdagangan Dan Jasa yang terletak dipantai Barat Sumatera. Perwujudan Kota Perdagangan Dan Jasa dimaksud utamanya dibangun dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat madani.

Kota Pardagangan merupakan Kota perdagangan mengandung arti bahwa Kota Pariaman dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, akan berkembang menjadi pusat aktivitas perdagangan baik skala regional, nasional maupun internasional.

Kota Jasa.

Kota Jasa mengandung arti bahwa Kota Pariaman dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang akan berkembang menjadi pusat aktivitas jasa pelayanan antara lain : hotel, restoran, transportasi, komunikasi, keuangan perbankan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan jasa lainnya.

Wilayah Pesisir Barat Sumatera merupakan Suatu wilayah yang batasan cakupannya meliputi di sepanjang pesisir barat pulau sumatera.

Masyarakat Madani merupakan Masyarakat Madani mengandung arti bahwa dalam 20 tahun mendatang diharapkan terwujud masyarakat Kota Pariaman yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia,berbudi pekerti luhur, peradaban maju, memiliki kesadaran



sosial yang kuat, gotong royong, sehat, cerdas, makmur, sejahtera, dalam lingkungan yang damai, tenteram, dan nyaman.

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Pariaman sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Barat Sumatera menuju masyarakat madani maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan Kualitas SDM dan Derajat Sosial Masyarakat;
- 2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan;
- 3 Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara;
- 4 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 5 Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah.

RPJPD 2005-2025 pada tahun RPJMD ke 5 (2018-2023), diarahkan dengan tetap berpegang pada capaian kinerja pada RPJMD ke 4. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-5, diarahkan untuk lebih memantapkan penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energy.

Berbagai tujuan dan target pencapaian SDGs yang relevan untuk rujukan perumusan isu strategis pembangunan Kota Pariaman untuk jangka panjang yaitu :

- 1 Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dengan target :



- a. Menurunkan proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari.
 - b. Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda.
 - c. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan.
- 2 Mencapai pendidikan dasar untuk semua dengan target :
- a. Menjamin semua anak laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
- 3 Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan target :
- a. Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan.
- 4 Menurunkan angka kematian anak dengan target : menurunkan angka kematian balita, bayi dan neonatal.
- 5 Meningkatkan kesehatan ibu dengan target: menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua.
- 6 Memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan target:
- a. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang.
 - b. Mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati, dan mencapai pengurangan laju kehilangan yang signifikan.
 - c. Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan layak serta sanitasi dasar.



- d. Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin dipermukiman kumuh.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum Kota Pariaman, analisis isu-isu strategis, strategi dan arah kebijakan, dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Memuat Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat Pengukuran Kinerja, Metode Pengukuran Pencapaian Target Kinerja, capaian dan analisis kinerja Tahun 2023, dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

a. Visi

Visi berkaitan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Pariaman dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun, pasangan **GENIUS UMAR (Walikota)–MARDISON MAHYUDDIN (Wakil Walikota)** membuat Visi Kota Pariaman tahun 2018-2023 sebagai berikut:

" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Pariaman dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Visi tersebut mengandung maksud, bahwa Pariaman sebagai kota kecil berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju



dalam wisata, perdagangan dan jasa, yang religius dan berbudaya dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, agama dan budaya.

Untuk memahami Visi Pembangunan Kota Pariaman tersebut jelaskan pengertian sebagai berikut:

Kota Wisata : Kota Pariaman diarahkan sebagai kota tujuan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Dengan gerakan yang menyatukan seluruh potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaan sarana pariwisata dan prasarana wisata atau fasilitas umum sehingga menarik wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perdagangan dan Jasa : mengandung arti bahwa Kota Pariaman akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang maju, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memerhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Pariaman. Kota Pariaman yang maju dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan serta terhadap PDRB yang semakin meningkat serta nilai investasi yang semakin besar

Religius : mengandung arti bahwa masyarakat Kota Pariaman meyakini kebenaran ajaran Agama Islam serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.



Berbudaya : mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.1
Keselarasn Visi RPJP, RPJMN, RPJMD Provinsi dengan Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023

RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023
“Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani ”	Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan	" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, yang Religius dan Berbudaya"

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Atau MISI adalah kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan diatas dapat tercapai dengan memperhatikan kondisi objektif daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman sebagai Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya" maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik Sumatra;
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya;
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City;



4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik Sumatra

Pembangunan diprioritaskan pada pembangunan destinasi wisata dan peningkatan pengelolaan wisata yang maju, religious, tertib dan berbudaya dengan cara meningkatkan daya saing pariwisata adalah bagaimana cara menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung yang tentunya akan mendatangkan devisa dan menciptakan nilai tambah *multipliers effect* terhadap akselerasi pembangunan daerah. Kota Pariaman yang kaya akan nilai sejarah, seni dan budaya dapat dikembangkan untuk tujuan pelestarian sejarah, seni dan budaya islam. Semua daya pesona tersebut memberi nilai tambah diiringi dengan usaha minat wisatawan untuk menikmati berbagai objek wisata serta hasil industri kreatif yang ada. Selain itu perlu jaminan wisata yang mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya yang tertib.

2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Pariaman. Misi membangun sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, berbudaya, dan berkualitas melalui penguasaan iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat dengan ukuran penilaian dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia



(IPM).Pengembangkan dan Peningkatan mutu SDM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, perkembangan IPTEK yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang tinggi sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender sehingga produktivitas tinggi tersebut mampu memanfaatkan peluang, dapat menghadapi tantangan dan siap mengantisipasi kompetisi global.

3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Kota Pesisir Yang Modern yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan *waterfront city*, peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Dengan tetap memperhatikan pembangunan yang dinamis, berwasasan lingkungan hidup serta mitigasi bencana.

5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.



Misi ini diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri kecil dan menengah untuk menyerap tenaga kerja yang didukung oleh keberadaan kawasan industri dan perdagangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD, misi RPJMN, misi RPJMD Provinsi dengan misi RPJMD Perubahan Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Keselarasan Misi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi 2021-2026, RPJPD Kota Pariaman 2005-2025 Dan Perubahan RPJMD Kota Pariaman 2018-2023

RPJMN 2020-2024		RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026		RPJPD Kota Pariaman 2005-2025		Perubahan RPJMD KotaPariaman 2018-2023	
No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing.	1	Meningkatkan Kualitas SDM dan Derajat Sosial Masyarakat	2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya
2	Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	3	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan	2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berwawasan Lingkungan	5	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Lokal
		5	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataaan				
		4	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil / Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital				



RPJMN 2020-2024		RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026		RPJPD Kota Pariaman 2005-2025		Perubahan RPJMD KotaPariaman 2018-2023	
No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi	No.	Misi
3	Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan	6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.	5	Mewujudkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Pembangunan Daerah	4	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;
4	Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan						
5	Kemajuan budayayang mencerminkan kepribadian bangsa	2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah <i>Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</i>	-	-	2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya
6	Penegakan Sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	7	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	4	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik	3	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga						
8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya						
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan						



c. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai kelima misi pembangunan Kota Pariaman dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berangkat dari pada Visi dan Misi tersebut, maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD sebelum perubahan maupun RPJMD setelah perubahan dijelaskan dibawah ini:

1. Dalam rangka pencapaian misi *Mewujudkan Pengelolaan Wisata Kota Yang Maju, Religius, Tertib Dan Berbudaya*, maka ditetapkan tujuan dan sasaran serta indikatornya sebagai berikut:



Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerja Misi I

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Indikator : Presentase Sektor Pawisata Terhadap PDRB	1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indikator : % Kontribusi Sektor Pawisata Terhadap PAD % Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
	Sasaran		Sasaran
1.	Terwujudnya Daya Saing Wisata Indikator : Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata % Pertumbuhan Spending Of Money	1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata. Indikator : 1. % Pertumbuhan Spending Of Money

2. Dalam rangka pencapaian misi *Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berbudaya*, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerja Misi 2

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
	Meningkatnya Kualitas SDM Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Sasaran		Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Indikator: 1) Angka Harapan Lama Sekolah 2) Angka Rata-rata Lama Sekolah	1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Indikator : 1) Angka Harapan Lama Sekolah 2) Angka Rata-rata Lama Sekolah
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator : 1) Angka Usia Harapan Hidup (UHH) 2) Indeks Keluarga Sehat	2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator : Angka Usia Harapan Hidup (UHH)
			Menurunnya prevalensi stunting Indikator : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita



3	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat Indikator : Indeks Daya Beli Masyarakat	4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Indikator : Pendapatan/PDRB perkapita
4	Menurunnya angka kemiskinan dan Pengangguran Indikator : 1) Angka Kemiskinan 2) Angka Pengangguran		
5	Meningkatnya Kemandirian Desa Indikator : 1) Indeks Desa Membangun		

3. *Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City*, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tujuan, Sasaran dan Indakotor Kinerja Misi 3

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi Indikator : Indeks RB	1	Meningkatnya Birokrasi Yang Baik dan Bersih Indikator : Indeks RB
	Sasaran		Sasaran
1	Meningkatnya Kapasitas tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan Indikator : 1) Indeks Kepuasan Masyarakat 2) Opini WTP BPK Terhadap LKPD 3) Indeks SPBE	1	Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel Indikator : 1) Nilai Sakip 2) Opini WTP BPK Terhadap LKPD
		2	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel Indikator : 1) Indeks SPBE 2) Indeks Profesional ASN
		3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Indeks Pelayanan Publik



4. *Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana*, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran dan Indakator Kinerja Misi 4

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yangberwawasan lingkungan serta Mitigasi Bencana Indikator : % Pencapaian Target SDG's	1	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni Indikator : Indeks Kota Layak Huni (Liveable City)
	Sasaran		Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indikator : Indeks Infrastruktur Daerah	1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indikator Indeks Infrastruktur Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		3	Meningkatnya Kulitas Perumahan danPermukiman Layak Huni Indikator : Persentase Perumahan danPermukiman Layak Huni Penurunan Luasan KawasanPermukiman Kumuh
3	Meningkatnya Mitigasi Bencana Indikator : Indeks Resiko Bencana	4	Meningkatnya Mitigasi Bencana Indikator Indeks Resiko Bencana
4	Terwujudnya rasa tertib dan aman dalam kehidupan Masyarakat Indikator Indeks Ketentraman dan ketertiban	5	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Indikator Indeks Ketentraman dan ketertiban

5. *Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal*, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 2.7
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi 5

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
No.	Tujuan	NO	Tujuan
1	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dan ekonomikreatif untuk meningkatkan daya saing kota Pariaman Indikator : Angka Pertumbuhan Ekonomi	1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat Indikator : 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2. Gini Ratio (Indeks Gini)
	Sasaran		Sasaran
1	Menurunnya Ketimpangan pendapatan antarpenduduk Indikator : Indeks Gini (Gini Ratio)	1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Indikator % Kontribusi Sektor Perdagangan TerhadapPDRB
2	Meningkatnya Nilai Investasi Indikator : Laju Pertumbuhan Investasi	2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Indikator : % Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
3	Meningkatnya peran industri dan perdaganganserta jasa dalam stabilitas perekonomian Indikator : 1. Laju pertumbuhan Sektor Industri (%) 2. Laju pertumbuhan Sektor Perdaganganan Jasa (%)	3	Meningkatnya Investasi Indikator : Laju Pertumbuhan Investasi (%)
	-	4.	Menurunnya Angka Kemiskinan Indikator : Angka Kemiskinan
	-	5.	Menurunnya Angka Pengangguran Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		6	Meningkatnya Kemandirian Desa Indikator : Indeks Desa Membangun (IDM)

d. Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini.



Tabel 2.8
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya	Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	
	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya	Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
				Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
				Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City	Meningkatkan Birokrasi yang baik dan bersih		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Kapatabel
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana.	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni
				Meningkatnya Mitigasi Bencana
	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal	Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan ekonomi masyarakat		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
				Meningkatnya Nilai Investasi
				Menurunnya Angka Kemiskinan
Meningkatnya Kemandirian Desa				

e. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pariaman Sebagai "Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya", memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.



Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2018 sampai dengan 2023. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kota:

Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"							
Misi 1 : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatera							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	1	Penguatan aksesibilitas, atraksi dan amenitas, serta kualitas dari SDM Pariwisata	1	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pendukung Pariwisata
						2	Pengembangan Aksesibilitas Menuju Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata
						3	Peningkatan kualitas event dan atraksi wisata yang berskala nasional dan internasional
						4	Penguatan Pelaku Sadar Wisata
				2	Penataan dan pengembangan Daerah Tujuan Wisata	1	Pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak dan elektronik serta website dan melaksanakan event kepariwisataan
						2	Pengembangan destinasi wisata



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
						3	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
						4	Meningkatkan tata kelola kepariwisataan
						5	Pengembangan Desa Wisata
				3	Meningkatkan daya saing pariwisata.	1	Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan UMKM
						2	Pengembangan konsep pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata
						3	Pengembangan jejaring kepariwisataan (Pariaman Beltline)
						4	Menetapkan satu destinasi unggulan
				4	Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif	1	Meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat
						2	Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
				5	Meningkatkan kerjasama dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	1	Memperkuat kemitraan kemitraan Hexahelix Ekraf (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media dan permodalan) dalam pengembangan ekonomi kreatif
						2	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif



Misi 2 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya									
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
(1)		(2)		(3)		(4)			
2	Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat	2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1	Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan		
						2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran		
						3	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah		
						4	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun		
						5	Adaptasi Pendidikan Pasca Pandemi dan kebijakan merdeka belajar		
						2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	1	Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan
								2	Memberikan biaya siswa kepada masyarakat miskin berupa Kartu Pariaman Pintar
								3	Peningkatan Daya Saing Pendidikan
						2	Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan merata		
		3	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan						
		4	Pembinaan keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter Anak Usia Dini						
		3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Peningkatan kualitas dan ketersediaan, sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata	1	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat		
2	Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak								
3	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar								



TUJUAN (1)		SASARAN (2)		STRATEGI (3)		ARAH KEBIJAKAN (4)	
				2	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik
						2	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia
							Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
							Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat
							Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19
		3	Menurunnya prevalensi stunting	1	Konvergensi penanganan stunting	1	Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di Setiap kecamatan
						2	Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui
						3	kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak
				2	Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah	1	Penyusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahan stunting ditingkat Kota
						2	Pelaksanaan Rembuk stunting pada tahapan perencanaan Program/Kegiatan
						3	Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/ akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
		4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kota Pariaman dan penguatan sektor strategis Kota Pariaman	1	Peningkatan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
						2	Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru
				2	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	1	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat
						2	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM
						3	Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City							
1	Meningkatnya Birokrasi Yang Baik dan Bersih	1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	1	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih dan akuntabel	1	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan perluasan pemahaman Reformasi Birokrasi kepada Aparatur
						2	Penguatan Pengawasan
						3	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara konsisten dan berkelanjutan
						4	Deregulasi Kebijakan
						5	Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran
		2	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang kapabel		Meningkatkan kapabilitas baik secara kelembagaan maupun secara Individu ASN	1	Penguatan impelemenasi manajemen berbasis merit sistem
						2	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
						3	Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
						4	Penyederhanaan Organisasi



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
		3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang	2	Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas
						2	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
				2	Meningkatkan sistem pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima
						2	Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi Publik
Misi 4 : Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana							
1	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata dan ramah lingkungan	1	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah
		2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	1	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	1	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
						2	Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan
						3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
				2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
						2	Peningkatan penanganan sampah
						3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan "Bank Sampah"
		3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1	Penyediaan, penataan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman secara berkelanjutan	1	Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
						2	Peningkatan kualitas jalan dan drainase lingkungan
						3	Melakukan Penanganan kawasan kumuh perkotaan secara terpadu



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
		3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang	2	Meningkatkan pengembangan inovasi di semua OPD dalam memberikan layanan publik yang berkualitas
						2	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
				2	Meningkatkan sistem pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang handal dan prima
						2	Meningkatkan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi Publik
Misi 4 : Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana							
1	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata dan ramah lingkungan	1	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah
		2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	1	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	1	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
						2	Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan
						3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
				2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
						2	Peningkatan penanganan sampah
						3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan "Bank Sampah"
		3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1	Penyediaan, penataan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman secara berkelanjutan	1	Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
						2	Peningkatan kualitas jalan dan drainase lingkungan
						3	Melakukan Penanganan kawasan kumuh perkotaan secara terpadu



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
				2	Meningkatkan kualitas lingkungan Lingkungan Hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta berbasis masyarakat.	1	Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan
						2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
		4	Meningkatnya MitigasiBencana	1	Meningkatkan system ketahanan daerah	1	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana
						2	Meningkatkan kesiapsiagaan daerahdalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana
						3	Perlibatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
						4	Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan
				2	Meningkatkan pengelolaan kebencanaan	1	Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
						2	Penyiapan infrastruktur kota berbasis mitigasi bencana
						3	Meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangunan melalui penyediaan desain standar bangunan
						4	Penyediaan data dan informasi kebencanaan yang komprehensif
						5	Menyediakan jalur evakuasi sebagai akses evakuasi ketika terjadi bencanagempa yang berpotensi tsunami
		5	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	1	Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban	1	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
						2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda
				2	Meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat	1	Meningkatkan penegakan perda tentang ketertiban umum
						2	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat



Misi 5 : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat	1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	1	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan	1	Mendorong peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;
						2	Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local;
						3	Mendorong peningkatan skala usaha Usaha Mikro melalui penguatan modal.
						4	Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif
		2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	1	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian	1	Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;
						2	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan
		3	Meningkatnya Investasi	1	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif	1	Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi
						2	Memberikan kemudahan bagi calon investor yang akan berinvestasi
				2	Peningkatan layanan investasi dan penanaman modal	1	Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi
						2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3	Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha						
4	Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi						



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)		(4)	
		4	Menurunnya Angka Kemiskinan	1	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	1	Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
						2	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi
						3	Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS
						4	Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Pariaman sosial
		5	Menurunnya Angka Pengangguran	1	Perluasan kesempatan kerja dan Peluang Usaha	1	Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja
						2	Meningkatkan Cakupan Serapan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Lain secara merata
						3	Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
						4	Peningkatan jaringan tenaga kerja
						5	Menumbuhkembangkan wirausaha baru
		6	Meningkatnya Kemandirian Desa	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan
						2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
						3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis Desa/Kelurahan
				2	Penguatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Ketahanan Ekologi Desa	1	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Difokuskan Kepada Pembentukan Dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Dan/Atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan
						2	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi Desa



Adapun Program Unggulan dari Pemerintah Daerah adalah:

1.	Lanjutkan Program Kesehatan Gratis
2.	Lanjutkan Program Pendidikan Gratis
3.	Kartu Pariaman Pintar
4.	Lanjutkan Bis Sekolah Gratis
5.	Magrib Mengaji dan Subuh Mubarakah
6	Program <i>satu keluarga satu sarjana</i>
7	Lanjutkan Pembangunan Mesjid Terapung Pariaman
8	Lanjutkan Pembangunan GOR
9	Pembangunan Youth Centre
10	Pembangunan Pusat Pendidikan Alquran (Read Alquran Centre)
11	Pengembangan Pendidikan agama non formal MDA (tingkat SD), MDW (TingkatSLTP), MDU (Tingkat SLTA)
12	Program Pariaman Sejahtera
13	Pengembangan kawasan Wisata Terpadu dengan UMKM
14	Pengembangan jalan sisi timur pariaman.
15	Kesejahteraan Guru honor PAUD, TK, SD, SMP
16	Pengembangan <i>water front city</i>
17	Kesempatan Kerja Keluarga Miskin
18	Revitalisasi PKK
19	Revitalisasi Pasar Yang Ada Di Kota Pariaman

Berdasarkan tujuan di atas, sasaran –sasaran strategis yang akan dicapai Pemerintah Kota Pariaman selama periode RPJMD disertai indikator kinerja, dimana indikator kinerja ini sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2018-2023. Berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

MISI I :

Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya terbaik Sumatra

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatkan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	% Pertumbuhan Spending Of Money



Misi 2 :

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

TUJUAN (1)		SASARAN (2)	INDIKATOR (3)	
1	Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Angka Harapan Lama Sekolah
			2	Angka Rata-rata Lama Sekolah
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)
		Menurunnya Prevalensi Stunting	2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1	Pendapatan Per Kapita (PDRB)

Misi 3 :

Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City

TUJUAN (1)		SASARAN (2)	INDIKATOR (3)	
1	Meningkatkan Birokrasi yang baik dan bersih	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	1	Nilai SAKIP
			2	Opini BPK terhadap LKPD
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Kapatabel	1	Indeks SPBE
			2	Indeks Profesional ASN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Pelayanan Publik		

Misi 4:

Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

TUJUAN (1)		SASARAN (2)	INDIKATOR (3)	
1	Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	Meningkatnya kualitas Insfrastruktur		Indeks Insfrastruktur Daerah
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan
		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	1	Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh
			2	Persentase Perumahan Permukiman Layak Huni
		Meningkatnya Mitigasi Bencana		Indeks Resiko Bencana
Meningkatnya Ketentraman , Ketertiban dan Keamanan Masyarakat		Indeks Keamanan dan Ketertiban		



**Misi 5:
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif
Yang Berbasis Lokal**

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	
(1)		(2)	(3)	
Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	1	% Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	1	% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
		Meningkatnya Investasi	1	% Pertumbuhan Investasi
		Menurunnya Angka Kemiskinan	1	Angka Kemiskinan (%)
		Menurunnya Angka Pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya Kemandirian Desa	1	Indeks Desa Membangun

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SOPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan spending of money	Dinas Pariwisata
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
4.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	
5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan / PDRB Per Kapita	Dinas Perindagkop Usaha Menengah, Dinas Pertanian , Pangan dan Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai AKIP	Bappeda Inspektorat Setda
		Opini BPK terhadap LKPD	BPKPD Inspektorat
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang Kapabel	Indeks SPBE	Dinas Kominfo
		Indeks Profesional ASN	BKPSDM
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Setda (Bagian Organisasi)
9.	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan



10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	Dinas Perkim, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
11.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh	
		Persentase Perumahan Permukiman Layak Huni	
12.	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Indeks Resiko Bencana	BPBD
13.	Meningkatnya Ketentraman , Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Dinas Pol.PP
14.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Dinas Perindagkop Usaha Menengah
15.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Dinas Pertanian , Pangan dan Perikanan
16.	Meningkatnya Investasi	% Pertumbuhan Investasi	DPMPPTSP
17.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	BAPPEDA, Dinas Sosial
18.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	DPMPPTSP
19	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	DPMDDES

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan amanat dari Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dana yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;



2. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
4. sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Kota Pariaman dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Republik Indonesia, masih banyaknya kelemahan dari RPJMD dan Renstra OPD, diantaranya:

- masih adanya Indikator yang belum dapat diukur, sehingga kesulitan dalam melakukan pengukuran capaian kerjanya;
- adanya program dan kegiatan yang belum sinkron dalam pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan.

untuk itu Pemerintah Kota Pariaman telah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap RPJMD dan Renstra OPD.

Disamping itu dengan masih adanya Wabah Covid-19, maka untuk penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Pariaman melakukan Refocusing dan realokasi anggaran dengan melakukan pembatalan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak relevan, yang berpengaruh terhadap capaian dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021, sebagai berikut :



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		KETERANGAN
			SEBELUM	SETELAH	
			PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI I : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib, dan Berbudaya Terbaik di Sumatera					
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Spending of Money	4,1%	3,9%	Target berubah
MISI II : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya					
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	14,58 tahun	14,70 Tahun	Target berubah
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,34 tahun	11 Tahun	Target berubah
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	71,18 tahun	71,18 tahun	Tetap
3	Menurunnya Prevelensi Stunting	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	8,9	12,5	Target berubah
4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	14 juta	14 juta	Tetap
MISI II : Mewujudkan Pemerintahan yang Prima untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City					
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	80,01 (A)	70,01 (BB)	Target berubah
		Opini BPK	WTP	WTP	Tetap
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Kapabel	Indeks SPBE	2,7	2,7	Tetap
		Indeks Profesional ASN	60	85,5	Target berubah
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	88,36	88,36	Tetap
MISI IV : Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana					
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	70	70	Tetap
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	64,06	64,06	Tetap
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh	7,69	11,5	Target berubah
		Persentase Perumahan Permukiman Layak Huni	83,33	83,33	Tetap
4	Meningkatnya Mitigasi Bencana	Indeks Resiko Bencana	171 (Tinggi)	171 (Tinggi)	Tetap
5	Meningkatnya Ketentraman, Ketertibandan Keamanan Masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	70,4	70,4	Tetap



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		KETERANGAN
			SEBELUM	SETELAH	
			PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
MISI V : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Lokal					
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Perda-gangan Terhadap PDRB	15,59	15,59	Tetap
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	18,67%	18,01%	Target berubah
3	Meningkatnya Investasi	% Pertumbuhan Investasi	2,00%	2,20%	Target berubah
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	3,6%	4%	Target berubah
5	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,80%	5,01%	Target berubah
6	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7920	0,7800	Target berubah



NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Kebudayaan	1.258.186.000	1.222.986.000	(35.200.000)
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	92.850.000	0	(92.850.000)
3	Program Pengelolaan Permuseuman	24.680.000	0	(24.680.000)
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	71.600.000	63.125.000	(8.475.000)
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	1.858.045.000	2.543.045.000	685.000.000
6	Program Pemasaran Pariwisata	837.520.000	781.549.717	(55.970.283)
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	424.990.000	603.410.000	178.420.000
8	Program Pengelolaan Pendidikan	31.915.819.409	34.307.754.185	2.391.934.776
9	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	47.350.000	9.936.250	(37.413.750)
10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	580.491.400	1.702.531.400	1.122.040.000
11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.987.643.000	3.505.722.875	(481.920.125)
12	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000	300.000.000	-
13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	36.016.259.806	37.814.451.064	1.798.191.258
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	291.783.600	887.059.379	595.275.779
15	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	461.536.000	359.186.000	(102.350.000)
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	270.817.296	847.917.900	577.100.604
17	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	293.000.000	293.000.000	-
18	Program Perlindungan Perempuan	376.635.000	351.455.000	(25.180.000)
19	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	85.000.000	92.000.000	7.000.000
20	Program Pemenuhan Hak Anak	80.000.000	80.000.000	-
21	Program Perlindungan Khusus Anak	307.200.000	332.380.000	25.180.000
22	Program Pengendalian Penduduk	88.200.000	142.800.000	54.600.000
23	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.441.520.600	1.386.920.600	(54.600.000)
24	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2.128.205.840	2.125.259.840	(2.946.000)
25	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	94.446.000	89.311.000	(5.135.000)



NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Program Penanganan Kerawanan	48.800.000	48.800.000	-
27	Program Pengawasan Keamanan Pangan	6.996.800	6.996.800	-
28	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	795.000.000	345.000.000	(450.000.000)
29	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	542.185.500	540.185.500	(2.000.000)
30	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	210.800.000	210.800.000	-
31	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	753.748.000	475.148.000	(278.600.000)
32	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.053.375.000	1.932.153.000	(1.121.222.000)
33	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	391.762.216	415.547.216	23.785.000
34	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	106.000.000	100.240.000	(5.760.000)
35	Program Penyuluhan Pertanian	458.802.000	426.302.000	(32.500.000)
36	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	302.580.000	302.580.000	-
37	Program Penempatan Tenaga Kerja	113.680.000	113.680.000	-
38	Program Hubungan Industrial	30.000.000	530.000.000	500.000.000
39	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	15.000.000	15.000.000	-
40	Program Promosi Penanaman Modal	8.000.000	8.000.000	-
41	Program Pelayanan Penanaman Modal	69.685.000	69.685.000	-
42	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	406.900.000	406.900.000	-
43	Program Pemberdayaan Sosial	474.607.000	484.107.000	9.500.000
44	Program Rehabilitasi Sosial	104.785.000	181.314.950	76.529.950
45	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	583.432.000	388.242.000	(195.190.000)
46	Program Penanganan Bencana	210.626.700	173.556.700	(37.070.000)
47	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.695.000	46.495.000	10.800.000
48	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	60.590.000	60.590.000	-
49	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	462.370.000	292.598.750	(169.771.250)



NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perkoperasian	54.590.000	54.590.000	-
51	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	52.600.000	222.371.250	169.771.250
52	Program Pengembangan UMKM	427.812.520	375.812.520	(52.000.000)
53	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.900.220.987	3.100.220.987	200.000.000
54	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	50.000.000	50.000.000	-
55	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	313.416.000	243.416.000	(70.000.000)
56	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	190.988.150	181.741.590	(9.246.560)
57	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	611.603.800	691.603.800	80.000.000
58	Program Penataan Desa	9.996.500	3.411.900	(6.584.600)
59	Program Administrasi Pemerintah Desa	524.305.344	471.301.823	(53.003.521)
60	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.866.661.500	3.026.686.100	160.024.600
61	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	341.938.898.962	349.143.335.787	7.204.436.825
62	Program Pembinaan Perpustakaan	11.124.124.000	11.124.124.000	-
63	Program Pengelolaan Arsip	100.000.000	100.000.000	-
64	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	10.000.000	10.000.000	-
65	Program Perekonomian dan Pembangunan	473.513.000	473.513.000	-
66	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.817.868.100	4.937.368.100	119.500.000
67	Program Penyelenggaraan Pengawasan	798.351.552	753.161.500	(45.190.052)
68	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.057.229.701	820.924.000	(236.305.701)
69	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.988.748.000	1.988.739.500	(8.500)
70	Program Aplikasi Informatika	4.671.603.820	3.000.103.820	(1.671.500.000)
71	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	50.056.000	50.056.000	-
72	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100.157.300	90.158.000	(9.999.300)
73	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	85.334.068.273	93.049.572.223	7.715.503.950
74	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	950.974.183	992.377.808	41.403.625
75	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.909.988.078	1.909.738.078	(250.000)
76	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.329.419.997	1.299.419.997	(30.000.000)
77	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.492.825.359	965.499.132	(527.326.227)
78	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	506.422.250	555.922.250	49.500.000



79	Program Kepegaw aian Daerah	3.302.984.000	2.705.978.657	(597.005.343)
80	Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	9.446.013.517	12.843.672.517	3.397.659.000
81	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	416.770.412	501.266.000	84.495.588
82	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	1.479.623.550	1.801.450.676	321.827.126
83	Program Koordinasi Ketentramanan dan Ketertiban Umum	962.181.056	1.038.281.706	76.100.650
84	Program Penyelenggaraan Urusan	4.000.000	4.000.000	-
85	Program Pembinaan dan Pengaw asan Pemerintahan Desa	716.800.000	115.150.000	(601.650.000)
86	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1.279.400.000	1.307.193.880	27.793.880
87	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	5.219.625.000	5.147.125.850	(72.499.150)
88	Program Penataan Bangunan Gedung	35.215.710.600	4.431.744.600	(30.783.966.000)
89	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	100.000.000	200.000.000	100.000.000
90	Program Penyelenggaraan Jalan	20.164.502.999	24.081.361.631	3.916.858.632
91	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	80.000.000	80.000.000	-
92	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	480.550.000	375.500.000	(105.050.000)
93	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	71.360.760	52.560.760	(18.800.000)
94	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	14.999.945	0	(14.999.945)
95	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	355.589.500	394.389.500	38.800.000
96	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.788.842.167	4.535.328.717	746.486.550
97	Program Pengelolaan Pelayaran	2.564.646.600	2.447.956.500	(116.690.100)
98	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.082.691.000	8.984.991.000	(97.700.000)
99	Program Pengembangan Perumahan	150.000.000	75.425.000	(74.575.000)
100	Program Kaw asan Pemukiman	410.425.000	476.000.000	65.575.000
101	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.601.167.600	1.400.167.600	(1.201.000.000)
102	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	1.459.321.276	1.579.841.276	120.520.000
103	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.614.036.450	1.614.036.450	-
104	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	18.496.667	59.198.600	40.701.933



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman

105	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	52.000.000	46.140.000	(5.860.000)
106	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	102.742.300	102.742.300	-
107	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000	25.860.000	5.860.000
108	Program Pengelolaan Persampahan	4.717.209.240	4.717.209.240	-
109	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0	97.700.000	97.700.000,00
110	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	141.006.500	141.006.500	-
111	Program Penanggulangan Bencana	2.108.341.400	2.129.675.000	21.333.600
112	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.554.026.260	3.464.016.260	(90.010.000)
113	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.110.195.056	2.135.710.400	25.515.344
114	Program Pendaftaran Penduduk	444.819.569	357.423.236	(87.396.333)
115	Program Pencatatan Sipil	24.672.750	22.672.750	(2.000.000)
116	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	107.932.000	69.212.000	(38.720.000)
117	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	16.080.000	6.450.000	(9.630.000)
118	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	40.000.000	37.150.000	(2.850.000)
119	Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.411.230.000	9.122.989.750	6.711.759.750
120	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	55.500.000	46.894.500	(8.605.500)
121	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	143.740.000	306.140.000	162.400.000
Jumlah		676.284.875.717	675.313.117.010	(971.758.707)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Pariaman selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pariaman, melaksanakan kewajiban mempertanggung jawabkan kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

3.2. Metode Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran capaian kinerja sasaran, dilakukan dengan menggunakan metode membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi ditambah dengan perbandingan kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi



Pemerintah Kota Pariaman serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Form. PK)

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, atau semakin rendah realisasi semakin tinggi capaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada table dibawah ini :



No	Klasifikasi Penilaian	Prediket
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

A. Capaian kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib, dan Berbudaya					
Sasaran 1					
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase Pertumbuhan spending of money	3,9%		0,20%		5%
Misi II: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya					
Sasaran 1					
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Angka Harapan Lama Sekolah	14,70	tahun	14,79	tahun	101%
Angka Rata-rata Lama Sekolah	11	tahun	10,79	tahun	98%
Sasaran 2					
Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Angka Usia Harapan Hidup	71,18	tahun	74,2	tahun	104,2%
Sasaran 3					
Menurunnya Prevalensi Stunting					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Prevalensi Stunting	12,5		10,50		116%
Sasaran 4					
Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	14,00	juta	13,355	juta	95%



Misi III : Mewujudkan Pemerintahan yang Prima untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City				
Sasaran 1				
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,01	61,49	87,8%	
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	
Sasaran 2				
Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel				
Indeks SPBE	2,7	2,65	98,1%	
Indeks Profesional ASN	85,5	85,96	100,5%	
Sasaran 3				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	88,36	83	93,9%	
Misi IV: Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana				
Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Insfrastruktur Daerah	70	59,01	84,3%	
Sasaran 2				
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh	11,5	48,47	421,5%	
Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	83,3	81,43	97,8%	
Sasaran 3				
Meningkatnya Kualitas Lingkungan				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,06	56,80	88,67%	
Sasaran 4				
Meningkatnya Mitigasi Bencana				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Resiko Bencana	171	(Tinggi)	158,28 Tinggi	93%
Sasaran 5				
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat				
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	70,4	93	132%	



Misi V : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang berbasis Lokal			
Sasaran 1			
Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan Terhadap PDRB			
% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,59%	15,47%	99,2%
Sasaran 2			
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB			
% Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	18,01%	17,67%	98,1%
Sasaran 3			
Meningkatnya Investasi			
% Pertumbuhan Investasi	2,20	(0,11)	-5%
Sasaran 4			
Menurunnya Angka Kemiskinan			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Angka Kemiskinan	4,00	4,20	95,0%
Sasaran 5			
Menurunnya Angka Pengangguran			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,01	5,68	86,6%
Sasaran 6			
Meningkatnya Kemandirian Desa			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Desa Membangun	0,7800	0,7953	101,96%



B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

MISI I. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib, dan Berbudaya terbaik di Sumatera

Sasaran 1 Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun				
				2023	2022	2021	2020	2019
1	Persentase Pertumbuhan spending of money	3,9%	0,20%	5%	32%	39%	-611%	749%
Rata-rata capaian				5%	32%	39%	-611%	-

Sasaran 1 dengan indikator *Persentase Pertumbuhan Spending of Money* target Tahun 2023 sebesar 3,9% dengan terealisasi .0,20% capaian 5%, dimana pertumbuhan *Spending of Money* sangat kecil sekali.

Formula untuk menghitung Persentase pertumbuhan Spending of Money adalah:

% pertumbuhan Spending Of Money	=	$\frac{\text{Jml pengeluaran tahun berjalan} - \text{Jml pengeluaran tahun sebelumnya}}{\text{Jml pengeluaran tahun sebelumnya}}$	x	100%
---------------------------------	---	---	---	------

%pertumbuhan Spending Of Money	=	$\frac{296.300 - 295.824}{295.824}$	x	100%
	=	$\frac{476}{295.824}$		
	=	0,002		

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan yang mempunyai banyak potensi obyek dan daya tarik wisata yang sangat indah, baik itu wisata alam, wisata buatan, wisata sejarah maupun wisata budaya. Oleh karena itu jika potensi wisata tersebut ditata dan dikembangkan dengan baik, maka dapat menjadi salah satu sumber pendapatan, baik itu pendapatan negara maupun pendapatan daerah. Perkembangan pariwisata berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar karena akan memberikan lapangan pekerjaan dan bidang usaha lain yang cukup luas. Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Propinsi yang mempunyai



banyak objek wisata, baik objek wisata alam berupa gunung, danau, ngarai dan laut, wisata sejarah, seperti Lobang Jepang maupun wisata budaya. Salah satu Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang mempunyai objek wisata adalah Kota Pariaman.

Kota Pariaman yang terletak di daerah pesisir pantai barat Pulau Sumatera, mempunyai pantai yang indah, landai dengan pasir yang putih. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pariaman menata objek wisata Pantai Pariaman menjadi lebih indah lagi, dan banyak diminati oleh wisatawan.

Sementara itu, untuk mempermudah pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dilakukan peningkatan aksesibilitas berupa prasarana transportasi, sarana transportasi, dan sistem transportasi. Pada pengembangan destinasi pariwisata, fokus ditujukan pada pembangunan prasarana umum, penyediaan fasilitas umum, dan pembangunan fasilitas pariwisata. Bukan hanya fasilitas dan aksesibilitas, pengembangan masyarakat juga dianggap penting dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata. Pengembangan masyarakat tersebut meliputi, peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, dan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat. Semua strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata agar dapat tercipta destinasi yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan pendapatan daerah, dan masyarakat

Aksesibilitas berupa prasarana transportasi, sarana transportasi, dan sistem transportasi objek wisata Pantai Pariaman ditunjang dengan transportasi massal yang murah meriah, yaitu kereta api dimana stasiunnya sangat dekat dengan Pantai Pariaman. Operasional Kereta Api dari Padang ke Pariaman sebanyak 3 kali dalam satu hari yang sangat menunjang peningkatan kunjungan wisata ke Kota Pariaman karena harga tiket Kereta Api hanya Rp. 5.000,-/ perjalanan.

Untuk mempromosikan pariwisata, Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan kegiatan atau event yang dapat mendongkrak kunjungan wisata ke Kota Pariaman. Dengan adanya kegiatan pariwisata maka potensial menimbulkan kegiatan lain seperti penyediaan hotel, makanan



dan minuman, cenderamata, transportasi lokal dan usaha-usaha kecil lainnya. Disinilah pentingnya mengkaji tentang upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman.

Pemerintah Kota Pariaman juga mengembangkan kawasan pariwisata terpadu dengan konsep green tourism. Kawasan Pariwisata Terpadu ini mengintegrasikan berbagai spot menarik disepanjang bibir pantai, disamping itu juga dikembangkan wisata bawah laut yaitu snorkeling dan diving.

Untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman, maka Pemerintah Kota Pariaman terus berbenah menggali potensi wisata dengan menata objek wisata yang sudah ada, dan membangun objek wisata baru, serta meningkatkan pelayanan dibidang pariwisata. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatnya kunjungan jumlah kunjungan wisatawan adalah dengan:

- 1) melakukan promosi wisata baik dalam negeri maupun luar negeri;
- 2) mengadakan event yang disusun dalam Calender of Event Kota Pariaman yang dilaksanakan setiap tahun:
 - Peseno Festival Pantai yang ada dilaksanakan dihari libur lebaran Idul Fitri selama 15 hari diseluruh destinasi wisata Kota Pariaman. Event ini diisi dengan berbagai macam penampilan kesenian dari sekolah-sekolah dan pelaku kesenian di Kota Pariaman.
 - Pemilihan duta wisata Kota Pariaman Cik Uniang Cik Ajo, untuk mengenalkan dan melestarikan budaya adat Minangkabau kepada anak-anak muda dan untuk mengasah keterampilan dan kemampuan anak – anak muda terhadap budaya adat Minangkabau;
 - Kejurnas Sepatu Roda merupakan kejuaraan nasional sepatu roda terbuka Piala Walikota Pariaman. Kejurnas Sepatu Roda ini, juga mengusung konsep Sport Tourism, artinya disamping olahraga ini sebagai ajang turnamen, juga mampu menjadi daya tarik wisata Kota Pariaman, sehingga mampu berkontribusi baik pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat;



Disamping itu dalam rangka persiapan Pekan Olah Raga Nasional XXI Aceh-Sumatera Utara 2024, babak Kualifikasi Sepatu Roda Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumut 2024 diselenggarakan di Sirkuit Sepatu Roda Pantai Cermin Kota Pariaman. Kegiatan ini diikuti para peserta dari Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kota Pariaman dipilih sebagai tuan rumah karena telah memiliki sirkuit sepatu roda yang memenuhi standar nasional dan telah banyak kegiatan yang dilaksanakan baik tingkat provinsi bahkan nasional

- Offroad dan Campervan;
- Buru Babi
- Lomba Lagu Minang/Lomba Lagu Elly Kasim
- Pesona Hoyak Tabuik Piaman merupakan kegiatan tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman yang digelar setiap tanggal 1 s/d 10 Muharram Tahun Hijriah sebagai upaya pelestarian budaya ;
- Pariaman Avanza Xenia Solution merupakan komunitas mobil avanza dan xenia menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Anniversary 3 Tahun AXS Pariaman yang dilaksanakan di Pantai Apar, Pariaman Utara Kota Pariaman yang pesertanya juga berasal dari luar .
- Sumbar Spearo Chapter II adalah kegiatan yang digagas oleh sebuah komunitas olahraga Air Freedive dan Spearfising di Sumbar (Sumatera Barat). Kegiatan ini diselenggarakan di Pulau Angso Duo selama 3 hari berturut, yang bertujuan untuk mempromosikan wisata laut Sumatera Barat dan sekaligus menjadi salah satu kegiatan edukasi tentang pemeliharaan laut dan biodata laut.

Dengan dilaksanakannya berbagai even di Kota Pariaman, memberi dampak baik terhadap jumlah kunjungan wisatawan maupun ekonomi masyarakat, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.1
JUMLAH WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE KOTA PARIAMAN
DARI TAHUN 2018 -2023

No	WISTAWAN	TAHUN						LAJU PERT./TAHUN
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Domestik	3.320.825	3.924.570	112.278	255.251	2.136.782	2.237.674	19.979
2	Mancanegara	1.735	258	90	-	-	-	347,17
	Total	3.322.560	3.924.828	112.368	255.251	2.136.782	2.237.674	19.982

Sumber : Hasil Olahan (2023)

Berdasarkan tabel 3.1 di atas terlihat perbandingan angka jumlah kunjungan wisatawan mulai tahun 2018 berjumlah 3.322.560 di tahun 2019 naik menjadi 3.924.828 naik 603.745 (18%), sedangkan tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan hanya berjumlah 112.368 (minus 3.812.292) (- 97%), Tahun 2021 naik menjadi 255.251 (127%), dan Tahun 2022 naik dengan sangat signifikan yaitu 2.136.782 (737%), sedangkan Tahun 2023 tingkat kunjungan naik menjadi 2237674 (5%)

Naiknya Tingkat Kunjungan disebabkan beberapa hal:

1. adanya pengembangan destinasi wisata baru;
2. moda transportasi, seperti Kereta Api yang stasiunnya dekat ke objek wisata;
3. adanya Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir secara Elektronik, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan bagi pengunjung di kawasan wisata dengan menggunakan aplikasi e-retribusi dan tempat khusus parkir. Implementasi Peraturan Walikota ini dilakukan dengan mengacu serta memberlakukan beberapa hal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Untuk meningkatkan rata-rata pengeluaran/belanja wisatawan, Pemerintah Kota Pariaman melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Pariaman.

Beberapa strategi yang dilakukan, antara lain :

- 1) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata



- 2) Optimalisasi Pemasaran Pariwisata;
- 3) Calendar of Events

Hambatan tidak tercapainya target dari sasaran ini, diantaranya:

- 1) masih kurangnya sarana pendukung pariwisata, seperti hotel;
- 2) masih kurangnya promosi wisata.

Adapun perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Terwujudnya Daya Saing Wisata dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Terwujudnya Daya Saing Wisata dengan
target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pertumbuhan spending of money	%	5,5	3,5	4,5	3,5	3,7	3,9	26,2	(21,38)	1.17	1.93	0,002

Sumber : Hasil Olahan (2023)

Berdasarkan tabel 3.2 di atas terlihat bahwa jika dibandingkan realisasi capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 sebesar 5,5%, artinya masih terdapat *gap* sebesar 5,5 % target indikator persentase pertumbuhan Spending of Money pada akhir periode RPJMD Tidak tercapai

Alokasi Anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian Sasaran ini berjumlah Rp. 9.689.169.088,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.160.979.663,- (84,23%) dengan beberapa program antara lain :

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
- 2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 3) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 4) Program Pemasaran Pariwisata
- 5) Program Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Misi II: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya

**Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat**

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun					
						2023	2022	2021	2020	2019	2018
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,70	tahun	14,79	tahun	101%	100,3%	100%	99,6%	99,9%	-
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,00	tahun	10,79	tahun	98%	98,8%	98,4%	97,2%	98,0%	99,0%
<i>Rata-rata capaian</i>						99,35%	99,55%	99,22%	98,38%	99,0%	-

Realisasi capaian dari Sasaran 1 Misi II Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah, dengan rata-rata capaian 99,35 %.

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pariaman dari tahun ke tahun mengalami sedikit kenaikan. Tahun 2023 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman berada pada Angka 14,79 tahun, sedangkan Angka rata-rata Lama Sekolah 10,79 tahun.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman berada pada urutan ke 4, berada di bawah Kota Bukittinggi dengan angka 15,01 Kota Padang Panjang 15,29 dan yang tertinggi Kota Padang dengan angka 16,56 dan berada di atas capaian rata-rata nasional hanya 13,15 dan capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 14,11 tahun.

Sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman berada pada angka 10,79 urutan ke 6 setelah Kota Payakumbuh dengan angka 10,88 , Kota Solok 11,36, Kota Padang 11,62, Kota Bukittinggi 11,64 yang tertinggi adalah Kota Padang Panjang 11,94 berada di atas capaian rata-rata nasional hanya 8,77 dan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 9,28 tahun.

Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten Kota di Sumatera Barat 2019-2023

NO	PROV/KAB/KOTA	HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)					RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)				
		2023	2022	2021	2020	2019	2023	2022	2021	2020	2019
1	Kota Padang	16,56	16,54	16,53	16,52	16,51	11,62	11,60	11,59	11,58	11,34
2	Kota Padang Panjang	15,29	15,07	15,07	15,06	15,05	11,94	11,92	11,63	11,62	11,45
3	Bukittinggi	15,01	14,98	14,98	14,97	14,96	11,64	11,63	11,34	11,33	11,32
4	Kota Pariaman	14,79	14,61	14,55	14,54	15,53	10,79	10,78	10,67	10,59	10,37
5	Kab. Tanah Datar	14,78	14,59	14,34	14,33	14,32	9,02	8,90	8,62	8,61	8,45
6	Kota Solok	14,36	14,34	14,33	14,32	14,31	11,36	11,35	11,04	11,03	11,02
7	Kota Payakumbuh	14,3	14,29	14,27	14,26	14,25	10,88	10,82	10,81	10,73	10,72
8	Kabupaten Agam	13,89	13,88	13,88	13,87	13,86	9,22	8,98	8,97	8,96	8,85
9	Kab. Padang Pariaman	14,19	13,93	13,68	13,67	13,62	8,41	8,16	7,88	7,87	7,86
10	Kab. Pasaman Barat	13,7	13,69	13,68	13,61	13,40	8,13	8,55	8,27	8,19	8,06
11	Kab. Pesisir Selatan	13,36	13,65	13,33	13,32	13,31	8,58	8,43	8,27	8,26	8,25
12	Kab. Lima Puluh Kota	13,41	13,40	13,30	13,29	13,28	8,12	8,08	8,07	7,99	7,98
13	Kota Sawahlunto	13,69	13,42	13,18	13,17	13,16	10,44	10,43	10,32	10,17	9,97
14	Kab. Solok	13,55	13,30	13,05	13,04	13,03	7,9	7,89	7,87	7,86	7,85
15	Kab. Kep. Mentawai	12,9	12,89	12,89	12,82	12,76	7,76	7,48	7,20	7,09	7,08
16	Kab. Pasaman	13,25	13,05	12,81	12,80	12,79	8,13	8,11	8,10	8,09	7,86
17	Kab. Solok Selatan	12,8	12,73	12,72	12,71	12,70	8,69	8,41	8,32	8,82	8,16
18	Kab. Dharmasraya	12,68	12,51	12,44	12,43	12,42	8,71	8,56	8,55	8,47	8,46
19	Kab. Sijunjung	12,72	12,64	12,38	12,37	12,36	8,57	8,30	8,12	8,11	8,10
20	Prov. SUMBAR	14,11	14,10	14,09	14,02	14,01	9,28	9,18	9,07	8,99	8,92
21	Nasional	13,15	13,10	13,08	12,98	12,95	8,77	8,69	8,54	8,48	8,34

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023 diolah

Angka Harapan Lama Sekolah, adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa depan. Angka Harapan Lama Sekolah, diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 (tujuh) tahun ke atas yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator makro yang perhitungannya dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dimana Angka



Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman untuk Tahun 2023 adalah **14,79** tahun, yang artinya adalah bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) dimasa mendatang adalah selama 14,79 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai tamat/lulus Diploma 3, angka ini menunjukkan capaian 100,1%. Dari target pada RPJMD 2018-2023, sebesar 14,70 tahun.

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Pariaman pada tahun 2023 berada pada angka **10,79 Tahun**, artinya rata-rata lama seorang anak menghabiskan waktu untuk sekolah adalah selama **10,79** tahun atau pada jenjang kelas 1 SMA/SMK. Angka ini menunjukkan capaian sebesar 98 % dari target pada RPJMD 2018-2023 yaitu sebesar **11** tahun.

Untuk Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Pariaman dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah mengalami kenaikan, karena adanya:

- 1) Program Wajib Belajar 12 tahun
 - 2) Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) di Kota Pariaman.
 - 3) Program Beasiswa Bidik Misi dari Pemerintah Pusat.
- Program Wajib Belajar 12 tahun, Pemerintah Kota Pariaman memiliki kebijakan “Pendidikan Gratis”, dengan memberikan subsidi biaya Pendidikan selama 12 tahun mulai dari SD sampai SMA/SMK Negeri. Berhubung SMA/SMK bukan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, maka untuk memberikan jaminan anak-anak peserta didik pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kota Pariaman mendapatkan dampak dari kebijakan ini. Pemerintah Kota Pariaman memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Provinsi Sumatera Barat yang diatur dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai alokasi pendanaan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat bagi siswa/siswi SMA/SMK Negeri yang berada

di Kota Pariaman, sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran tanpa mengeluarkan biaya.

- Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA), yang ditargetkan pertahunnya sebanyak 100 orang, dan ditahun 2022 baru mencapai 67 orang. SAGA SAJA merupakan program yang bersifat pemberian bantuan beasiswa untuk kuliah gratis kepada anak kurang mampu hingga tamat pada jenjang Perguruan Tinggi yang ditunjuk/sudah bekerja sama. Dengan adanya SAGA SAJA, maka peluang anak yang telah tamat SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memenuhi kriteria dan persyaratan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi relatif besar.

SAGA SAJA, dananya berasal dari berbagai sumber, diantaranya APBD, Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman dan sumber lain yang tidak mengikat, seperti CSR. Data mahasiswa SAGA SAJA, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
DATA PERGURUAN TINGGI DAN MAHASISWA SAGA SAJA
TAHUN 2018-2023

NO	PERGURUAN TINGGI	JUMLAH MAHASISWA						JUMLAH
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	POLITEKNIK NEGERI PADANG	10	26	8	2	4	13	63
2	POLITEKNIK AKADEMI TEKNOLOGI INDUSTRI PADANG	-	3	49	67	28	-	147
3	POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	-	6	-	1	-	3	10
4	POLITEKNIK KELAUTAN dan PERIKANAN PARIAMAN	-	-	9	7	1	4	21
5	UNIVERSITAS INDONESIA	-	-	-	-	10	9	19
6	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	-	-	-	-	2	2	4
7	TELKOM UNIVERSITY BANDUNG	-	-	-	-	8	12	20
8	UNIVERSITAS ANDALAS	-	-	-	-	14	20	34
9	UNIVERSITAS GAJAH MADA	-	-	-	-	-	1	1
10	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	-	-	-	-	-	18	18
11	POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM SEMARANG	-	-	-	-	-	2	2
	JUMLAH	10	35	66	77	67	84	339



Program SAGA SAJA yang dimulai dari Tahun 2018 -2023 dengan total mahasiswa 339 orang, mahasiswa yang telah tamat sebanyak 94 orang dan telah bekerja 6 orang, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
DATA MAHASISWA SAGA SAJA YANG SUDAH TAMAT DAN BEKERJA

NO	MAHASISWA ANGKATAN	JUMLAH	
		TAMAT	BEKERJA
1	2018	10	4
2	2019	23	1
3	2020	61	1
	JUMLAH	94	6

Adapun perbandingan realisasi Capaian Indikator dari Sasaran **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berkualitas dan Berbudaya** dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berkualitas dan Berbudaya dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI & CAPAIAN TAHUN				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,58	14,54	14,60	14,55	14,56	14,70	14,53 (99,59%)	14,54 (99,9%)	14,55 (100%)	14,61 (100,3%)	14,79 (101%)
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,34	10,60	10,90	10,84	10,80	11	10,37 (98%)	10,59 (97,16%)	10,67 (98%)	10,78 (99,8%)	10,79 (98%)

Dari tabel di atas, terlihat realisasi capaian Angka Harapan Lama Sekolah adanya trend peningkatan capaian selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana capaian Tahun 2023 telah melampaui target sebesar 0,21 tahun dari target 14,58 Tahun yang akan dicapai pada akhir periode akhir RPJMD 2018-2023 .

Sedangkan capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 sebesar 10,79 tahun, jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD



sebesar 11,34 tahun tidak tercapai karena masih terdapat *gap* sebesar 0,56 tahun.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat didukung beberapa program, diantaranya:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 5) Program Pembinaan Perpustakaan
- 6) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 7) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 8) Program Pembinaan Perpustakaan.

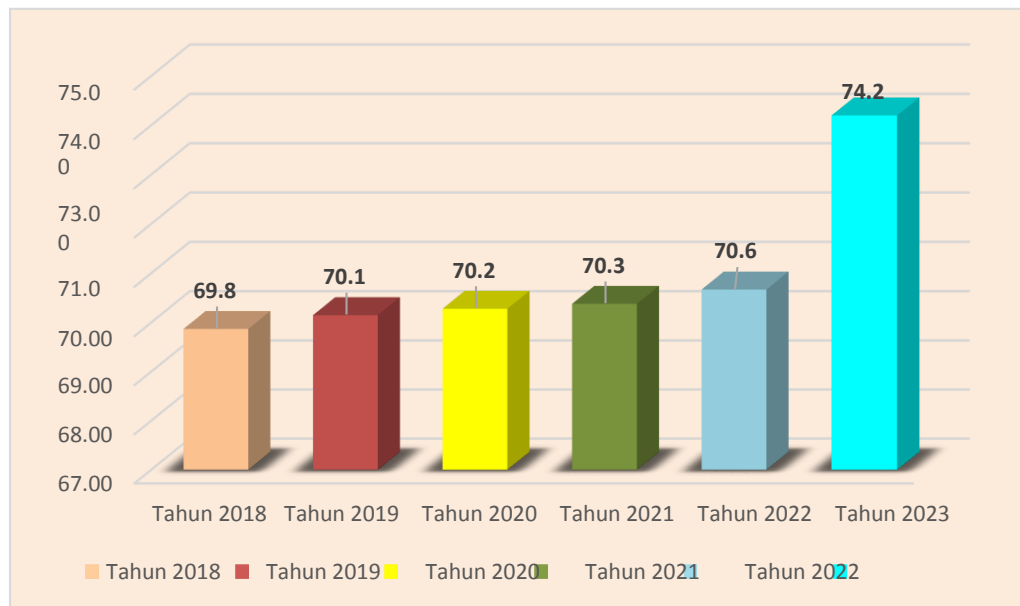
Dengan total anggaran sebesar Rp. 151.842.806.840,- dengan realisasi Rp. 138.981.412.956,- (91,53%)

Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun				
						2023	2022	2021	2020	2019
1	Angka Usia Harapan Hidup	71,18	tahun	74,20	tahun	104,24%	99,70%	99,97%	99,97%	100,1%
	Rata-rata Capaian					104,24%	99,70%	99,97%	99,97%	100,1%

Sasaran Meningkatnya Derajat Kehidupan Masyarakat dengan indikator " Angka Usia Harapan Hidup" dengan target 71,18 tahun dengan realisasi 74,20 dengan capaian kinerja 104,24%, dimana angka usia harapan hidup dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada grafik:

Grafik 3.1
Trend Angka Harapan Hidup di Kota Pariaman Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kota Pariaman 2023

Umur harapan hidup adalah data yang menggambarkan usia kematian pada suatu populasi. Data ini merupakan ringkasan pola usia kematian yang terjadi

Hal yang mempengaruhi naiknya Angka Usia Harapann Hidup antara lain :

1. kemudahan akses pelayanan kesehatan,
2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,
3. status ekonomi,
4. penerapan pola hidup sehat
5. keadaan lingkungan ;
6. ketersediaan pangan ;
7. pendidikan,
8. kebijakan pemerintah ;dan sebagainya

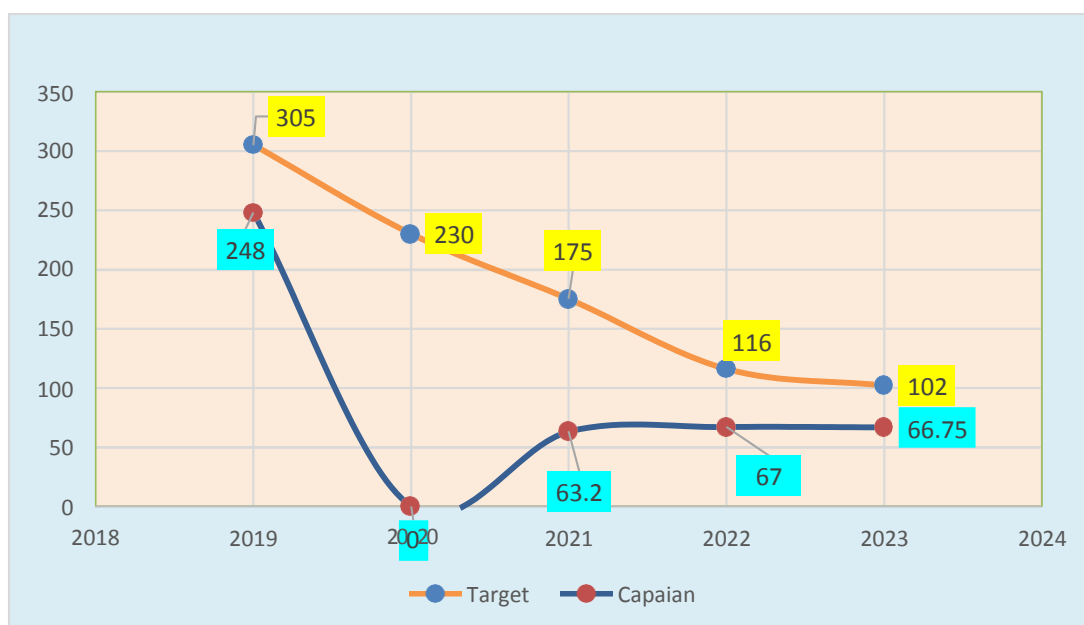
Peningkatan harapan hidup disebabkan karena pola hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita.

Angka harapan hidup adalah data yang menggambarkan usia kematian pada suatu populasi. Data ini merupakan ringkasan pola usia kematian yang terjadi pada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Angka Kematian Ibu di Indonesia menurut data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) tahun 2013 adalah sebesar 359/100.000 kelahiran hidup sedangkan target MDG's 2015 AKI adalah sebesar 102/100.000 kelahiran hidup.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) AKI di Indonesia turun menjadi 305/100.000 Kelahiran Hidup. Berikut adalah Angka Kematian Ibu di Kota Pariaman Tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut

Grafik 3.2
ANGKA KEMATIAN IBU DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman 2023



Dilihat dari grafik diatas, angka kematian ibu di Kota Pariaman sejak tahun 2019-2023 berfluktuatif. Angka Kematian Ibu pada tahun 2023 adalah 66,75/100.000 Kelahiran Hidup (1 orang) yaitu ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Kurai Taji, penyebab dari kematian ibu hamil ini adalah cardiac arrest.

Menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat, dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu sekitar 75% dari total kasus kematian ibu adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman.

Untuk kasus Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Pusat Kesehatan dan Informasi Kemenkes penyebab utama kematian ibu adalah pendarahan (30.3%) dan hipertensi (27.1%). Hal ini sangat ironis, mengingat berbagai penyebab kematian ibu di atas sebenarnya dapat dicegah, jika sang ibu mendapatkan perawatan medis yang tepat.

Berdasarkan data Kemenkes, sekitar 28,8% ibu hamil menderita hipertensi. Hipertensi bisa mengakibatkan gangguan kardiovaskular yang menjadi faktor penyebab kematian pada ibu saat melahirkan. Selain itu, 32,9% ibu hamil mengalami obesitas dan 37,1% menderita anemia, bisa disebabkan faktor gizi dan asupan makanan yang kurang.

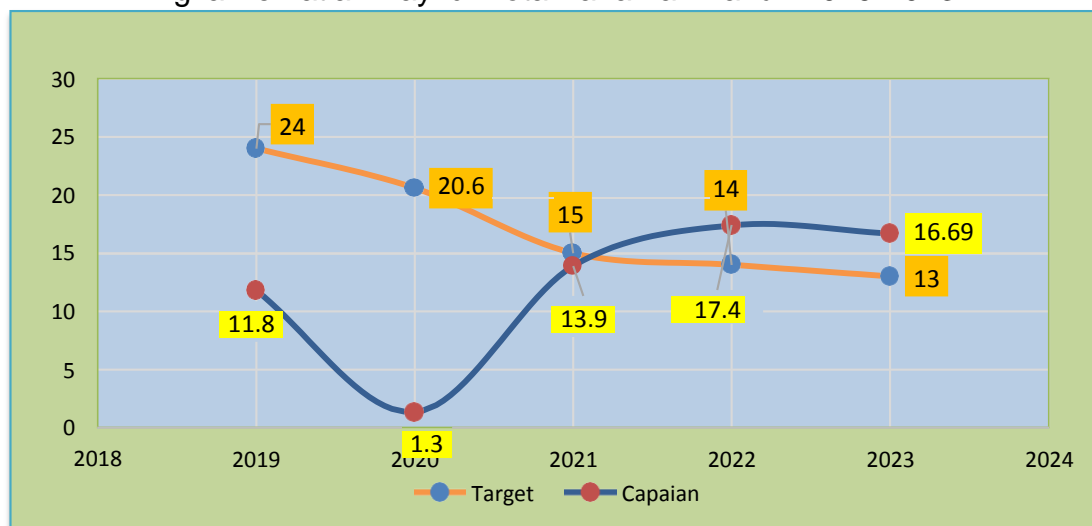
Angka kematian ibu (AKI) berkorelasi dengan angka kematian bayi (AKB). Sebagai upaya meminimalkan faktor risiko keduanya, para ibu hamil diimbau melakukan pemeriksaan berkala secara rutin setiap empat bulan sekali selama masa kehamilan sekaligus pemindaian faktor risiko kelainan atau penyakit yang dapat meningkatkan risiko kematian saat persalinan.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca

persalinan. Disamping Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi (AKB) juga mempengaruhi Usia Harapan Hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia dibawah 1 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun yang dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup. Trend angka kematian bayi di Kota Pariaman Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 3.3
Angka Kematian Bayi di Kota Pariaman Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pariaman 2023

Dari grafik di atas dapat dilihat angka kematian bayi di Kota Pariaman tahun 2019-2023 berfluktuatif. Angka kematian bayi di Kota Pariaman pada tahun 2023 adalah 16,69/1000 KH angka ini turun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 17,4 .

Penyebab kematian bayi di Kota Pariaman sebagian besar disebabkan asfiksia dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) serta infeksi.

Beberapa upaya untuk mencegah BBLR ini adalah selain dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, upaya menjaga keselamatan bayi baru lahir juga ditentukan oleh kesehatan ibunya sendiri. Supaya berat badan bayi saat lahir normal, dalam artian tidak kurang maupun tidak lebih, ibu wajib menjaga pola makannya saat hamil. Contohnya dengan memperbanyak



makan sayur dan buah, makanan tinggi serat dan asam folat, dan jenis makanan sehat lainnya. Semakin terpenuhi kebutuhan gizi ibu saat hamil, maka kesehatan ibu dan bayinya pun akan semakin optimal. Begitu juga dengan asfiksia dan infeksi pada bayi baru lahir. Kedua masalah kesehatan ini juga bisa dicegah sedini mungkin.

Sedangkan untuk mencegah asfiksia pada bayi, itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Misalnya kalau sudah tahu persalinannya macet, maka bisa segera dilakukan operasi caesar. Jadi, bayi tidak perlu lama-lama di jalan lahir yang bisa bikin kehabisan oksigen.

Angka kematian bayi ini merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Dalam upaya menurunkan angka kematian bayi ini, bukan hanya tugas pemerintah atau dokter saja, seluruh masyarakat baik ibu hamil itu sendiri, suami atau keluarganya ikut andil dalam menurunkan angka kematian bayi ini.

Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup di Indonesia menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Jika angka kematian bayi tinggi, maka harapan hidup di wilayah tersebut akan rendah, begitu pula sebaliknya.

Meski demikian, angka harapan hidup ini berbeda pada tiap Negara. Angka harapan hidup ini mencakup berbagai parameter yang menjelaskan derajat kesehatan suatu daerah. Beberapa parameternya secara kuantitatif adalah angka kematian bayi, angka kematian anak dibawah 5 tahun, Sedangkan parameter kualitatif seperti jenis kelamin, genetik, akses ke pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, diet, nutrisi, gaya hidup dan tingkat kriminalitas. Jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota, serta Provinsi Sumatera Barat, Usia Harapan Hidup Kota Pariaman berada pada urutan 9, lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat. Adapun Usia Harapan Hidup Kabupaten Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

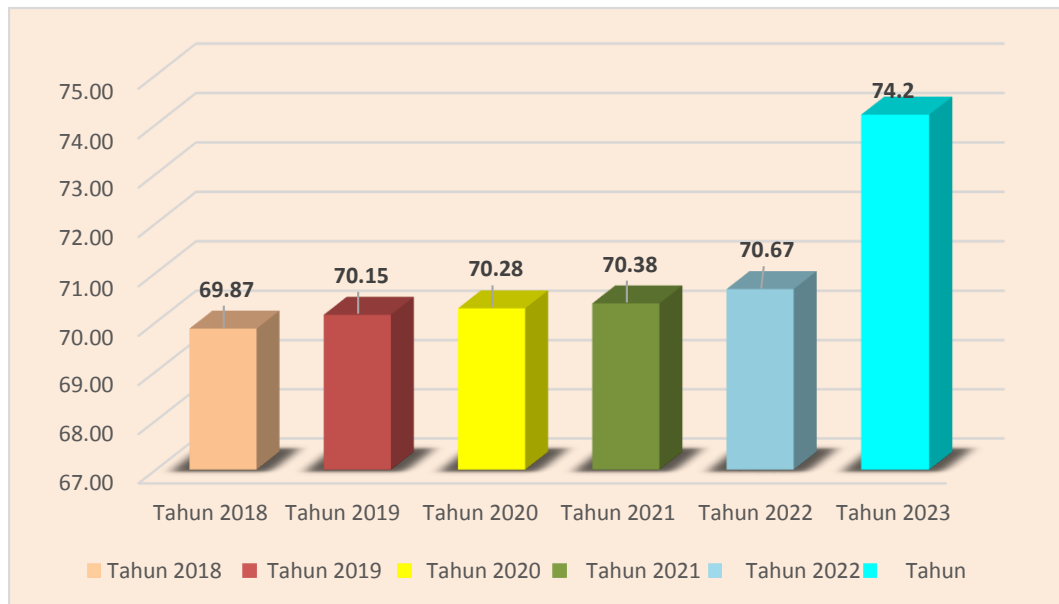
Tabel 3.7
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 2019-2023

NO	KAB/KOTA	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Metode Baru) (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Bukittinggi	74,22	74,38	74,50	74,82	75,13
2	Kota Payakumbuh	73,61	73,74	73,84	74,14	74,43
3	Kota Solok	73,45	73,61	73,73	74,06	74,39
4	Kota Padang	73,57	73,65	73,69	73,93	74,16
5	<i>Kota Pariaman</i>	<i>70,15</i>	<i>70,28</i>	<i>70,38</i>	<i>70,67</i>	<i>74,2</i>
6	Kota Padang Panjang	73,57	73,65	73,69	73,93	73,23
7	Kabupaten Agam	72,17	72,37	72,53	72,89	73,23
8	Kab.Dharmasraya	71,10	71,33	71,53	71,90	72,24
9	Kab.Pesisir selatan	70,73	70,86	70,96	71,25	71,52
10	Kab. Tanah Datar	69,73	69,94	70,12	70,49	70,84
11	Kota Sawahlunto	69,87	70,00	70,10	70,40	70,59
12	Kab.Lima Puluh Kota	69,70	69,79	69,84	70,08	70,3
13	Kab.Padang Pariaman	68,58	68,79	68,97	69,34	69,7
14	Kabupaten Solok	68,34	68,58	68,79	69,19	69,56
15	Kab.Solok Selatan	67,58	67,81	68,01	68,38	68,71
16	Kab.Pasaman barat	67,67	67,82	67,94	68,25	68,53
17	Kab. Pasaman	67,18	67,40	67,59	67,96	68,29
18	Kab. Sijunjung	66,02	66,21	66,36	66,70	67,02
19	Kab. Kep. Mentawai	64,68	64,73	64,73	64,93	65,1
20	Prov. Sumatera Barat	69,31	69,47	69,59	69,90	70,19
21	Nasional		71,47	71,57	71,85	72,13

Sumber Data BPS 2023 dan diolah

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Angka Usia Harapan Hidup yang tertinggi adalah Kota Bukittinggi 75,13, dan yang terendah Kabupaten Mentawai 65,1 sedangkan Kota Pariaman 74,2 berada di urutan 5 dan di atas Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 70,19 tahun, sedangkan Nasional 72,13, jika dibandingkan dengan 4 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.4
Umur harapan Hidup Penduduk Indonesia Tahun 2012-2023



Sumber Badan Pusat Statistik

Berdasarkan berita Kompas.Com 5 tanggal 14 Juli 2023, Negara dengan Angka Harapan Hidup paling tinggi di tahun 2023 adalah:

1. Monako sebesar 87,01 tahun, hal ini berangkat dari fasilitas kesehatan yang memadai dan pola makan sehat, yaitu Diet Mediterania yang fokus pada konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan lemak sehat.
2. Hong Kong, rata-rata penduduknya berusia 88,66 tahun untuk wanita, 83 tahun untuk pria.
3. Makau rata-rata penduduknya berusia 85,51 tahun, dimana 82,88 tahun untuk pria dan 88,11 tahun untuk wanita.
4. Jepang rata-rata penduduknya 84,95 tahun, usia 87,97 tahun untuk wanita dan 81,91 tahun untuk pria
5. Liechtenstein, negara kecil di kawasan Eropa angka harapan hidup rata-rata 84,95 tahun, 83,16 tahun untuk pria dan 86,23 tahun untuk wanita.

Di Indonesia 10 Propinsi dengan Angka Harapan Hidup tertinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta 76,89 Tahun, Jawa Tengah 76,42, Jawa Barat 75,19 Tahun, DKI 74,91 Tahun, Bali 74,17 Tahun, Riau 73,62 Tahun, Jawa Timur 73,35 Tahun, Jambi 73,19 Tahun, Bangka Belitung 72,70 Tahun dan dan Lampung 72, 69 Tahun.



Adapun Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023 tercantum pada tabel:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
dengan Target Akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,18	70,07	70,30	70,53	70,88	71,18	70,15	70,28	70,38	70,67	74,2

Dari tabel 3.8 di atas terlihat perbandingan realisasi capaian Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2023 telah melampaui target akhir RPJMD 2018-2023 sebesar 71,18 tahun.

Hal yang mempengaruhi naiknya Angka Usia Harapan Hidup antara lain :

1. kemudahan akses pelayanan kesehatan,
2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,
3. status ekonomi,
4. penerapan pola hidup sehat produktif dan berkualitas.

Untuk memperpanjang Angka Harapan Hidup, masyarakat dihimbau agar:

- 1) rajin berolah raga, karena dengan berolah raga membuat seseorang menjadi lebih sehat dan lebih bahagia;
- 2) menjauhkan diri dari stress, karena stress dapat menyebabkan seseorang mudah terserang beragam penyakit;
- 3) Istirahat yang cukup dan berkualitas;
- 4) meminimalisir melakukan kegiatan beresiko, seperti merokok atau meminum alkohol;
- 5) Mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang.



Sasaran 3 Menurunnya Prevalensi Stunting

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun					
				2023	2022	2021	2020	2019	2018
1	Prevalensi Stunting	12,5	10,50	116%	146%	97%	-		-
Rata-rata Capaian				116%	146%	97%			

Indikator Prevalensi Stunting dengan target 12,5 sedangkan realisasi 10,50 dengan capaian 116%, realisasi ini naik 1,5 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasinya hanya 9, tahun 2021 prevalensi stunting realisasi 10,3 . Disini dapat dilihat terjadinya fluktuasi prevalensi stunting.

Masalah gizi pada balita merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang masih tergolong tinggi di Indonesia, baik yang bersifat akut maupun kronis. *Stunting* atau anak pendek berdasarkan umur merupakan **salah satu** indikator kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan asupan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada **periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan**. Karenanya periode 1.000 HPK ini disebut pula sebagai **periode Emas** untuk melakukan pencegahan atau koreksi masalah stunting dengan berbagai intervensi gizi spesifik dan sensitif. **Intervensi gizi spesifik** terdiri dari berbagai program yang bertujuan untuk menanggulangi penyebab langsung masalah stunting, sementara **intervensi gizi sensitif** merupakan kelompok program yang bertujuan untuk **menanggulangi berbagai penyebab tak langsung** dari stunting. Dengan kata lain, masalah stunting bersifat multifaktor yang dalam pemantauannya membutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi.

Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.

Grafik 3.5
Balita stunting di Kota Pariaman Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Jika dilihat pada grafik Prevalensi Stunting di atas, sejak tahun 2019 sampai Tahun 2023 terjadi fluktuasi capaian, dimana realisasi tahun 2023 kurang bagus karena adanya kenaikan 1,5 poin dengan realisasi 10,5% , capaian terendah adalah di Tahun 2022 dengan realisasi 9%, sedangkan capai tertinggi Tahun 2020 sebesar 10,8% Capaian tahun 2022 ini cukup bagus karena adanya penurunan stunting sebesar 1,3 dari Tahun 2021.

Upaya yang dilaksanakan untuk menurunkan stunting di Kota Pariaman sudah memberikan hasil yang cukup signifikan dengan jalan:

- 1 memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar pada ibu hamil selama kehamilannya
- 2 memberikan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir yang sesuai standar
- 3 memberikan edukasi dan konseling kepada ibu hamil tentang menjaga kesehatan selama kehamilan
- 4 meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka menurunkan stunting.

Angka prevalensi stunting Kota Pariaman jauh di bawah Provinsi Sumatera Barat mencapai 25,20 % dan Nasional rata-rata nasional 24,4 atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya akan tetapi Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14 % di tahun 2024.



Untuk mencapai target 14%, maka setiap tahunnya perlu terjadi penurunan sekitar 3 persen, perlu upaya inovasi agar terjadi penurunan sekitar 3 sampai 3.5 % per tahun. Sehingga tercapai target 14 persen tahun 2024 sesuai dengan target Presiden berdasarkan RPJMN bisa tercapai,"

Stunting masih bisa dicegah dan ditangani selama anak dalam masa seribu hari pertama kehidupan, yaitu 40 minggu di masa kehamilan pada anak usia satu tahun dan usia dua tahun.

Secara medis stunting merupakan gangguan tumbuh kembang pada anak akibat multi faktor terutama akibat gizi buruk, infeksi berulang, pola asuh yang salah, kondisi lingkungan tidak sehat, dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Penyebabnya yang paling mendominasi adalah gizi buruk.

Gizi buruk diakibatkan kurangnya nutrisi secara berkepanjangan. Anak yang mengalami gizi buruk di bawah usia satu tahun kata Darul, 25 persen berisiko memiliki tingkat IQ di bawah 70. Sedangkan 40 persen lainnya, berisiko memiliki IQ antara 71 hingga 90. Stunting menjadi permasalahan utama anak balita dan baduta di Indonesia. "Stunting tidak saja terjadi pada anak-anak yang berasal dari kelompok masyarakat miskin, namun kasusnya juga terjadi pada anak-anak yang berasal dari berbagai tingkat kesejahteraan sosial. Anak yang pendek belum tentu stunting, namun anak stunting sudah pasti pendek. Seringkali ada anggapan bahwa anak yang tidak tumbuh optimal (pendek) adalah akibat faktor genetika atau keturunan, padahal bisa saja karena stunting.

Masalah dan tantangan kita dalam penanganan stunting, diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat terkait stunting, sehingga menimbulkan kesalahan pemahaman dalam penanganan dan pencegahan stunting. Sebagian masyarakat menganggap tidak penting asupan gizi seimbang dan bernutrisi cukup bagi anak, ibu hamil atau ibu menyusui.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah stunting yaitu :

1. Pemantauan kesehatan secara optimal pada masa kehamilan yaitu pada 1.000 hari pertama kehidupan bayi.
2. Pemeriksaan kehamilan atau ante natal care (ANC) secara rutin dan berkala.



3. Memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi (TKPM).
4. Memberikan pola asuh yang tepat
Pemberian ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan, serta pemberian ASI bersama dengan MP-ASI sampai anak berusia 2 tahun. World Health Organization (WHO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) menganjurkan agar bayi usia 6-23 bulan untuk mendapatkan makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang optimal.
5. Ketersediaan pangan di masing-masing keluarga.
Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan meningkatkan kualitas makanan harian yang dikonsumsi.
6. Rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita.
7. Memberikan makanan tambahan (PMT) untuk balita.
8. Melakukan stimulasi dini perkembangan anak.
9. Memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak.

Adapun perbandingan realisasi Capaian Indikator dari Sasaran **Menurunnya Prevalensi Stunting** dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Prevalensi Stunting dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Stunting	%	8,9	-	-	10,02	16,8	12,5	9,8	10,8	10,03	17,26	10,50

Dari tabel 3.9 di atas terlihat perbandingan realisasi Prevalensi Stunting pada 2023 adalah 10,50 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 sebesar 8,9 terdapat *gap* sebesar 1.6, dimana target tidak tercapai pada akhir periode RPJMD.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menurunkan stunting, yaitu:

1. meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya penanganan stunting



2. meningkatkan peran serta masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan lain-lain untuk keberhasilan pencegahan stunting.

Alokasi Anggaran untuk mencapai *Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* dan *Sasaran Prevalensi Stunting* adalah sebesar **Rp. 117.048.056.101,- dengan realisasi Rp. 103.741.124.795,- (88,6%)**

Program yang mendukung sasaran 2 dan Sasaran 3 di atas, diantaranya:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 5) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 6) Program Perlindungan Perempuan
- 7) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 8) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 9) Program Perlindungan Khusus Anak
- 10) Program Pengendalian Penduduk
- 11) Pembinaan Keluarga Berencana
- 12) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sasaran 4 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun				
				2023	2022	2021		
1	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	14 juta	13,355 juta	95%	97%	97%	-	-
Rata-rata Capaian				95%	97%	97%	-	-

Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan indikator Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan yang ditargetkan Rp. 14 juta terealisasi Rp. 13,355 juta dengan capaian 95%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 adanya kenaikan 0,205 dari Rp. 13,150 juta. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya transaksi jual beli di sektor perdagangan dengan target Rp. 2.710.000.000.000,- sedangkan realisasi Rp. 3.437.110.017.503



(125,83%) .Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli .

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Faktor penentu daya beli masyarakat adalah harga barang serta jasa. Kemampuan daya beli masyarakat akan cenderung menurun ketika harga-harga produk dan jasa mengalami kenaikan. Namun sebaliknya, kemampuan beli masyarakat nantinya akan meningkat apabila harga-harga tersebut menurun. *Tidak tercapainya target yang ditetapkan, disebabkan:*

1. kenaikan harga ;
2. cuaca dan kondisi alam yang kurang baik yang berdampak kepada usaha, baik perdagangan maupun pertanian.

Tabel 3.10
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 2019-2023

NO	KAB/KOTA	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Metode Baru) (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Padang	14728	14.481	14.540	14.889	15.089
2	Kota Bukittinggi	13.586	13.282	13.331	13.633	13.859
3	Kota Payakumbuh	13.464	13.281	13.317	13.687	13.978
4	Kota Pariaman	12.958	12.796	12.818	13.150	13.355
5	Kota Solok	12.337	12.117	12.168	12.515	12.709
6	Kab.Dharmasraya	11.431	11.273	11.324	11.650	11.901
7	Kab.Padang Pariaman	11.158	10.988	11.050	11.159	11.432
8	Kota Padang Panjang	11.013	10.734	10.754	11.153	11.310
9	Kab. Tanah Datar	10.709	10.588	10.616	10.695	10.905
10	Kab.Solok Selatan	10.505	10.325	10.367	10.560	10.884
11	Kab. Sijunjung	10.395	10.361	10.389	10.582	11.018
12	Kabupaten Solok	10.309	10.171	10.215	10.539	10.717
13	Kota Sawahlunto	10.238	10.182	10.195	10.537	10.829
14	Kab.Lima Puluh Kota	9.842	9.596	9.668	10.035	10.825
15	Kab.Pesisir selatan	9.444	9.212	9.270	9.686	9.953
16	Kabupaten Agam	9.780	9.651	9.622	10.171	10.402
17	Kab.Pasaman Barat	9.180	9.047	9.089	9.381	9.538
18	Kab. Pasaman	8.599	8.425	8.440	8.619	8.908
19	Kab. Kep. Mentawai	6.429	6.281	6.321	6.567	6.891
20	Prov. Sumatera Barat	10.925	10.733	10.790	11.130	11.380
21	Nasional				11.479	11.899

Sumber Data BPS 2023 dan diolah



Adapun perbandingan realisasi Capaian Indikator dari Sasaran **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat** dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	Juta (Rp.)	14,00	-	-	13,15	13,55	14	-	-	12,82	13,15	13,355

Dari tabel 3.11 di atas terlihat perbandingan realisasi capaian Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan pada tahun 2023 Rp. 13.355 juta jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 adalah sebesar Rp. 14,00 juta, terdapat *gap* sebesar Rp. 645.000,- target pada akhir periode RPJMD tidak dapat tercapai.

Program yang mendukung sasaran ini diantaranya:

1. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
5. Program Pengembangan UMKM
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
7. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
8. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
9. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Total anggaran untuk mendukung sasaran ini Rp. 9.692.009.467,- dengan realisasi keuangan Rp 8.976.448.865,- (92,62%).

Misi III : Mewujudkan Pemerintahan yang Prima untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City



Sasaran 1 Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN					
				2023	2022	2021	2020	2019	2018
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,01	61,49	87,8%	87,2%	98%	80%	94%	89%
2	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian				94%	94%	99%	90%	97%	95%

Sasaran Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, dengan 2 indikator Kinerja, yaitu: Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Opini BPK terhadap LKPD dengan rata-rata capaian 94%

➤ Nilai Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Pariaman.

Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government).**

Secara lebih rinci, evaluasi AKIP adalah:

- memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- menilai tingkat implementasi SAKIP;
- menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.



Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Berdasarkan hasil Evaluasi tahun 2022 Pemerintah Kota Pariaman telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. melakukan pendampingan maupun coaching clinic dalam penyusunan target kinerja;
- b. melakukan revisi dan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan perangkat
- c. memastikan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah tahun 2024 dan 2025 berpedoman pada dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 serta dipastikan juga sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja pada dokumen Renstra Perangkat Daerah di breakdown pada dokumen perencanaan PD tiap Tahunnya (Renja PD Tahun 2024 dan 2025);
- d. melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan untuk memastikan kualitas sasaran, indikator dan keterpaduan perencanaan;
- e. melakukan kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal, untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah, dengan memberikan sanksi berupa pemotongan komponen produktifitas kerja selama 3 (tiga) bulan bagi Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP sesuai dengan Perwal Pariaman Nomor 14 Tahun 2023 tentang TPP:
 - ❖ Nilai SAKIP CC dikenakan sanksi pemotongan sebesar 5% (lima persen)
 - ❖ Nilai SAKIP C dikenakan sanksi pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen)
 - ❖ Nilai SAKIP D dikenakan sanksi pemotongan sebesar 15% (lima belas persen).



Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pariaman tahun 2023 dengan nilai 61,49 dengan predikat “B”. Jika dibandingkan dengan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 memperoleh nilai 61,08 dengan prediket “B” .

Dengan Nilai 61,49 (B), dimana SAKIP Kota Pariaman cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan-perbaikan diantaranya:

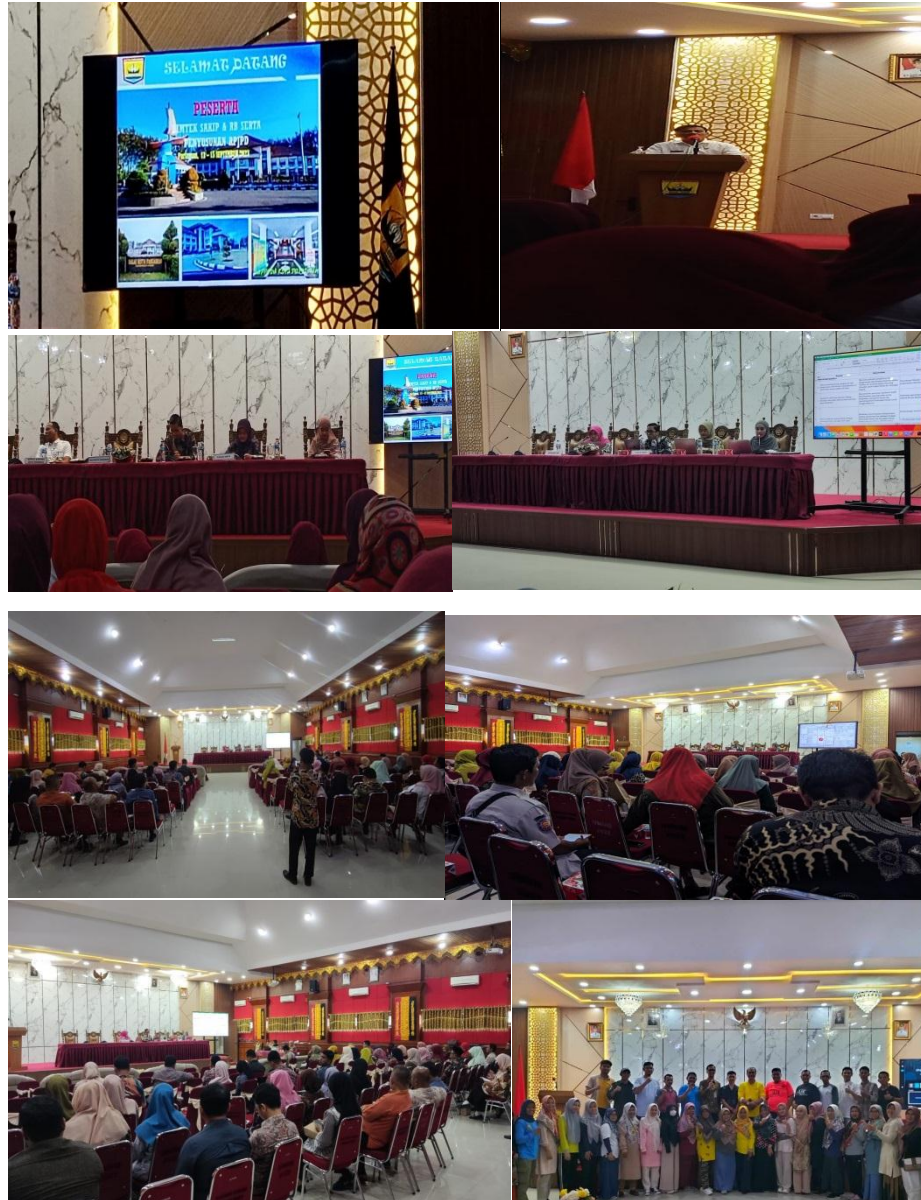
- 1) Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
- 2) Melakukan reuiu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap perangkat daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan memenuhi unsur **cukup** dalam mengawal kinerja;
- 3) Melakukan reuiu dan perbaikan penjenjangari/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- 4) Memanfaatkan hasil perbaikan *cascading* kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi;
- 5) Memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Wali Kota dan setiap PD sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya;



- 6) Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai;
- 7) Memastikan laporan kinerja seluruh PD dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah;
- 8) Meningkatkan kualitas laporan kinerja sesuai Permen PANRB Nomor 53 tahun 2014 dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja dan melakukan *benchmark* dari kabupaten/kota, provinsi, dan apabila memungkinkan dengan nasional untuk kinerja yang sifatnya strategis serta menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh unit kerja;
- 9) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- 10) Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP PD dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan perangkat daerah;
- 11) Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian *reward and punishment* kepada perangkat daerah, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman:

1. melakukan reviu terhadap Dokumen Perencanaan dan melakukan perbaikan terhadap dokumen kinerja secara menyeluruh;
2. Untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman terhadap implementasi SAKIP dan RB dilaksanakan Workshop SAKIP dan RB tanggal 13 sampai 15 September 2023.



Workshop SAKIP dan RB tanggal 13 sampai 15 September 2023

3. Untuk menyamakan persepsi terkait persiapan Evaluasi SAKIP dan RB diadakan Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP tanggal 18 September 2023.



➤ *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah*

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan ke BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI terhadap LKPD sejak tahun 2016 Sampai dengan tahun 2023.

Hal ini sangat penting mengingat WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi Capaian Indikator dari Sasaran Meningkatnya **Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel** dengan target akhir periode RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	70,05	60,00	71,00	61,50	61,50	70,01	56,15 (94%)	56,50 (80%)	60,06 (98%)	61,08 (87,2%)	61,49 (87,8%)
Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dari Tabel 3.12 di atas terlihat perbandingan realisasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2023 adalah 61,49 adanya gap sebesar 9,01 poin dari target akhir RPJMD yaitu sebesar 70.50 tidak tercapai.

Program yang mendukung sasaran ini diantaranya:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 2) Program Koordianasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 4) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 5) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 7) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 8) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Dengan total anggaran Rp. 123.474.608.566,- dengan realisasi keuangan Rp .122.375.007.416,- (99,1%).

**Sasaran 2
Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel**

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN					
				2023	2022	2021	2020	2019	2018
1	Indeks SPBE	2,7	2,65	98%	102%	78%	103%	106%	
2	Indeks Profesional ASN	85,5	85,96	100,5%	79%	83%			
Rata-rata capaian				99%	90%	161%	103%	106%	



S

asaran Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel terdapat 2 indikator yaitu Indeks SPBE dan Indeks Profesional ASN dengan rata-rata capaian 99%.

➤ **Indeks SPBE**

Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE pelaksanaan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen 47 indikator. Dari hasil evaluasi tersebut, Indeks SPBE Kota Pariaman sedikit mengalami kenaikan, dimana Tahun 2023 Indeks SPBE 2,65, Tahun 2022 adalah 2,64, tahun 2021 Indeks SPBE 2,42 sedangkan Tahun 2020 Indeks SPBE 2,8 .

Penilaian SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- 1) kebijakan internal,
- 2) tata Kelola,
- 3) kelembagaan,
- 4) strategi dan perencanaan,
- 5) TIK,
- 6) layanan administrasi pemerintahan; serta
- 7) layanan publik berbasis elektronik.

Dari hasil rekap tingkat kematangan SPBE, masih banyak kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan SPBE Kota Pariaman, dimana tingkat kematangan dari indikator SPBE masih rendah diantaranya:

- 1) Master Plan dan kebijakan internal pembangunan Aplikasi SPBE belum ada;
- 2) kematangan inovasi proses bisnis SPBE ;
- 3) kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE;
- 4) Penerapan resiko SPBE;
- 5) Penerapan manajemen keamanan informasi;
- 6) Penerapan manajemen data.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks SPBE, diantaranya:

- 1) menyusun kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE;
- 2) menyusun proses bisnis SPBE;



- 3) menyusun SOP keamanan informasi;
- 4) menyusun peta resiko SPBE

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023**

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,75	Sangat Baik
2.	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	4,17	Sangat Baik
3.	Pemerintah Kota Padang	3,54	Sangat Baik
4.	Pemerintah Kab. Solok	3,49	Baik
5.	Pemerintah Kota Solok	3,37	Baik
6.	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	3,29	Baik
7.	Pemerintah Kab. Tanah Datar	3,22	Baik
8.	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,17	Baik
9.	Pemerintah Kota Sawahlunto	3,09	Baik
10.	Pemerintah Kab. Solok Selatan	2,98	Baik
11.	Pemerintah Kota Padang Panjang	2,92	Baik
12.	Pemerintah Kab. Dharmasraya	2,83	Baik
13.	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	2,82	Baik
14.	Pemerintah Kota Pariaman	2,65	Baik
15.	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2,62	Baik
16.	Pemerintah Kab. Agam	2,55	Cukup
17.	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,49	Cukup
18.	Pemerintah Kab. Pasaman	2,38	Cukup
19.	Pemerintah Kab. Sijunjung	2,18	Cukup
20.	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	1,53	Kurang

➤ **Indeks Profesionalitas ASN**

Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara yang diukur berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tugas jabatannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks



Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengukuran indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Sesuai Perka BKN tersebut, Indeks Profesionalitas ASN diukur menjadi 4 dimensi dengan bobot yang berbeda-beda yaitu:

- 1) Dimensi Kualifikasi (25%),
- 2) Dimensi Kompetensi (40%),
- 3) Dimensi Kinerja (30%) ; dan
- 4) Dimensi Disiplin (5%).

Capaian dari Indeks Profesionalitas ASN dihitung secara otomatis pada sistem pengukuran indeks profesionalitas (PIP) ASN <https://dj.ip.asn.bkn.go.id>, data pengukuran diolah dari aplikasi SAPK-BKN yang dikelola langsung oleh admin daerah (BKPSDM Kota Pariaman). Hasil penghitungan dilaporkan secara berkala oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai Wilayah Kerja Kantor Regional masing-masing, dimana Kota Pariaman berada dilingkup Regional XII BKN Pekanbaru.

Berdasarkan surat Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nomor 1097/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2023 tanggal 25 Oktober 2023, Hal Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pariaman 85,96 (Kategori Tinggi).

Jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pariaman berada di urutan kedua berada dibawah Kota Bukittinggi Nilai 88,51 (Kategori Tinggi) dan berada di atas Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan Nilai 83,18 (Kategori Tinggi) . Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.13
Indeks Profesionalitas ASN beberapa Kabupaten Kota di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

NAMA INSTANSI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
Pemerintah Kota Bukittinggi	2.184	20,97	37,51	25,03	5,00	88,51	Tinggi
Pemerintah Kota Pariaman	2.293	21,35	34,66	24,95	5,00	85,96	Tinggi
Pemerintah Kab. Sijunjung	3.217	21,19	31,79	25,20	5,00	83,18	Tinggi
Pemerintah Kab. Tanah Datar	4.662	21,21	28,63	24,96	4,99	79,79	Sedang
Pemerintah Kota Batam	5.286	21,02	28,20	24,93	4,99	79,14	Sedang
Pemerintah Kota Pekanbaru	6.080	21,21	29,08	23,09	5,00	78,38	Sedang
Pemerintah Kota Padang Panjang	1.780	20,93	26,39	25,00	5,00	77,32	Sedang
Pemerintah Kab. Dharmasraya	3.068	21,31	21,04	24,36	5,00	71,71	Sedang
Pemerintah Provinsi Riau	13.866	21,61	17,06	24,66	5,00	68,33	Rendah
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	5.451	21,42	15,51	24,16	5,00	66,09	Rendah



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	4.664	21,51	14,19	24,87	4,99	65,56	Rendah
Pemerintah Kab. Agam	5.192	21,29	14,24	24,95	5,00	65,48	Rendah
Pemerintah Kab. Natuna	2.672	20,85	14,70	24,88	5,00	65,43	Rendah
Pemerintah Kota Solok	1.886	21,44	13,23	24,92	5,00	64,59	Rendah
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	1.673	20,19	15,12	24,08	5,00	64,39	Rendah
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	6.365	21,16	14,73	23,42	5,00	64,31	Rendah
Pemerintah Kota Payakumbuh	2.652	21,08	13,42	24,64	5,00	64,14	Rendah
Pemerintah Kab. Pasaman	3.773	21,24	12,49	24,92	5,00	63,65	Rendah
Pemerintah Kab. Pelalawan	4.409	21,22	12,07	24,88	5,00	63,17	Rendah
Pemerintah Kota Padang	7.408	21,28	11,21	24,82	5,00	62,31	Rendah
Pemerintah Kota Dumai	3.710	21,33	11,25	24,55	5,00	62,13	Rendah
Pemerintah Kab. Pasaman Barat	4.287	21,36	10,95	24,75	5,00	62,06	Rendah
Pemerintah Kab. Solok	4.452	21,30	10,32	24,98	5,00	61,60	Rendah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	16.381	21,62	11,11	23,73	5,00	61,46	Rendah
Pemerintah Kota Sawahlunto	1.952	21,09	10,31	24,87	4,99	61,26	Rendah

Penilaian Indeks Profesional ASN terdiri dari beberapa komponen penilaian yaitu:

- 1) dimensi *kualifikasi* dengan bobot nilai 25%, dengan skor 21,35.

Dimensi kualifikasi diukur berdasarkan jenjang tingkat pendidikan formal yang terakhir dicapai oleh PNS.

Adapun jumlah dan tingkat pendidikan PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Jumlah dan Jenjang Pendidikan PNS Tahun 2023

NO	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekolah Dasar (SD)	2	0	2
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	1	3
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	93	49	142
4	Diploma 1 (D-1)	1	2	3
5	Diploma 2 (D-2)	6	12	18
6	Diploma 3 (D-3)	88	346	434
7	Sarjan S1 /Diploma -IV	469	1125	1594
8	Pasca Sarjana (S2)	118	128	246
9	Doktor (S3)	1	1	2
10	Jumlah	780	1664	2444

Untuk meningkatkan skor dimensi kualifikasi, Pemerintah Kota Pariaman membuka kesempatan seluas-luasnya agar PNS melanjutkan pendidikannya dengan mengajukan/mengikuti tugas belajar maupun izin belajar.

- 2) Pada dimensi kompetensi dengan Skor 40%, diperoleh skor 34,66. Untuk dimensi kompetensi masih dikategorikan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.15
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan /Eselon

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Fungsional Tertentu	355	1222	1577
2	Fungsional Umum	259	340	599
3	Struktural	166	102	268
4	Eselon I	0	0	0
5	Eselon II	20	5	25
6	Eselon III	64	29	93
7	Eselon IV	82	68	150
8	Eselon V	0	0	0
	Jumlah	780	1664	2444



Dari 2.444 orang jumlah PNS, yang menduduki Jabatan Struktural 268 orang, sedangkan yang baru mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II baru 12 orang, Diklat Kepemimpinan Tingkat III 17 orang, dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV baru 58 orang .

Sehingga Pemerintah Kota Pariaman harus berusaha mengejar skor agar meningkat dengan cara mengirim para pegawainya untuk mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti diklat kepemimpinan bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural (eselon II, III dan IV), diklat fungsional bagi pejabat yang menduduki jabatan fungsional, diklat teknis bagi pegawai sesuai dengan tupoksinya minimal 20 (dua puluh) jp, dan mengikuti seminar/workshop/kursus sesuai dengan tupoksi pegawai tersebut.

- 3) Pada dimensi kinerja dengan bobot nilai 25%, diperoleh skor 24,95.

Dimensi kinerja merupakan riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP)..

- 4) Pada dimensi disiplin dengan bobot 5% diperoleh skor 5.

Dimensi disiplin diukur dari data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima oleh pegawai, baik berupa hukuman disiplin berat, sedang dan ringan. Hukuman disiplin yang dimaksud yaitu hukuman yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pegawai di Pemerintah Kota Pariaman yang memiliki hukuman disiplin dengan kategori hukuman disiplin berat, sedang dan ringan persentasenya sangat kecil yaitu 0,01% dari jumlah pegawai yang ada sehingga tidak mempengaruhi pada bobot dimensi disiplin tersebut.

Perbandingan realisasi Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel dengan Target RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel
dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	Indeks	3,25	2,7	2,8	3,1	2,6	2,7	2,87	2,87	2,42	2,64	2,65
Indeks Profesional ASN	Indeks	62	-	-	55	54,2	85,5	-	-	45,8	45,9	85,96

Dari tabel Perbandingan realisasi Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel dari Indikator Kinerja Indeks SPBE yang ditargetkan diakhir RPJMD 3,25 hanya tercapai 2,65 terdapat gap 0,6.

Sedangkan Indeks Profesional ASN target diakhir RPJMD 62 dengan realisasi 85,98 jauh melampaui dari target yang ditetapkan.

Tingginya Indeks profesional ASN disebabkan, karena :

1. Kompetensi ASN Kota Pariaman sudah ada peningkatan, karena berdasarkan jenjang pendidikan ASN Kota Pariaman sudah ada yang S3, namun masih ada ASN yang berijazah SD sebanyak 2 orang SMP sebanyak 2 orang, SMA 174 orang, Diploma-1 4 orang.
2. Penempatan PNS disesuaikan kualifikasi dan kompetensi, walaupun belum optimal;
3. Kurangnya pendidikan pelatihan yang diikuti oleh PNS, karena anggaran yang belum mendukung;
4. Peningkatan Kinerja ;
5. Disiplin ditegakkan .

Upaya yang dilakukan untuk menaikkan Indeks Profesional ASN:

1. Untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas PNS berbasis kompetensi, melalui jalur pendidikan baik dalam bentuk tugas belajar maupun izin belajar;
2. Penempatan ASN disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi
3. Meningkatkan kompetensi ASN melalui bimtek, seminar maupun diklat
4. Meningkatkan kinerja .
5. penegakkan disiplin secara menyeluruh ke ASN



Anggaran yang mendukung sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Kapabel sebesar Rp. 14.951.673.331,- dengan realisasi Rp. 13.242.136.308 (89%) dengan Program antara lain:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik.
2. Program Aplikasi Informasi.
3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program kepegawaian Daerah

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN					
				2023	2022	2021	2020	2019	2018
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	88,36	83,12	94,1%	91,8%	111%			
Rata-rata capaian				94,1%	91,8%	111%			

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dengan target 88,38 dengan realisasi 83,12, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 adanya kenaikan angka sebesar 6.91 dimana IKM Tahun 2022 hanya 79,21.

Pelayanan publik merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan prima, standar pelayanan publik yang jelas dan terus meningkatkan fasilitas penunjang di instansi yang kita miliki.

“Salah satu esensi dari pemerintahan yang baik, adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah, yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata, dan lebih mudah serta diperhatikan, ketika berurusan dengan pemerintah ,”

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pemerintah adalah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hakekat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima dengan peningkatan kualitas



pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan perwujudan kewajiban Aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Dari hasil Survey yang dilakukan terhadap 37 Unit Pelayanan Publik diperoleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat :

Tabel. 3.17
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	NilaiIKM
1.	Sekretariat Daerah	90,2
2.	BPKSDM	89,65
3.	BPKPD	87,45
4.	Bappeda	88,5
5.	Dinas Perhubungan	89,65
6.	DPMDes	86,35
7.	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	84,7
8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85,25
9.	Inspektorat	86,9
10.	Sekretariat DPRD	87,45
11.	DPPAKB	81,95
12.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	82,5
13.	Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan	86,9
14.	Dinas Perindustrian	83,05
15.	Dinas Komunikasi dan Informasi	86,35
16.	Dinas Pertanian	84,7
17.	DP3AKB	81,95
18.	Kesbangpol	85,25
19.	Kecamatan Pariaman Utara	80,3
20.	Kecamatan Pariaman Timur	80,85
21.	Kecamatan Pariaman Selatan	82,5



22.	Kecamatan Pariaman Tengah	86,35
23.	UPTD RSUD dr. Sadikin	82,5
24.	UPTD Puskesmas	85,25
25.	UPTD Puskesmas Santok	86,9
26.	UPTD Puskesmas Pariaman	83,05
27.	UPTD Puskesmas Sikapak	88,55
28.	UPTD Puskesmas Kp. Baru Padusunan	89,65
29.	UPTD Air Bersih	84,15
30.	UPTD Laboratorium Lingkungan	77
31.	UPTD Pasar Pariaman	85,25
32.	UPTD Metrologi Legal	84,15
33.	UPTD Balai Penyuluh Pertanian	85,25
34.	UPTD Balai Benih Ikan	80,3
35.	UPTD Instalasi Farmasi	77,55
36.	UPTD Perpakiran	81,4
37.	UPTD Peralatan Perbekalan dan PJU	84,15
Rata -rata Nilai IKM		83,12

Dari hasil survey tersebut Perangkat Daerah yang memperoleh nilai tertinggi adalah Sekretariat Daerah dengan nilai 90,2 sedangkan yang terendah UPTD Laboratorium Lingkungan dengan Nilai 77.

Disamping itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, di Pemerintah Kota Pariaman yang dipantau dan dievaluasi adalah Dinas Sosial dengan Indeks 4,1 (Kategori A-), RSUD dr. Sadikin Pariaman dengan Indeks 4,21 serta Kecamatan Pariaman Tengah dengan Indeks 3,94 (B) dengan rata rata Indeks Kota 4,09 (A-) .

Disamping itu, untuk mendorong Penyelenggara Pelayanan Publik mematuhi standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia



telah melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik kepada penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pariaman memperoleh Nilai 90,64 zonasi Hijau dengan opini Kualitas Tertinggi. Jika dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2022 adanya kenaikan nilai sebanyak 5,54 dari Nilai 85,10 (baik) zonasi Hujau dengan opini Kualitas Tinggi .

Dari 98 Pemerintah Kota di Indonesia yang dinilai, Kota Magelang meraih Nilai Kepatuhan Tertinggi, yaitu 98,17 Zonasi Hijau Kategori A dengan Opini Kualitas Tertinggi. Pemerintah Kota Pariaman berada di urutan ke 36 setelah Pemerintah Kota Binjai dengan Nilai kepatuhan 90,72 sedangkan nilai kepatuhan yang terendah adalah Pemerintah Kota Baubau dengan Nilai Kepatuhan 57,95 zonasi Kuning, kategori C dengan Opininya Kualitas Sedang.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai Pelayanan Publik antara lain:

- 1) Pemko Pariaman tak henti-hentinya memberikan dorongan dan pembinaan agar semua standar dan norma dalam pelayanan publik dapat terwujud demi memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat Kota Pariaman.
- 2) meningkatkan kualitas dan pelayanan publik di setiap Perangkat Daerah yang ada, sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat .

Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan
target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	kategori	88,35	-	-	84,5	86,25	88,36	0	0	84,5	79,21	83,12

Program yang mendukung sasaran ini diantaranya:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk mendukung sasaran ini adalah Rp. 346.772.987.942 dengan realisasi 319.370.763.077 (92,1%)

MISI IV : Mewujudkan Kota Pesisir, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun				
				2023	2022	2021	2020	2019
1	Indeks Insfrastruktur Daerah	70,00	59,01	84,3%	94%	102%	117%	102%
Rata-Rata Capaian				84,3%	94%	102%	117%	102%

Sumber : Hasil Olahan (2023)

Untuk mewujudkan Misi IV, salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas infrastruktur yang diukur dengan Indeks Infrastruktur Daerah, sebagai indikasi terwujudnya kota yang memenuhi kualitas infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari target Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2023 adalah 70% realisasi 59,01% dengan capaian 84,3%. Jika dilihat selama 4 tahun terakhir capaian indikator ini fluktuatif dimana tahun 2022 target sebesar 66,27 hanya terealisasi 62,09 dengan capaian 94%, tahun 2021 target 64,50 terealisasi sebesar 65,71



dengan capaian sebesar 102%, sedangkan Tahun 2020 target sebesar 65,45 dengan realisasi sebesar 76,50 atau dengan capaian sebesar 117%.

Pengukuran Indeks Infrastruktur Daerah dipengaruhi oleh 3 (tiga) variabel/komponen yaitu persentase jalan kondisi mantap, persentase drainase kondisi baik dan persentase irigasi kondisi baik, dengan formulasi berikut :

$$\text{Indeks Infrastruktur Daerah} = \frac{\text{Persentase jalan dalam kondisi mantap} + \text{Persentase drainase kondisi baik} + \text{Persentase Irigasi kondisi baik}}{3} \times 100$$

Adapun capaian kinerja masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut :

1) Persentase panjang jalan Kota dalam kondisi mantap

Panjang Jalan Kota dalam kondisi mantap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap

NO	KONDISI JALAN	PANJANG (Km)					JUMLAH KONDISI JALAN
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kondisi baik (mantap)	53,873	188,597	194,731	200,489	169,159	185,885
2	Kondisi sedang (mantap)	128,858	33,953	32,213	8,903	16,726	
3	Kondisi rusak ringan	42,398	7,087	12,913	38,014	67,475	105,228
4	Kondisi rusak berat	43,158	38,65	28,43	39,822	37,753	
Total panjang jalan kota		268,29	268,287	268,287	287,228	291,113	291,113

Sumber : Dinas PUPR dan Pertanahan Tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap} &= \frac{\text{Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi mantap}}{\text{Panjang Jalan Seluruh Kota}} \times 100 \% \\ &= \frac{185,885 \text{ KM}}{291,113} \times 100\% \\ &= \frac{185,89}{291,113} \times 100\% \\ &= 63,85\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari total panjang jalan yang merupakan ruas Jalan Kota tahun 2023 sepanjang 291,113 km. Jalan Kota dengan kondisi mantap sepanjang 185,885 km (63,85 %), sedangkan



jalan Kota dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat sepanjang 105,228 km (36,15 %) .

2) Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik

Panjang drainase kota dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Panjang Drainase Kota Dalam Kondisi Baik

NO	NAMA DRAINASE	TOTAL (KM)	PANJANG (KM)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Drainase primer	19,122	7,34	7,64	7,84	7,97	7,977
2	Drainase sekunder	44,458	16,81	17,31	17,81	18,08	19,153
Total		63,58	24,15	24,95	25,65	26,05	27,13

Berdasarkan tabel 3.20 panjang drainase kota adalah 63,58 km dengan 2 kategori, yaitu drainase primer dan drainase sekunder, drainase dalam kondisi baik 27,13 km. jika dibandingkan mulai dari 2019 - 2023 selalu ada peningkatan rata-rata sepanjang 0,745 km per tahun. Penghitungan pencapaian Persentase Panjang Drainase Kota dalam Kondisi Baik dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik} &= \frac{\text{Panjang drainase kota dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh drainase kota}} \times 100 \% \\
 &= \frac{(27,13 \text{ km} : 63,58 \text{ km}) \times 100\%}{ } \\
 &= 42,67\%
 \end{aligned}$$

Sumber Data Dinas PUPR dan Pertanahan 2023

3) Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik.

Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Panjang Jaringan Irigasi Berdasarkan Jenis Saluran

No	Jenis Saluran	Panjang (KM)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Irigasi Primer	1,027	1,027	1,027	1,027	1,117	1,117
2	Irigasi Sekunder	41,832	41,832	41,832	56,578	57,058	57,058
3	Irigasi Tersier	52,788	52,788	52,788	52,788	52,788	93,232
	JUMLAH	95,647	95,647	95,647	110,393	110,963	151,407

Sumber Data Dinas PUPR dan Pertanahan Tahun 2023

Sedangkan Panjang jaringan irigasi berdasarkan kondisi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Panjang jaringan irigasi berdasarkan Kondisi

No	Kondisi Saluran	Panjang (KM)						%
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Baik	67,65	69,95	67,95	79,73	80,332	14,767	70,51%
2	Sedang	-	-	-	-	-	91,996	
3	Rusak Ringan	-	-	-	-	-	-	
4	Rusak berat	28	25,7	21,7	30,66	30,63	44,644	29,49%
	JUMLAH	95,65	95,65	89,65	110,39	110,962	151,407	100%

Sumber Data Dinas PUPR dan Pertanahan Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tahun 2023 total panjang jaringan irigasi adalah 151,407 km. Irigasi yang kondisinya baik 106,76 km (70,51%), sedangkan rusak berat 44,644 km (29,49%) . Jika dilihat jaringan irigasi dalam kondisi baik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Penghitungan pencapaian Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dihitung dengan formula :

Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	=	(Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik: Panjang jaringan irigasi Seluruh Kota) x 100 %				
	=	106,76	KM :	151,407	km	x 100%
	=	70,51%				

Sumber Data Dinas PUPR dan Pertanahan Tahun 2023

Berdasarkan penghitungan masing-masing variabel diatas, maka pengukuran indikator Indeks Infrastruktur Daerah ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu :



Indeks Infrastruktur Daerah	=	(Persentase Panjang Jalan Kota dalam kondisi mantap + Persentase Panjang drainase kota dalam kondisi baik + Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik) : 3 x 100 %				
	=	63,85	+	42,67	+	70,51 : 3 x 100%
	=	59,01				

Sumber Data : DPUPRP Kota Pariaman 2023

Tidak tercapainya target Indeks Insfratraktur yang ditetapkan, karena salah satu dari variabel untuk penghitungan Indeks tersebut, yaitu variabel Persentase Panjang drainase kota dalam dalam kondisi baik hanya 42,67 capaian rendah , sedangkan dua variabel lainnya cukup tinggi yaitu Persentase Panjang Jalan Kota dalam kondisi mantap 63,85 sedangkan Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik 70,51.

Dalam upaya peningkatan capaian peningkatan persentase drainase dengan kondisi baik, dimana untuk kategori drainase primer yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman atau drainase primer yang berada pada jalur lintas wilayah kabupaten/kota, maka membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai baik melalui APBD Provinsi maupun fasilitasi pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui APBN.

Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur dengan target akhir
RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Insfrastruktur Daerah	Nilai	70	60,20	65,45	65,45	66,27	70	61,48	76,50	65,71	62,09	59,01



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, masih terdapat gap sebesar 10,99 poin antara realisasi capaian pada tahun 2023 tidak mencapai target pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 70.

Program untuk mendukung sasaran ini adalah :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dan Gorong-gorong
- 3) Program Penataan Bangunan Gedung
- 4) Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya
- 5) Program Penyelenggaraan Jalan
- 6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 7) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 8) Program Pengelolaan Izin Lokasi.
- 9) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
- 10) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
- 11) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah .
- 12) Program Penatagunaan Tanah .
- 13) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 14) Program Pengelolaan Pelayaran

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp. 48.066.036.596,- realisasi keuangan sebesar Rp. 42.854.859.672,- (89,2%) .

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun				
				2023	2022	2021	2020	2019
1	Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh	11,5	48,47	421,5%	612,4%	196%	-	-
2	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	83,3	81,43	98%	118%	96%	-	-
	Rata-Rata Capaian			260%	365%	96%	0%	0%

Sumber : Hasil Olahan (2023)



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa untuk indikator persentase pengurangan luas permukiman kumuh yang ditargetkan sebesar 11,5% terealisasi 48,47 dengan capaian yang sangat baik yaitu 421,5%.

Sedangkan untuk indikator persentase perumahan dan permukiman layak huni terealisasi yang ditargetkan sebesar 83,3% terealisasi 81,43% dengan capaian yang sangat baik yaitu 98% ..

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 indikator persentase pengurangan luas permukiman kumuh adanya kenaikan realisasi walaupun capaian sedikit menurun, karena target di tahun 2022 hanya 7,69% dengan realisasi 47,09% dengan capaian kinerja 612 %, . tahun 2021 indikator persentase pengurangan luas permukiman kumuh sebesar 42,81 % atau 196 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 21,81 %. Sedangkan untuk indikator persentase perumahan dan permukiman layak huni terealisasi sebesar 77,21 atau 96 % dari target sebesar 80,24 %.

Untuk memperoleh informasi terkait realisasi pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni, diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh dan Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni. perumahan dan permukiman layak huni, sebagai berikut :

a. Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh

Persentase Pengurangan Luas Pemukiman Kumuh dihitung dengan rumus:

% Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh =	$\frac{\text{Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani (Kumulatif)}}{\text{Total Luasan Kawasan Permukiman Kumuh}} \times 100\%$
---	---

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan menggunakan indikator/kriteria kumuh yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR, telah ditetapkan kawasan permukiman kumuh di Kota Pariaman dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman pada tahun 2014 dan diperbaharui kembali



pada tahun 2020. Dari SK Walikota Pariaman Nomor : 444/050/2014 tahun 2014 terdapat luasan kawasan kumuh yaitu seluas 109,41 Ha.

Penanganan pada kawasan permukiman kumuh telah dilakukan mulai tahun 2017 – 2019, yaitu seluas 76,99 Ha atau 70,37 % dari total luas kawasan kumuh yang tersebar di 12 Desa/Kelurahan pada 4 (empat) Kecamatan se-Kota Pariaman, dan menyisakan kawasan permukiman kumuh seluas 32,42 Ha, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh 2019

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nama kawasan	Luas/ Ha	Keterangan Pengurangan Kumuh				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Pariaman Tengah	Kampung Perak	Kampung Perak	7,23					
2		Pondok Duo							
3		Ujung Batung	Ujung Batung	24		9,6			
4		Rel Kereta Api				2,8			
5		Lohong	Kampung Kaliang	8,67		0,66			
6		Karan Aur	Karan Aur	7,62		8,06			
7		Pasir	Pasir	3,19	1,21				
8	Pariaman Selatan	Balai Kuraitaji	Pasar Kuraitaji	5,42		2,71			
9	Pariaman Selatan	Taluk	Pasir Sikadondong	32,99		11			
10	Pariaman Utara	Marunggi				25,44			
11		Pasir Sunur		0,15	3,17				
12		Naras Hilir	Naras	20,37			4,92		
13		Naras 1					4,74		
14	Balai Naras				2,3	0,23			
		JUMLAH		109,41	1,36	65,74	9,89		
		SISA KUMUH 2020		32,42		76,99			

Sumber : Korkot KOTAKU Pariaman (2022)

Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh yang ditangani sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 70,37 % :

% Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh s.d Tahun 2019 =	$\frac{76,99}{109,41} \times 100\% = 70,37\%$
--	---

Pada tahun 2020, kembali dilakukan pendataan ulang karena terindikasi adanya potensi lokasi kawasan kumuh baru, sehingga menambah luasan kawasan kumuh yang ditangani berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 277/050/2020 tahun 2020 adalah 184,36 Ha.

Dengan demikian total Luas kawasan kumuh yang akan ditangani adalah akumulasi luas kawasan kumuh hingga tahun 2019 (sesuai SK tahun 2014) yaitu 109,41 Ha ditambah luas kawasan kumuh baru (sesuai SK tahun 2020)



yaitu seluas 184,36 Ha, dikurangi dengan sisa luas penanganan hingga tahun 2019 seluas 32,42 Ha), sehingga diperoleh total luas kawasan kumuh pada tahun 2020 yaitu 261,35 Ha.

Kawasan kumuh yang ditetapkan tahun 2020 berada di 16 lokasi baru yang tersebar di 16 Desa/Kelurahan ditambah 6 lokasi lama sesuai SK Lokasi Kawasan Kumuh yang ditetapkan tahun 2014, sebagaimana tabel lokasi kawasan kumuh tahun 2020 berikut :

Tabel. 3.25
Lokasi Kawasan Kumuh Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama kawasan	Luas/Ha	PENGURANGAN KUMUH	
					2020	2021
1	Pariaman Utara	Balai Naras	Kawasan Naras	6.60 Ha	6,6	
2	Pariaman Utara	Tungka Selatan	Kawasan Tungka	10,84		
		Sikapak Barat				
3	Pariaman Utara	Manggung	Kawasan Manggung	13,4		
4	Pariaman Utara dan Pariaman Tengah	Ampalu	Kawasan Pauh barat- Ampalu	11,83		
		Apar				
		Pauh Barat			13,22	
5	Pariaman Tengah	Cimparuah	Kawasan cimparuah	19,62		
6	Pariaman Tengah	Jati hilir	Kawasan Jati	6,51		
7	Pariaman Tengah	Kampung Pondok	Kawasan Pondok	3,63		
8	Pariaman Tengah	Jawi-Jawi 1	Kawasan Jawi-Jawi	14.15		1,92
		Jawi-Jawi 2				
9	Pariaman Tengah	Karan Aur	Kawasan Pasie lohong dan sekitar	26,36		26,36
		Kp Perak				
		Lohong				
		Pasir				
		Pondok 2				
10	Pariaman Selatan	Palak Aneh	Kawasan Palak Aneh	12,81		
11	Pariaman Selatan	Pauh Kuraitaji	Kawasan Kuraitaji	7,08		
12	Pariaman Selatan	Punggung lading	Kaw Punggung lading	19,73		
13	Pariaman Timur	Kp Baru Padusunan	Kawasan padusunan	12,02		
14	Pariaman Selatan	Sungai Sirah	Kawasan Sungai Sirah	6,56		
		JUMLAH		184,36	6,6	28,28
		PENGURANGAN KUMUH		34,88	19%	
		SISA KUMUH 2022-2024		149,48	81%	

Sumber : Korkot KOTAKU Pariaman (2022)

Sedangkan total penanganan yang dilakukan pada tahun 2020 adalah seluas 6,6 Ha, dengan lokasi penanganan pada kawasan kumuh Naras berada di Desa Balai Naras. Sehingga akumulasi penanganan hingga tahun 2020 yaitu sebesar 76,99 Ha + 6,6 Ha yaitu sebesar 83,59 Ha. Dengan demikian



Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh yang ditangani sampai tahun 2020 adalah sebesar 31,98 % :

% Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh s.d Tahun 2020 =	$\frac{(76,99 + 6,6)}{261,35} \times 100\% = 31,98 \%$
--	--

Begitu juga dengan penanganan pada tahun 2021, dilakukan penanganan kawasan kumuh seluas 28,28 Ha, sehingga total luas penanganan kawasan kumuh hingga tahun 2021 adalah akumulasi penanganan 76,99 Ha + 6,6 Ha + 28,28 Ha, dengan total seluas 111,87 Ha. Dengan demikian persentase pengurangan luas permukiman kumuh hingga tahun 2021 adalah sebesar 42,80 %.

% Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh s.d Tahun 2021 =	$\frac{(76,99 + 6,6 + 28,28)}{261,35} \times 100\% = 42,80 \%$
--	--

Penanganan Kawasan Kumuh yang direncanakan untuk ditangani adalah seluas 13,22 Ha, namun target ini tidak dapat terealisasi seluruhnya, karena adanya kebijakan untuk efisiensi anggaran paca Pandemi Covid-19. Berdasarkan Berita Acara kesepakatan Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan kumuh Kota Pariaman nomor 600/1574/DISPEKIM-LH/2022 ditetapkan pengurangan sebesar 11,19 Ha dari Luasan kumuh berdasarkan SK No. 38/050/2022 dengan total luasan kumuh seluas 261,35Ha

Adapun kawasan kumuh yang ditangani adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.26
Nama Lokasi Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Yang ditangani (Ha)
1	Pariaman Utara	Desa Manggung	3,61
<i>Jumlah</i>			3,61

Dengan demikian pengurangan luas kawasan kumuh tahun 2023 seluas 3,61 Ha sehingga total luas penanganan kawasan kumuh hingga tahun 2023 adalah akumulasi penanganan 123,06 Ha + 3,61 Ha, dengan total



penanganan sampai tahun 2023 seluas 126,67 Ha. Dengan demikian persentase pengurangan luas permukiman kumuh hingga tahun 2023 adalah sebesar 48,47 %.

:Penurunan Luas Permukiman Kumuh	=	<u>Luas Kawasan Permukiman Kumuh(n) yang ditangani</u>	X	100%
		Luas Kawasan Permukiman Kumuh		
	=	<u>(123,06 + 3,61)</u>	X	100%
		261,35		
	=	48,47%		

Adapun Penanganan Kawasan Kumuh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pariaman Tahun 2019-2023

Tahun	Luas Kumuh Total (Ha)	Penanganan (Ha)	Kumulatif Penanganan	% Kumulatif Penanganan	Sisa Kumuh (Ha)	Penanganan Per Tahun %
2019	109,41	76,99	76,99	70,37%	32,42	70,37%
2020	261,35	6,6	83,59	31,98%	177,76	31,98%
2021	261,35	28,28	111,87	42,80%	149,48	15,91%
2022	261,35	11,19	123,06	47,09%	138,29	7,49%
2023	261,35	3,61	126,67	48,47%	134,68	2,61%

Sumber: Dinas PERKIMLH 2023

Beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh, antara lain:

1. kolaborasi penanganan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait, meliputi program sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, proteksi dan penanganan bahaya kebakaran, dan kegiatan terkait lainnya. Begitu juga adanya kolaborasi pendanaan penanganan kawasan kumuh yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
2. Selain itu adanya kebijakan Pemerintah Kota Pariaman terkait penggunaan dana desa untuk penanganan kawasan permukiman kumuh, dalam bentuk kegiatan penyediaan/perbaikan fasilitas publik, meliputi pengelolaan sampah, perbaikan jalan lingkungan maupun drainase lingkungan permukiman.



Faktor penghambat, yaitu adanya efisiensi anggaran 2023, sehingga berdampak terhadap beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

b. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Sedangkan terkait indikator Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni dilakukan pengukuran berdasarkan basis data jumlah rumah tahun 2018 yaitu sebanyak 17.748 unit rumah dikurang jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 3.403 unit (KOTAKU, 2020), sehingga diperoleh jumlah rumah layak huni yaitu sebanyak 14.345 unit. Dari jumlah rumah yang layak huni tersebut dilakukan pengukuran kembali tidak hanya didasarkan kepada variabel kondisi rumah yang layak huni, tetapi juga mempertimbangkan akses dan kondisi ketersediaan air minum yang layak serta sanitasi yang layak dan aman. Adapun capaian berdasarkan variabel dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28
Capaian Variabel Pembentuk Indikator Perumahan
Permukiman Layak Huni

Tahun	% Akses Sanitasi Layak Aman	% Akses Air Minum Layak	% Perumahan Layak Huni	% Perumahan dan Permukiman Layak Huni
2023	59,36	92,07	92,87	81,43
2022	54,98	91,80	92,44	79,74
2021	52,59	91,10	87,95	
2020	48,87	89,43	87,67	
2019	48,33	88,75	87,11	

Sumber : Dinas Perkim LH (2023)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian persentase masing-masing variabel pembentuk indikator Perumahan Permukiman Layak Huni mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

➤ Sanitasi Layak dan Aman

- Akses sanitasi layak ini terdiri dari akses layak dan akses aman, dimana Jumlah rumah yang mempunyai akses layak sebanyak 10.409 unit dan jumlah rumah yang berakses sanitasi aman sebanyak 2.097 unit.



- b. Tahun 2023 Pembangunan Tangki Septik Individual melalui dana Hibah Air Limbah Sanitasi (ALS) dari Kemeterian PUPR dilaksanakan pada 51 Desa yang tersebar di 4 Kecamatan dengan total rencana Pembangunan sebanyak 1.000 Unit/SR, realisasinya 890 unit/SR. Dengan terealisasi 890 unit/sSR, maka menaikkan jumlah rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak dan aman sebanyak 12.902 rumah tangga dari 17.748 unit rumah di Kota Pariaman.

Tahun 2023, rumah yang sudah terlayani akses sanitasi layak sebanyak 8.438 (47,54%) dan akses sanitasi aman sebanyak 2.097 Unit (11,82%) dari 17.748 unit jumlah total rumah di Kota Pariaman, sehingga realisasi persentase akses sanitasi layak dan aman hanya sebesar 59,36 persen.

➤ Akses Air Minum Layak

- a. Rumah Tangga yang sudah mendapatkan akses air minum layak sebanyak 16.341 unit (dengan asumsi satu RT ada 5 orang) atau 92,7% dari jumlah rumah keseluruhan 17.748 Unit.
- b. Konsep yang digunakan untuk rumah tangga yang sudah dapat akses air minum layak mengacu kepada metadata (Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air yang terlindungi, air perpipaan dan air hujan.

Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung.

➤ Perumahan layak Huni

- Rumah Tidak Layak Huni yang direhab tahun 2023, melalui program BSPS (Dana APBN) dapat menyelesaikan 76 Unit rumah RTLH. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tidak ada program/ kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian tersebut. Daftar nama desa/kelurahan penerima bantuan :
 1. Kecamatan Pariaman Selatan sebanyak 21 Unit
 2. Kecamatan Pariaman Tengah sebanyak 11 Unit



3. Kecamatan Pariaman Timur sebanyak 25 Unit

4. Kecamatan Pariaman Utara sebanyak 19 Unit

Total rumah tidak layak huni yang ditangani mulai dari tahun 2018-2023 adalah 2.138 Unit dari total 3.403 RTLH di Kota Pariaman, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.29
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

No	Tahun	Total Rumah (unit)	Total RTLH (unit)	RTLH Ditangani (unit)	Kumulatif RTLH Ditangani (unit)	RLH	(%)Rumah Layak Huni
1	2018	17.748	3.403	600	600	14.945	84,21%
2	2019	17.748	2.803	1.150	1.750	16.095	90,69%
3	2020	17.748	1.653	104	1.854	16.199	91,27%
4	2021	17.748	1.549	92	1.946	16.291	91,79%
5	2022	17.748	1.457	116	2.062	16.407	92,44%
6	2023	17.748	1.341	76	2.138	16.483	92,87%
7	2024	17.748	1.265	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perkim LH (2023)

- Pada awal tahun 2018 total rumah di Kota Pariaman berjumlah 17.748 unit rumah, merupakan rumah tidak layak huni berjumlah 3.403 unit, dengan rincian 1527 Unit berada di kawasan kumuh, 1.876 Unit berada di luar kawasan kumuh.
Rumah tidak layak huni yang telah ditangani di Tahun 2018 sebanyak 600 Unit melalui program DAK perumahan (APBN) Sebanyak 359 Unit dan Program BSPS (Provinsi) sebanyak 241 Unit sehingga jumlah RLH meningkat menjadi 14.945 (84,21%) dari total rumah.
- Tahun 2019, kondisi rumah tidak layak huni sebanyak 2.803 unit dari total jumlah rumah sebanyak 17.748, dan dilakukan penanganan rumah tidak layak huni adalah sebanyak 1.150 unit yang terdiri dari program BSPS, DAK perumahan swadaya dan, sehingga adanya peningkatan rumah layak huni menjadi 16.095 (90,69%).
- Tahun 2020 penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 104 unit, sehingga kondisi rumah tidak layak huni sudah berkurang menjadi 1.549 unit, sehingga rumah layak huni meningkat menjadi 16.199 (91,27%).



- Tahun 2021 penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 92 Unit sehingga rumah layak huni meningkat menjadi 16.291 (91,79%) dengan sisa rumah tidak layak huni 1.457 unit..
 - Tahun 2022 rumah rumah tidak layak huni yang dikerjakan berjumlah 116 Unit melalui program DAK Perumahan dan Baznas, sehingga rumah layak huni meningkat menjadi 16.407 (92,44%).
 - Tahun 2023 penanganan rumah tidak layak huni hanya 76 Unit sehingga rumah layak huni meningkat menjadi 16.483 (92,87%) dengan sisa rumah tidak layak huni berjumlah 1.265 unit.
- *Faktor pendukung berhasilnya pencapaian indikator kinerja ini adalah:*
Adanya dukungan dari pemerintah pusat berupa program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dari Balai Penyediaan Perumahan Sumatera III (APBN) dari pemerintah pusat untuk melakukan pengurangan rumah tidak layak huni, maupun pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat .
- *Faktor penghambat :*
- Penanganan rumah tidak layak huni yang ditangani adalah kategori rumah rusak berat sedangkan untuk kategori rusak sedang tidak ditangani. Kemungkinan rumah tidak layak huni bisa bertambah karena rumah yang tadinya dalam kategori rusak sedang pada tahun kedepannya jadi rusak berat.
 - Karena sifatnya swadaya masyarakat, sering terkendala dari kesiapan masyarakat itu sendiri untuk berswadaya, sehingga sebagian ada yang batal untuk dilanjutkan penanganan.
 - Ada rumah tidak layak huni berdiri bukan diatas tanah pribadi atau status kepemilikan tanah bukan hak milik pribadi, sehingga menjadi kendala untuk dilakukan penanganan, karena banyak yang tidak memenuhi kriteria

Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni
dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
% Pengurangan luas Permukiman Kumuh	%	51,49	-	-	21,8	7,69	11,5	-	-	42,81	47,09	48.87
% Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	83,33	-	-	80,2	78,19	83,3	-	-	77,21	92,44	81.43

Sumber : Hasil Olahan (2023)

Target akhir dari RPJMD indikator % Pengurangan luas Permukiman Kumuh dan indikator % Perumahan dan Permukiman Layak Huni tidak tercapai.

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun					
				2023	2022	2021	2020	2019	2018
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,06	56,80	89%	89%	93%	110%	73%	
	Rata-Rata Capaian			89%	89%	93%	110%	73%	

Dari tabel sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (IKH) dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan dengan target 63,60 dengan realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pariaman 56,80 (kategori sedang) dengan Capaian 88,67% , jika dibandingkan dengan tahun 2022 adanya penurunan nilai indek sebesar 6,8 poin dari 63,80.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pariaman Tahun 2023 sebesar 56,80, masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Pariaman yaitu 64,06. Target pada RPJMD Kota Pariaman ini juga berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, dimana dalam Surat Edaran tersebut target IKLH Kota Pariaman Tahun 2023 adalah 64,06.



IKLH dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dimana rendahnya nilai IKLH Kota Pariaman Tahun 2023 disebabkan oleh rendah nilai IKA yaitu 31,67 dengan target 55,99. Sementara nilai IKL sebesar 31,71 telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 27,96 dan nilai IKU sebesar 95,09 juga telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 90,98. Target nilai IKA, IKU dan IKL juga ditetapkan dalam RPJMD Kota Pariaman dan SE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain tidak mencapai target yang telah ditetapkan, nilai IKA Kota Pariaman Tahun 2023 juga mengalami penurunan dari tahun 2022, dimana nilai IKA tahun 2022 yaitu sebesar 33,33. Nilai IKA dihitung berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai dan talao Kota Pariaman yang dilakukan 2 kali dalam setahun pada 5 sungai (Batang Pariaman, Batang Pampan, Batang Cimparuh, Batang Kapau dan Batang Manggung) dan 3 talao (Talao Pauh, Talao Karan Aur dan Talao Manggung), adapun perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan dari Tahun 2019 -2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Indeks Kualitas Lingkungan dari Tahun 2019 -2023

No.	Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
I.	Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)	50	47,24 (Kurang)	59,88	60,78 (sedang)	63,13	54,93 (sedang)	63,60	56,35 (sedang)	64,06	56,80 (sedang)
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89	89,55	90	94,76	90,88	90,92	90,98	95,09	91,08	93,70
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	43	35,83	46	41,67	55,79	34,8	55,89	33,33	55,99	31,67
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	26	24,06	28	28,51	24,41	22,92	26,19	24,24	27,96	31,71

Rendahnya nilai IKA Kota Pariaman pada tahun 2023 ini disebabkan sebagai berikut :



- a. beban pencemaran sungai tidak hanya berasal dari sumber pencemar di Kota Pariaman, namun juga dari Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disebabkan karena sungai yang mengalir di Kota Pariaman berhulu di Kabupaten Padang Pariaman, dan sungai tersebut telah tercemar sebelum memasuki wilayah Kota Pariaman.
- b. penambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan dengan upaya penurunan beban pencemaran terutama terkait penurunan beban pencemaran dari kegiatan rumah tangga.
- c. Izin pembuangan limbah usaha dan/atau kegiatan belum efektif karena belum mempertimbangkan daya tampung beban pencemaran.
- d. Secara umum upaya pengendalian pencemaran air yang telah dilakukan belum maksimal dan efektif dalam menurunkan beban pencemaran sampai tingkat yang memadai.

Nilai IKL Kota Pariaman Tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan dan jika dibandingkan dengan nilai IKL tahun 2022 yaitu 24,24, maka nilai IKL Tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kualitas lahan Kota Pariaman yang cukup drastis yaitu sebesar 7,47 point. Peningkatan nilai IKL ini disebabkan karena peningkatan luasan RTH yang terdeliniasi setelah diadakannya Bimbingan Teknis oleh P3E Sumatera KLHK, dimana ada beberapa kawasan yang sebelumnya tidak termasuk dalam deliniasi yang terhitung sebagai RTH namun ternyata dapat dihitung sebagai RTH. Kota Pariaman tidak memiliki hutan, sehingga IKL Kota Pariaman dihitung dari luas RTH yang memiliki vegetasi yang menutupi lahan RTH tersebut (tutupan vegetasi non hutan), karena tidak semua RTH di Kota Pariaman yang memiliki tutupan vegetasi. Penghitungan IKL dilakukan dengan mendeliniasi RTH tersebut menggunakan *Google Earth* yang kemudian diinput pada aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Nilai IKU Kota Pariaman Tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2022 yaitu 95,09, nilai IKU tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,39 point. Berdasarkan tren data capaian nilai IKLH (IKA, IKU dan IKL) menunjukkan bahwa capaian nilai IKU Kota Pariaman setiap tahunnya telah mencapai bahkan melebihi



target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sumber emisi dari industri, sumber emisi hanya berasal dari transportasi dan aktifitas masyarakat skala rumah tangga dan masih banyaknya vegetasi yang mampu menyerap polutan-polutan yang ada di udara ambien. Terjadinya fluktuasi nilai IKU setiap tahunnya juga dipengaruhi oleh cuaca (hujan) dan juga bencana alam seperti kebakaran hutan dan erupsi gunung merapi.

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut memiliki indikator keluaran berupa tersusunnya :

1. Dokumen pemantauan kualitas air (48 titik pemantauan),
2. Dokumen pemantauan kualitas udara (12 titik pemantauan),
3. Dokumen inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air (Sungai Batang Pariaman).

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. mendapatkan data kualitas air permukaan, sehingga dapat dihitung Indeks Kualitas Air (IKA);
2. mendapatkan data kualitas udara ambien/emisi, sehingga dapat dihitung Indeks Kualitas Udara (IKU);
3. mendapatkan hitungan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk urusan Lingkungan Hidup
4. mendapatkan data yang akurat tentang kualitas lingkungan dan sumber-sumber pencemar yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan sebagai upaya pengendalian terhadap pencemaran air di Kota Pariaman;
5. memberikan gambaran secara umum dan instrumen pemerintah atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Pelaksanaan pemantauan kualitas air ini bekerja sama dengan UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Perkim LH Kota Pariaman, dengan tahapan pelaksanaan:

1. pengambilan sampel dilapangan
2. pengujian/ analisa laboratorium
3. evaluasi hasil analisa laboratorium
4. penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Pariaman, dimana nilai IKA salah satu komponen dalam penghitungan nilai IKLH.

Pengujian kualitas air (sungai, talao dan laut) dilaksanakan 2x periode pengambilan dengan masing-masing periode sebanyak 24 titik sehingga total titik sampling air yaitu 48 titik. Lokasi pengambilan sampel untuk tersebut adalah :

- Batang Pariaman (3 titik : hulu, rentang dan hilir)
- Batang Pampan (3 titik : hulu, rentang dan hilir)
- Batang Cimparuh (3 titik : hulu, rentang dan hilir)
- Batang Manggung (3 titik : hulu, rentang dan hilir)
- Batang Kapau (3 titik : hulu, rentang dan hilir)
- Laut Sunur (2 titik : jarak 50 m dan 100 m dari bibir pantai)
- Laut Gandorah (2 titik : jarak 50 m dan 100 m dari bibir pantai)
- Laut Padang Birik-Birik (2 titik : jarak 50 m dan 100 m dari bibir pantai)
- Talao di Karan Aur (1 titik)
- Talao di Pauh (1 titik)
- Talao di Manggung (1 titik)

Pelaksanaan pemantauan kualitas udara ini bekerja sama dengan UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Perkim LH Kota Pariaman, dengan tahapan pelaksanaan:

- 1) pengambilan sampel dilapangan
- 2) pengujian/ analisa laboratorium
- 3) evaluasi hasil analisa laboratorium
- 4) penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Pariaman, dimana nilai IKU juga merupakan salah satu komponen dalam penghitungan nilai IKLH



Pada tahun 2023 pemantauan kualitas udara dilakukan 1 x periode pengambilan, sebanyak 12 titik untuk udara ambien, dengan rincian sebagai berikut :

- A. Kawasan Perkantoran
 - 1. Balaikota Pariaman
 - 2. Dinas PerkimLH Kota Pariaman
 - 3. Kantor Bersama Karan Aur
- B. Kawasan Perumahan
 - 1. Perumahan Rawang
 - 2. Perumahan Jalan Baru
 - 3. Perumahan Balai Naras
- C. Kawasan Industri/ Perdagangan/ Jasa
 - 1. Pasar Pariaman
 - 2. RSUD Pariaman
 - 3. TPAS Tungkal Selatan
- D. Kawasan Transportasi
 - 1. Depan Kantor Camat Pariaman Utara
 - 2. Simpang DLLAJ
 - 3. Simpang Jati

Pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, dengan tahapan pelaksanaan yaitu pengambilan sampel dilapangan dan pengujian/ analisa laboratorium. Sedangkan untuk evaluasi hasil analisa laboratorium dan penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan sendiri dari hasil pengujian/analisa laboratorium (laporan hasil uji) yang dikeluarkan oleh UPTD. Laboratorium Lingkungan, yang ditampilkan berupa dokumen/laporan, yaitu Laporan Kualitas Air Kota Pariaman Tahun 2023.

Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan kualitas lingkungan air permukaan (sungai, laut dan talao) Kota Pariaman Tahun2023 mulai dari pengambilan sampel di lapangan, hasil pemeriksaan di laboratorium dan



evaluasi hasil analisa serta penghitungan IKA dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian besar air permukaan (sungai, laut dan talao) di Kota Pariaman berdasarkan pemantauan berada pada kondisi tercemar, bahkan beberapa parameter telah berada pada kondisi tercemar berat terutama parameter mikrobiologi yaitu *Fecal coliform*.
2. Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Pariaman Tahun 2023 menunjukkan penurunan sebesar 1,66 terhadap Tahun 2022, dimana IKA Tahun 2023 sebesar 31,67 sedangkan IKA Tahun 2022 sebesar 33,33.
3. Berdasarkan penghitungan Indeks Pencemaran, kualitas air sungai di Kota Pariaman telah berada pada status tercemar yaitu tercemar ringan, tercemar sedang dan tercemar berat dan belum ada sungai di Kota Pariaman yang berada pada status baik (memenuhi baku mutu).
4. Tercemarnya air sungai Kota Pariaman sudah terlihat dari hulunya, dimana hulu seluruh sungai di Kota Pariaman berada pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sehinggasingai-sungai tersebut telah tercemar sebelum memasuki Kota Pariaman.
5. Tingginya kadar zat pencemar tersebut disebabkan oleh sistem sanitasi masyarakat, dimana saluran pembuangan limbah rumah tangga langsung ke badan air karena masih minimnya keberadaan IPAL Komunal.
6. Tingginya kadar zat pencemar pada air laut diindikasikan berasal dari air sungai karena setiap sungai akhirnya bermuara ke laut. Apabila sungai itu sendiri sudah tercemar air laut pun akan ikut tercemar.
7. Pencemaran yang terjadi pada air permukaan tersebut sedikit banyaknya akan mempengaruhi ekosistem dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang memanfaatkan air tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemantauan Kualitas Udara Pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, dengan tahapan pelaksanaan: pengambilan sampel dilapangan dan pengujian/ analisa



laboratorium. Sedangkan untuk evaluasi hasil analisa laboratorium dan penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan sendiri dari hasil pengujian/analisa laboratorium yang dikeluarkan oleh UPTD. Laboratorium Lingkungan, yang ditampilkan berupa dokumen/laporan, yaitu Laporan Kualitas Udara Kota Pariaman Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan pada 12 lokasi titik pantau di Wilayah Kota Pariaman dengan 10 Parameter Pengujian yaitu Parameter SO_2 , NO_2 , O_3 , CO, Pb, TSP, PM_{10} , $PM_{2.5}$, Hidrokarbon dan Tingkat Kebisingan dapat disimpulkan bahwa Parameter SO_2 , NO_2 , O_3 , Pb, HC, TSP, $PM_{2.5}$ dan PM_{10} telah memenuhi baku mutu yang ditentukan dalam lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk parameter yang tidak memenuhi standar baku mutu adalah tingkat kebisingan untuk beberapa lokasi.
2. Parameter tingkat Kebisingan yang tidak memenuhi baku mutu yaitu Perumahan Jalan Baru dan Perumahan Balai Nareh. Baku tingkat kebisingan di Kawasan Perumahan/ Permukiman agak lebih ketat dibanding untuk kawasan lainnya. Tingginya Tingkat Kebisingan disebabkan oleh :
 - a. suara yang dihasilkan dari kendaraan bermotor terutama dari mesin kendaraan, knalpot, klason serta akibat interaksi antara roda dengan jalan;
 - b. aktivitas masyarakat berupa usaha/kegiatan dilingkungan sekitar titik pantau
3. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Pariaman Pada Tahun 2023 adalah sebesar 93,70 (Kategori Sangat Baik) dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 91,08. Sedangkan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tingkat Propinsi Sumatera Barat sebesar 90,53 (Kategori Sangat Baik).



Penyusunan Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar ini menggunakan jasa pihak ketiga berupa Jasa Konsultasi Penelitian, dimana yang terpilih adalah PT. Wangsadhita Perdana Konsultan. Objek perairan dalam penyusunan dokumen ini adalah Sungai Batang Pariaman.

Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar perairan Sungai Batang Pariaman dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sungai Batang Pariaman adalah sungai terpanjang dari 3 sungai di Kota Pariaman yaitu dengan panjang 12 km, yang berada pada Kecamatan Pariaman Timur dan Pariaman Tengah.
2. Desa/Kelurahan yang dilewati dengan luas pengaruh 500 m dari tepi sungai adalah sebanyak 13 desa/kelurahan.
3. Hasil inventarisasi sumber pencemar Sungai Batang Pariaman sepanjang 12 km ditemukan terdapat sebagian besar sumber pencemar adalah dari limbah rumah tangga/ pemukiman.
4. Total beban pencemaran untuk parameter BOD sebesar 2,42 ton/tahun sedangkan parameter COD sebesar 13,56 ton/tahun dan TSS sebesar 25,17 ton/tahun.
5. Perlu beberapa program yang strategis dalam pengelolaan kualitas air sungai Batang Pariaman secara khusus dan Kota Pariaman secara umum, diantaranya :
 - ◆ Penyusunan *Master Plan* Sistem Pengelolaan Air Limbah Daerah (SPALD) Kota Pariaman;
 - ◆ Pembangunan IPAL baik secara komunal maupun individual;
 - ◆ Pembangunan bendungan, kincir air dan pengerukan sedimen di saluran dengan standar teknis desain sebagai upaya pemulihan kualitas perairan dengan cara meningkatkan transfer oksigen ke dalam air untuk mendukung proses *self purification* pada aliran serta penguatan Kota Pariaman sebagai *Water Front City*.
 - ◆ Peningkatan frekuensi kegiatan pengawasan dan penegakan hukum.



- Terbatasnya SDM untuk menganalisa sampel air permukaan Tidak tersedianya sarana transportasi untuk mencapai lokasi titik pengambilan sampel air permukaan.
- Nilai IKA Kota Pariaman tahun 2019 tidak bisa dicapai sesuai target IKA tahun 2019 yaitu 43. Karena untuk mendapatkan nilai IKA Kota Pariaman, pemantauan dalam setahun dilakukan maksimal 5 kali pemantauan dengan 7 parameter wajib, seperti DO, BOD, COD, pospat, total coli, e-coli dan TSS
- frekuensi pengujian sampel ideal dilakukan 5 kali dalam 1 tahun, tetapi yang dapat dilakukan pada tahun 2018 hanya 2 kali 1 tahun.
- Efisiensi sumber daya manusia untuk pencapaian indikator kinerja Indeks lingkungan Kualitas Lingkungan Hidup ini melibatkan Bidang P2KLH sebanyak 5 orang PNS dan UPT. Laboratorium Lingkungan (sebanyak 8 orang PNS dan tenaga honor sebanyak 12 orang).

Solusinya yang dapat ditempuh untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah :

- Untuk kelengkapan sarana prasarana perlu dukungan dana DAK dan APBN diusulkan pada tahun berikutnya.
- Untuk efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun 2021, diharapkan pada tahun berikutnya tidak terjadi lagi.
- Meskipun demikian untuk indeks kualitas air Kota Pariaman dengan angka 34,8 tersebut masih belum memenuhi baku mutu.
- Dalam mewujudkan indikator kinerja dimanfaatkan sumber dana dari APBD.

Realisasi Capaian Indeks Kualitas Lingkungan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023, dapat dilihat pada tabel:



Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Kualitas Lingkungan
dengan target akhir RPJMD 2018-2023.

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN						REALISASI				
	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan	64,06	64,42	55	59,10	63,60	64,06	47,2	60,29 (Kurang)	54,93 (Waspada)	56,35 (Kategori Sedang)	56,80

Program yang mendukung sasaran ini adalah:

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Regional;
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 3) Program Pengembangan Permukiman;
- 4) Program Pengembangan Perumahan;
- 5) Program Kawasan Permukiman;
- 6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.;
- 7) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 8) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- 9) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 10) Program Permbinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 11) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
- 12) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 13) Program Pengelolaan Persampahan
- 14) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran yang dialokasikan untuk 2 sasaran ini, yaitu sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni, dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan adalah sebesar Rp. 29.295.099.960,- dengan realisasi Rp. 27.740.725.921,- atau 77,63%.

Sasaran 4 Meningkatnya Mitigasi Bencana

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun				
						2023	2022	2021	2020	2019
1	Indeks Resiko Bencana	171	Tinggi	158,28	Tinggi	93%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata capaian					93%	100%	100%	100%	100%

Indonesia yang terletak dikawasan Cincin Api Pasifik memang memiliki potensi alam yang tinggi, dimana Indonesi tidak henti-hentinya ditimpa musibah bencana, baik itu gempa, tanah longsor, banjir, tsunami maupun gunung meletus. Provinsi Sumatera Barat berada diantara dua lempeng besar (Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo Australia) dan Patahan Semangko. Didekat pertemuan lempeng terdapat patahan Mentawai. Ketiganya merupakan daerah Seismik aktif. Menurut catatan ahli gempa, Wilayah Sumatera Barat memiliki siklus 200 tahun gempa besar yang pada awal abad 21 telah memasuki masa berulangnya siklus.

Kota Pariaman salah satu Kota di Sumatera Barat yang terletak didaerah pantai dan merupakan daerah zona merah bencana alam karena letak Geografis Kota Pariaman yang memanjang di sepanjang Pantai Barat Sumatera yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti Gempa yang terjadi di tahun 30 September 2009 yang berkekuatan 7.6 skala richter yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban dari bencana tersebut.

Penanganan bencana di dunia telah mengalami perubahan paradigma yaitu dari responsif menjadi preventif, dari sektoral menjadi multi sektor, dari tanggung jawab pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama, dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana .

Pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting karena :

- 1) bencana adalah masalah yang kompleks yaitu dari faktor lingkungan hingga pembangunan;
- 2) kesiapan secara konvensional perlu, namun belum lengkap dan menyeluruh;



3) pemaduan dan pengarustamaan pengurangan risiko bencana dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sehari-hari memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Daerah merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.

Komponen penyusun indeks resiko bencana terdiri atas tiga komponen yaitu indeks kapasitas, kerentanan dan ancaman. Oleh karenanya dengan Indeks Ketahanan Daerah yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya indeks resiko bencana di daerah.

Dari Indeks Ketahanan Daerah, maka Kota Pariaman mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk menurunkan resiko.

Kota Pariaman mempunyai 10 potensi terhadap ancaman bencana seperti: gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, longsor, angin puting beliung, abrasi pantai, penyakit epidemik, kebakaran lahan dan perumahan serta kegagalan teknologi.

Dari 10 potensi bencana yang ada tersebut, yang paling besar risikonya adalah gempa bumi dan tsunami, karena menimbulkan kerusakan yang cukup besar, untuk itu kita perlu memperbanyak tanaman di sepanjang pantai Pariaman, seperti pohon pinago, kelapa dan lainnya sehingga dapat meminimalisasi dampak tsunami apabila terjadi di Kota Pariaman.

Kota Pariaman berada di zona merah kawasan rawan bencana. “Untuk itu Pemerintah daerah dan masyarakat perlu menyiapkan diri dalam menghadapi bencana. Baik prabencana, saat terjadi bencana maupun pascabencana.”

Oleh karena itu Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan pemeliharaan plang evakuasi tsunami sebanyak 20 buah yang dipasang di beberapa Desa/Kelurahan yang terdiri dari Desa Pauah Barat, Desa Cimparuah, Desa Sunur, Desa Taluak dan beberapa Kelurahan yaitu di Kelurahan Kampung Pondok, Kelurahan Pasir, Kelurahan Lohong, Kelurahan Karan Aur, dan Kelurahan Alai Gelombang.



Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menaggulangi resiko bencana, yaitu: pembuatan peta rawan dan peta resiko antara lain:

- 1) mengidentifikasi wilayah yang dianggap memiliki resiko tinggi terjadinya bencana alam, dan
- 2) mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi wilayah untuk selanjutnya melakukan persiapan rencana pengelolaan bencana wilayah.

Indeks Ketahanan Daerah dapat diukur dengan 71 indikator yang tertuang dalam 6 kegiatan yaitu, penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian resiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, kawasan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana.

Capaian Indikator dari sasaran Meningkatkan Mitigasi Bencana jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatkan Mitigasi Bencana dengan
target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Resiko Bencana	Kategori	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	158,28

Adapun alokasi Anggaran untuk mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp. 3.393.498.056,- dengan realisasi Rp. 3.123.313.651,- (92,04%) .

Program yang mendukung sasaran ini:

- 1) Program Penanggulangan Bencana
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 3) Program Penanganan Bencana



Sasaran 5 Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman Dalam Kehidupan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun				
				2023	2022	2021	2020	2019
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	70,4	93,00	132%	123%	95%	-	-
	Rata-rata capaian			132%	123%	95%	-	-

Sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan Masyarakat dengan terdapat satu Indikator, yaitu Indeks Ketentraman dan Ketertiban target 70,4 realisasi 93 dengan capaian 132%.

Indeks Ketentraman dan Ketertiban adalah sebuah indeks yang menggambarkan pencapaian dan tingkat ketentraman dan ketertiban. Indeks ini dapat dihitung dengan menganalisis beberapa kegiatan yang berpengaruh secara langsung terhadap Penegakan Ketentraman dan Ketertiban, dalam formula penghitungannya indikator ini diperoleh dari :

1.	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	=	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Target Kasus K3 yang terjadi}}$	X	30%
2.	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	=	$\frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman yg ditangani}}{\text{Target gangguan ketertiban umum dan ketentraman yang terjadi}}$	X	30%
3.	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	=	$\frac{\text{Jumlah Pol PP yang terlatih}}{\text{Jumlah Pol PP}}$	X	20%
4.	Persentase desa/kelurahan yg melaksanakan perlindungan masyarakat	=	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan perlindungan masyarakat}}{\text{Jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan perlindungan masyarakat}}$	X	20%

1) Jumlah Kasus Pelanggaran K3 yang Diselesaikan

Output jumlah Perda yang ditegakkan ini didapat dari kegiatan Operasional Penegakan Perda, kegiatan ini dilaksanakan berupa operasional lapangan dalam bentuk razia, penertiban dan eksekusi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda di wilayah Kota Pariaman. Kegiatan razia dilakukan untuk penegakan Perda yang berhubungan razia pelajar yang berkeliaran diwaktu jam sekolah, razia warnet, razia IMB dan kegiatan lain yang menyangkut Perda K3.



Kegiatan penertiban dilakukan untuk penegakan Perda K3 seperti penertiban PKL, IMB, Orgen Tunggal (didalam Perda Kota Pariaman Orgen Tunggal yang main di malam hari hanya diperbolehkan sampai pukul 00.00 WIB, pakaian biduanitanya harus sopan dan sesuai dengan norma yang berlaku di daerah Kota Pariaman), dan kegiatan lain yang berhubungan dengan K3. Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap pelanggar Perda yang terjaring dalam kegiatan operasional Satpol.PP. Kegiatan eksekusi dilakukan terhadap masalah yang telah diproses oleh PPNS Perda yang ada 11 Peraturan Daerah yang ditegakkan, 11 Perda dilaksanakan penegakkannya.

Pada tahun 2023 output jumlah Kasus yang ditangani secara yustisi terletak pada realisasi kegiatan wasmat litrik, penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran Perda. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran Perda secara Yustisi, yaitu penyelesaian yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Jadi penyelesaian kasus pelanggaran Perda dengan keputusan Hakim. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 0 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 3 kasus. Hal ini dikarenakan kegiatan ini bersifat situasional sehingga tidak semua kasus pelanggaran yang diselesaikan dengan yustisi.

Output jumlah kasus non yustisi ini didapat dari kegiatan penyelesaian pelanggaran perda secara non yustisi, kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran Perda secara Non Yustisi, yaitu berupa pembinaan dan mediasi terhadap personil pelanggar Perda yang diselesaikan dengan keputusan Kepala Satpol. PP saja. Kegiatan ini lebih diutamakan pelaksanaannya daripada yustisi. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 55 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 50 kasus. Hal ini dikarenakan meningkatnya kasus pelanggaran Perda yang harus diselesaikan secara Non Yustisi.

Capaian Sub Indikator 1

$$\text{Sub Indikator 1} = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Target Kasus K3 yang terjadi}} \times 30\%$$



Sub Indikator 1. $(55/50) \times 30\% = 17\%$

2) Jumlah Kasus Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Output Jumlah Kasus Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menganalisa beberapa kegiatan yang berpengaruh secara langsung terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, paling banyak pelanggaran meliputi Perda 10 Tahun 2013 tentang Penyakit masyarakat, Perda 10 Tahun 2018 Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Output jumlah Perda yang ditegakkan ini didapat dari kegiatan Operasional Penegakan Perda, kegiatan ini dilaksanakan berupa operasional lapangan dalam bentuk razia, penertiban dan eksekusi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Pariaman. Kegiatan razia dilakukan untuk penegakan Perda yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan maksiat. Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap pelanggar Perda yang terjaring dalam kegiatan operasional Satpol.

PP. Kegiatan eksekusi dilakukan terhadap masalah yang telah diproses oleh PPNS..

$$\text{Sub Indikator 2} = \frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman yg ditangani}}{\text{Target gangguan ketertiban umum dan ketentraman yang terjadi}} \times 30\%$$

$$\text{Sub Indikator 2.} = 198 / 160 * 30 \% = 37\%$$

3) Persentase Peningkatan Kapasitas Pol PP

Eksistensi satuan polisi pamong praja (satpol pp) merupakan salah satu kekuatan terdepan yang diandalkan sebagai perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah sesuai dgn peraturan perundang-undangan



yang berlaku, satuan polisi pamong praja dituntut harus memahami dasar hukum dan pijakan tupoksinya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman telah memberikan Bimbingan Teknik Peningkatan Kapasitas bagi para anggota Satpol PP. Bimtek ini sudah berlangsung mulai dari tahun 2018 s/d 2022 di Secata Padang Panjang bagi ASN dan di Kota Pariaman bagi Banpol PP, sebanyak 26 orang ASN dari 38 orang sudah mengikuti pendidikan dasar pol pp, pengamanan VIP, pelatihan kebencanaan, Informan, dan penyidik, dan sebanyak 123 orang Non ASN yang tergabung dalam Banpol PP sudah mengikuti latihan dasar Pol.PP. Dari pelaksanaan bimteknya ada beberapa materi yang disampaikan, diantaranya peran Linmas dan Satpol PP, mekanisme dan prosedur tindakan represif non yustisial, teknik komunikasi, negoisasi dan mediasi penanganan unjuk rasa, SOP penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, dengan bekal yang diberikan, para anggota Satpol PP bisa meningkatkan pengetahuannya, lebih trampil dan lebih professional. Namun ditahun 2023 karena anggaran devisa, maka untuk peningkatan kapasitas pol PP diadakan secara internal.,

Capaian Sub Indikator 3.

$$\text{Sub Indikator 3.} = \frac{\text{Jumlah Pol PP yang terlatih}}{\text{Jumlah Pol PP}} \times 20\%$$

$$\text{Sub Indikator 3.} = 149 / 161 * 20 \% = 19 \%$$

4) Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu : Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk



melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Satuan Perlindungan Masyarakat, pada desa dan kelurahan di Kota Pariaman memakai istilah Dubalang (bahasa daerah), satuan perlindungan masyarakat/dubalang sudah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan yang terdiri dari 71 desa dan kelurahan.

Capaian Sub Indikator 4.

$$\text{Sub Indikator 4} = \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan perlindungan masyarakat}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 20\%$$

$$\text{Sub Indikator 4.} = 71 / 71 * 20 \% = 20 \%$$

Hasil Indeks Ketentraman dan Ketertiban (IKK) :

Sub Indikator 1 + Sub Indikator 2 + Sub Indikator 3 + Sub Indikator 4.

$$\text{Hasil IKK : } 17\% + 37 + 19 + 20,00 = 93$$

Capaian Indikator dari sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan Masyarakat dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.34

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Terwujudnya Rasa Tertib dan Aman dalam Kehidupan Masyarakat dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	70,4	-	-	66,7	68,5	70,4	-	-	63,49	84,4	93

Dari Perbandingan realisasi ini dapat dilihat, bahwa target diakhir RPJMD Indeks Ketentraman dan Ketertiban adalah 70,4 sedangkan realisasi tahun 2023 baru 92 telah melampaui target sebesar 21,6.

Program yang mendukung sasaran ini adalah:

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- 3) Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Piolitik



- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
- Anggaran untuk mendukung sasaran ini Rp. 4.152.700.858,- dengan realisasi Rp. 3.814.274.907,- (91,85%)

MISI V: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif yang berbasis Lokal

**Sasaran 1
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun				
				2023	2022	2021	2019	2018
1	% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,59%	15,47%	99,2%	100,1%	66%	-	-
Rata-rata capaian				99,2%	100,1%	66%	-	-

Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan indikator % Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan target 15,43 terealisasi 15,47% dengan capaian 99,2%, hal ini mengalami kenaikan dari Tahun 2022, dimana sektor perdagangan menyumbang 15,45 % dari total PDRB Kota Pariaman

Defenisi operasional persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah Perbandingan Jumlah Kontribusi dari Sektor Perdagangan dibagi dengan total PDRB di kali 100 %.

Kontribusi dari Sektor Perdagangan terhadap PDRB Pariaman yang dikeluarkan oleh BPS Kota Pariaman, sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam peningkatan PDRB Kota Pariaman selain sektor pertanian dan sektor konstruksi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan sektor perdagangan:

1. melakukan operasi pasar;
2. pemberian bantuan sarana dan prasarana perdagangan kepada pelaku usaha;



3. pemberian bantuan modal;
4. memberikan pelatihan keterampilan usaha bagi UMKM dan IKM;
5. membantu pelaku usaha dalam mempromosikan dan memasarkan produk yang mereka hasilkan.

Dampak dari Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman kepada para pelaku usaha secara riil cukup memberikan pengaruh yang signifikan.

Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan
Terhadap PDRB dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15,59	-	-	22,5	15,43	15,59	-	-	14,90	15,45	15,47

Program yang mendukung sasaran ini, antara lain:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
9. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Dengan jumlah Anggaran Rp. 9.692.009.467,- dengan realisasi Rp. 8.976.448.865,- (92,62%)



Sasaran 2 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun				
				2023	2022	2021	2020	2019
1	% Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	18,01%	17,67%	98,1%	97%	97%	-	-
Rata-rata capaian				98%	97%	97%	-	-

Sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan indikator Parsentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan target 18,01% terealisasi 17,67% dengan capaian 98,1%.

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB tahun 2023 ini sedikit menurun dari tahun 2022 dimana realisasi 17,73.

Pencapaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 17,67% dari keseluruhan PDRB Kota Pariaman tahun 2023 menjadikan sektor pertanian penyumbang PDRB terbesar dari pada sektor lainnya. Sumber data yang sama menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar PDRB Kota Pariaman sudah bertahan selama lima tahun terakhir.

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Pariaman masih didominasi pertanian. Hal ini juga didukung dengan banyaknya kegiatan yang mendukung pertanian ini yaitu pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang masing-masing bidang ini juga memiliki kegiatan yang beragam.

Adapun perbandingan Data Produksi Pertanian Tahun 2020 -2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.36
Data Produksi Pertanian Tahun 2020-2023

NO	KOMODITI PERTANIAN	REALISASI			
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Produksi Padi (ton)	26.799	25.180	26.092	26.274
2.	Produksi Kelapa (ton)	2.694,17	2.870	3.057,66	2.917,55
3.	Produksi Cabe (kuintal)	269,42	613	1.534,15	1.284,20
4.	Produksi Perikanan (ton)	6.206	6.230	6.658,61	6.337,73
5.	PETERNAKAN (ton)	633.078	533.731	538.261	541,687

Dari 5 komponen pendukung capaian produksi pertanian capaian produksi tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian produksi 3 tahun terakhir fluktuatif atau naik turun jumlah produksi.

Penyebab tidak tercapainya target adalah:

1. Produksi Pertanian Khususnya Padi

produksi padi dari Tahun 2020 - 2023 terjadi fluktuasi produksi, dimana tahun 2022, 2023 produksi padi naik sebanyak 182 ton dari produksi tahun 2022, sedangkan di tahun 2022 naik 912 ton dari produksi tahun 2021, sedangkan di tahun 2021 produksi padi turun sebanyak 1.619 ton dari tahun 2020.

Terjadinya kenaikan produksi padi, disebabkan :

- 1) adanya gerakan pengendalian hama;
- 2) penerapan teknologi, intensifikasi pertanian serta program penyuluhan;
- 3) Peningkatan luas panen padi dari 4.461 ha menjadi 4.542 ha (1,82%).

2. Produksi Kelapa

Produksi **kelapa** sebagai salah satu komoditi unggulan pada perkebunan mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan dari 3.057,66 ton di tahun 2022 menjadi 2.917,55 ton di tahun 2023..

3. Produksi Cabe

Pada sektor Hortikultura juga terjadi peningkatan juga terjadi penurunan dari produksi sebesar 1534,15 kwintal di tahun 2022 menjadi 1.284,20 kuintal di tahun 2023 Hal ini disebabkan kondisi cuaca ekstrim yang berdampak ke pada gagal panen.



4. Produksi Perikanan

Produksi perikanan terdiri dari dua komponen yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap belum mencapai target sedangkan untuk perikanan budidaya dapat dicapai.

Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh musim dan cuaca yang ekstrim, dan juga sarana dan parasarana penangkapan serta sumberdaya ikan di perairan Kota Pariaman. Keterbatasan alat penangkapan dan populasi ikan yang sudah mulai menurun menyebabkan produksi perikanan tangkap cenderung tetap.

Keberhasilan produksi perikanan budidaya didukung dengan penyuluhan yang selalu mendampingi setiap kegiatan budidaya serta didukung juga kegiatan restocking perairan air tawar.

Untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan mengusahakan pemenuhan alat tangkap yang baik dan usulan penanaman rumputan buatan.

5. Produksi Peternakan

produksi daging khususnya daging sapi pada tahun ini mengalami kenaikan produksi dari 538,261 ton ditahun 2022 menjadi 541,687 ton di tahun 2023.

Meningkatnya hasil produksi ini karena adanya peningkatan jumlah pemotongan sapi yang tercatat untuk penghitungan jumlah produksi daging sapi.

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan sasaran ini adalah:

- Gerakan Pengendalian Hama
- Pemberian Bantuan Pestisida
- Pergantian variatas bibit dari 42 ke bujang marantau
- penyuluhan kepada para petani dalam kegiatan pasca panen.
- mendampingi setiap kegiatan budidaya; serta
- peningkatan usaha restocking perairan air tawar.

Tabel 3.37

**Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian
Terhadap PDRB dengan target akhir RPJMD 2018-2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
% Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	18,67	-	-	22,5	18,57	18,01	-	-	14,90	17,73	17,67

Program yang mendukung sasaran ini, antara lain:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
4. Program Pengelolaan Ikan Tangkap.
5. Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya.
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
8. Program Peyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
11. Program Penyuluhan Pertanian
12. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung sasaran ini berjumlah Rp16.485.378.568,- dengan realisasi Rp. 15.871.612.832,- (96,28%)

**Sasaran 3
Meningkatnya Investasi**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun				
				2023	2022	2021	2020	2019
1	%pertumbuhan Investasi	2,20	(0,11)	-5%	39%	-1100%	49%	1067%
	Rata-rata capaian			-5%	39%	-1100%	49%	1067%

Dari tabel sasaran Meningkatnya investasi dengan Indikator Persentase Pertumbuhan Investasi target 2,20 dengan realisasi - 0,11



dengan capaian -6% , disini dapat dilihat tidak ada pertumbuhan investasi di Kota Pariaman.

Persentase pertumbuhan investasi dihitung dari realisasi nilai investasi, dimana nilai investasi pada tahun 2023 Rp 52.196.905.043,- lebih rendah dari nilai investasi tahun 2022 dengan Rp. 58.779.773.706,- sedangkan realisasi Tahun 2021 Rp. 34.032.497.591,-

Formulasi perhitungan pertumbuhan investasi sebagai berikut :

Nilai akhir/ nilai awal -1 atau :

$$\frac{\text{Realisasi investasi tahun 2023} - \text{Realisasi investasi tahun 2022}}{\text{Realisasi investasi tahun 2022}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 52.196.905.043,-} - \text{Rp. 58.779.773.706,-}}{\text{Rp. 58.779.773.706,-}} \times 100 \% = - 0,11$$

Realisasi dan pertumbuhan investasi di Kota Pariaman mulai dari tahun 2018-2023 sangat fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38
Realisasi Investasi Kota Pariaman dari Tahun 2018-2023

TAHUN	REALISASI INVESTASI	PERSENTASE
2018	Rp 20.000.000.000	
2019	23.269.261.000	0,16
2020	41.544.050.000	0,79
2021	34.032.497.591	(0,18)
2022	58.779.773.706	0,73
2023	52.196.905.043	(0,11)

Dari tabel tersebut dapat dilihat, pada tahun 2018 ke 2019 pertumbuhan investasi sebesar 0,16, tahun 2019 ke 2020 pertumbuhan investasi naik 0,79 sedangkan 2020 turun ke 2021 turun sangat tajam minus 0,18, dan di tahun 2022 naik sangat tajam 0,73 dan ditahun 2023 turun kembali minus 0,11 .

Tidak tercapainya target investasi disebabkan::

1. masih rendahnya daya tarik calon investor untuk berinvestasi ke kota Pariaman, karena belum adanya RUPM;
2. kurangnya media promosi Kota Pariaman.
3. Tidak adanya anggaran untuk kegiatan Pameran Promosi Investasi Kota Pariaman.



4. masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan penanaman modal nya walaupun sudah melakukan bimtek dan pengawasan ke pelaku usaha dan tidak ada sanksi yang tegas yang mereka terima ketika mereka tidak melaporkan kegiatan Investasinya.

Upaya yang dilakukan :

1. adanya regulasi yang jelas mengenai kepemilikan tanah.
2. memberikan kemudahan berusaha/insentif kepada calon investor.
3. perlu support dari Pemerintah Kota Pariaman untuk mendukung kegiatan promosi investasi Kota Pariaman.
4. mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pelaporan LKPM dan menjelaskan lagi bahwa pelaporan LKPM ini tidak berhubungan dengan Pajak.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Meningkatnya Nilai Investasi dengan target akhir RPJMD 2018-2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatnya Nilai Investasi dengan
target akhir RPJMD 2019-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Investasi	%	2,0	0,03	0,5	3,5	1,85	2,20	0,16	0,79	-0,18	0,73	-0,11

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran ini berjumlah Rp. 401.155.500,- dengan realisasi Rp. 378.115.350,- (94,88%) dengan Program ini diantaranya:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran 4 Menurunnya Angka Kemiskinan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun				
				2023	2022	2021	2020	2019
1	Persentase Angka Kemiskinan	4,00	4,20	95,0%	99%	112%	88%	99%
Rata-rata Capaian				95%	99%	112%	88%	99%

Dari tabel di atas rata-rata capaian kinerja untuk sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan didukung 1 indikator, yaitu Persentase Angka Kemiskinan target 4,00 realisasi 4,20 dengan capaian 95%, realisasi dan capaian ini kurang bagus, karena masih terdapat gap antara target dengan realisasi sebesar 0,20.

Perbandingan capaian Persentase Angka Kemiskinan dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.40
Persentase Penduduk Miskin Kota Pariaman Tahun 2019-2023

NO	KOTA	Persentase Penduduk Miskin Kota Pariaman (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Kota Pariaman</i>	<i>4,76</i>	<i>4,10</i>	<i>4,38</i>	<i>4,13</i>	<i>4,20</i>

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase penduduk miskin di Kota Pariaman cukup fluktuatif karena ditahun 2019 ke 2020 turun 0,66, tahun 2022 naik 0,28, tahun 2022 turun lagi 0,25, dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,07.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan.



Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dan lain-lain).

Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan. adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Pariaman dengan Kabupaten Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.41
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Sumatera Barat
Tahun 2019-2023

NO	KAB/KOTA	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Sumatera Barat (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Sawahlunto	2,17	2,16	2,38	2,28	2,27
2	Kota Solok	3,24	2,77	3,12	3,02	3,05
3	Kota Bukittinggi	4,60	4,54	5,14	4,46	4,11
4	Kab. Tanah Datar	4,66	4,40	4,54	4,26	4,16
5	Kota Padang	4,48	4,40	4,94	4,26	4,17
6	<i>Kota Pariaman</i>	<i>4,76</i>	<i>4,10</i>	<i>4,38</i>	<i>4,13</i>	<i>4,20</i>
7	Kota Padang Panjang	5,60	5,24	5,92	5,14	5,24
8	Kab.Dharmasraya	6,29	6,23	6,67	5,56	5,56
9	Kota Payakumbuh	5,68	5,65	6,16	5,66	5,44
10	Kab. Sijunjung	7,04	6,78	6,80	6,00	5,88
11	Kabupaten Agam	6,75	6,75	6,85	6,22	6,60
12	Kab.Padang Pariaman	7,10	6,95	7,22	6,25	6,34
13	Kab.Lima Puluh Kota	6,97	6,86	7,29	6,59	6,80
14	Kab. Pasaman	7, 21	7,16	7,48	6,85	6,80
15	Kab.Pasaman Barat	7,14	7,04	7,51	6,93	6,92
16	Kab.Solok Selatan	7,33	7,15	7,52	6,51	6,45
17	Kab.Pesisir selatan	7,88	7,61	7,92	7,11	7,34
18	Kabupaten Solok	7,98	7,81	8,011	7,12	7,13
19	Kab. Kep. Mentawai	14,43	14,35	14,84	13,97	13,72
20	<i>Prov. Sumatera Barat</i>	<i>6,24</i>	<i>6,28</i>	<i>6,63</i>	<i>5,92</i>	<i>5,95</i>

Sumber Data BPS 2023 dan diolah

Dilihat dari tabel di atas Persentase Penduduk miskin di Kota Pariaman dari tahun 2019-2022 terjadi fluktuasi, dimana pada tahun 2019 persentase angka kemiskinan 4,76 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 420 ribu jiwa, tahun 2020 turun menjadi 4,10 dengan jumlah



penduduk miskin sebanyak 366 ribu jiwa, tahun 2021 naik menjadi 4,38 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 399 ribu jiwa, dan tahun 2022 turun kembali menjadi 4,13 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 380 ribu jiwa, sedangkan di tahun 2023 naik menjadi 4,20 dengan jumlah penduduk miskin 3,91 ribu jiwa.

Perbandingan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.42
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Sumatera Barat
Tahun 2019-2023

NO	KAB/KOTA	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Sawahlunto	1.35	1.36	1.52	1.47	1,47
2	Kota Solok	2.29	1.99	2.31	2.28	2,35
3	<i>Kota Pariaman</i>	<i>4.20</i>	<i>3.66</i>	<i>3.99</i>	<i>3.80</i>	<i>3,91</i>
4	Kab. Tanah Datar	16.20	15.34	15.89	14.91	14,56
5	Kota Padang	42.44	42.17	48.44	42.37	41,97
6	Kota Bukittinggi	6.75	6.01	6.98	6.16	5,78
7	Kota Padang Panjang	3.00	2.84	3.28	2.89	2,98
8	Kab.Dharmasraya	15.49	15.70	17.60	15.08	15,49
9	Kota Payakumbuh	7.68	7.74	8.66	8.08	7,88
10	Kab. Sijunjung	16.65	16.28	16.81	15.07	15,02
11	Kabupaten Agam	33.10	33.31	34.25	31.33	33,41
12	Kab.Padang Pariaman	29.48	28.98	30.41	26.44	26,93
13	Kab.Lima Puluh Kota	26.64	26.43	28.51	26.00	27,02
14	Kab. Pasaman	20.22	20.29	21.57	19.94	19,99
15	Kab.Pasaman Barat	31.53	31.64	34.97	32.91	33,52
16	Kab.Solok Selatan	12.49	12.39	13.41	11.81	11,91
17	Kab.Pesisir selatan	36.51	35.45	37.41	33.78	35,09
18	Kabupaten Solok	29.74	29.28	30.36	27.16	27,33
19	Kab. Kep. Mentawai	13.22	13.37	14.31	13.74	13,76
20	<i>Prov. Sumatera Barat</i>	<i>345.22</i>	<i>344.23</i>	<i>170.67</i>	<i>335.21</i>	<i>340,37</i>

Sumber Data BPS 2023

Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebagai kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat. jumlah penduduk miskin di kabupaten yang wilayah dikelilingi Samudera Hindia tersebut sebanyak 13,76 ribu jiwa (13,72%) dari total populasi.



Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah penduduk miskin 7,34 ribu jiwa (7,34%) Kabupaten Solok jumlah penduduk miskin 7,34 ribu yakni mencapai (7,36%). Diikuti, kemudian Kabupaten Kabupaten Pasaman dengan jumlah penduduk miskin 19,99 ribu jiwa (6,80%), Kabupaten Lima Puluh Kota penduduk miskin 27,02 ribu jiwa (6,80%).

Adapun permasalahan-permasalahan dalam hal pengurangan kemiskinan ini adalah:

- 1) Data kemiskinan secara nasional yang diakui adalah data dari Susenas. Tapi banyak perangkat daerah yang secara kegiatan terlibat langsung dalam penanggulangan kemiskinan ini menggunakan masing-masing. Padahal data yang digunakan oleh perangkat daerah itu banyak yang tidak memenuhi dari kriteria kemiskinan.
- 2) Belum maksimalnya penggunaan P-BDT (Basis Data Terpadu) yang dijadikan sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan masing-masing perangkat daerah yang ada. Kondisi inilah TKPK selaku pelaksana di Kota Pariaman berupaya untuk bisa menjelaskan kepada semua pihak, tentang cakupan dan hasil pengolahan Basis Data Terpadu tersebut. Sedangkan pada tahap perencanaan program selalu menanyakan tentang target sasaran yang akan dilaksanakan, sehingga diupayakan untuk menggunakan PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
- 3) Belum terintegrasinya lembaga-lembaga pelaksanaan program penanggulan kemiskinan di tingkatDesa/Kelurahan (BKM, KUBE, UPK, UEP, Desa Mandiri Pangan, Kotaku). Sehingga bantuan yangdiberikan pada kolompok masyarakat miskin belum merata.
- 4) Masih adanya kepentingan-kepentingan yang masih berpihak pada kelompok tertentu, sehingga untuksasaran masyarakat miskin belum berjalan maksimal.

- 5) Belum maksimalnya keterlibatan lembaga masyarakat/ keagamaan, dalam upaya penggunaan P-BDT sebagai basis data tunggal untuk penanggulangan kemiskinan dalam pemberian bantuanpermodalan bagi fakir dan miskin seperti BAZ.
- 6) Partisipasi masyarakat yang kurang dalam program penanggulangan kemiskinan, sehingga pemberdayaanmasyarakat yang diharapkan berjalan tidak terlaksana, serta adanya anggapan bahwa untuk bantuanmodal usaha atau dana bergulir/revolving sebagai bantuan lepas tanpa adanya pengembalian, sehingga anyak terjadi kemacetan dana yang telah disalurkan selama ini.
- 7) Karakteristik rumah tangga miskin yang tidak mau merubah budaya miskin selalu ingin dibantu.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan
dengan target akhir RPJMD 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
% Angka Kemiskinan	%	3,50	4,80	4,65	3,90	4,10	4,00	4,76	4,10	4,38	4,13	4,20

Dari perbandingan realiasi dari sasaran Menurunnya angka kemiskinan dengan realisasi di tahun 2021 dengan angka 4,38 jika dibandingkan dengan akhir RPJMD terdapat selisih sekitar 0,88.

Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan melibatkan seluruh unsur baik unsur pemerintahan maupun unsur masyarakat .

Anggaran yang yang mendukung sasaran menurunnya angka kemiskinan berkisar Rp. 63.628.430.250,- dengan realisasi Rp. 56.097.847.742,- (88,16%) dengan program antaran lain:

- 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial



- 2) Program Pemberdayaan Sosial
- 3) Program Rehabilitasi Sosial
- 4) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- 5) Program Pengendalian Penduduk
- 6) Program Pembinaan Keluarga Berencana
- 7) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- 8) Program Pengelolaan Pendidikan
- 9) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 10) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 11) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- 12) Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- 13) Program Perekonomian dan Pembangunan

Beberapa Anggaran dan program yang mendukung Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan juga mendukung sasaran lain .

Sasaran 5 Menurunnya Angka Pengangguran

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun					
				2023	2022	2021	2020	2019	2018
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,01	5,68	87%	104%	112%			
Rata-rata Capaian				87%	104%	112%			

Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran dengan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 5,01 sedangkan realisasi 5,68 dengan capaian 87% realisasi ini naik jika dibandingkan dengan tahun tahun 2022 dimana target target 5,40 dengan realisasi 5,19 dengan capaian 104%.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman dengan Kabupaten Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.44
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2019-2022

KABUPATEN/ KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (Parsentase)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab.Kepulauan Mentawai	2,92	3,98	2,79	1,39	1,33
Kab.Pesisir Selatan	6,02	7,00	5,97	4,61	4,75
Kabupaten Solok	4,72	4,65	4,67	5,89	4,99
Kab. Sijunjung	3,64	5,30	3,57	4,87	4,71
Kab. Tanah Datar	3,20	4,79	4,63	5,91	5,35
Kab. Padang Pariaman	6,05	8,13	8,41	6,60	6,69
Kab. Agam	4,78	4,61	5,06	4,93	4,96
Kab. Lima Puluh Kota	2,30	3,03	2,25	3,72	3,95
Kab. Pasaman	5,28	5,04	4,92	5,36	5,09
Kab. Solok Selatan	4,91	5,62	4,84	3,71	2,57
Kab. Dharmasraya	5,06	5,31	5,00	6,23	6,22
Kab. Pasaman Barat	4,74	4,69	5,02	6,33	6,01
Kota Padang	8,74	13,64	13,37	11,69	10,86
Kota Solok	4,65	4,67	5,89	5,89	3,72
Kota Sawahlunto	6,84	8,20	6,38	5,00	4,98
Kota Padang Panjang	4,38	7,22	4,90	4,84	5,49
Kota Bukittinggi	6,20	7,51	4,90	4,90	4,99
Kota Payakumbuh	4,13	6,68	6,47	5,16	4,84
Kota Pariaman	5,48	5,71	6,09	5,19	5,68
Prov.Sumatera Barat	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

- Dalam rangka penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, Pemerintah Kota Pariaman berupaya untuk memperluas dan pengembangan kesempatan kerja. Namun demikian upaya tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman.
- Secara garis besar faktor yang mempengaruhi masalah ketenagakerjaan terutama tentang pengangguran di Kota Pariaman adalah faktor pendidikan, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dimana ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.



Banyaknya pengangguran disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan, serta rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia, teknologi yang semakin canggih sehingga semakin sedikit kesempatan kerja yang ada.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari sasaran Menurunnya Angka Pengangguran dengan target akhir RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Menurunnya Angka Pengangguran
dengan target akhir RPJMD 2019-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,80	-	-	5,43	5,10	5,01	-	-	6,09	5,19	5,68

Dari perbandingan realiasi dari sasaran Menurunnya angka Pengangguran dengan realisasi di tahun 2023 dengan angka 5,68 dibandingkan dengan akhir RPJMD terdapat selisih yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,88. Capaian target akhir RPJMD sebesar 4,80 tidak tercapai.

Program yang mendukung sasaran ini diantaranya:

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 3) Program Hubungan Industrial

Anggaran yang mendukung sasaran ini berkisar Rp. 111.409.500,- dengan realisasi Rp. 103.474.000,- (92,88%).

Sasaran 5 **Meningkatnya Kemandirian Desa**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun			
				2023	2022	2021	2020
1	Indeks Desa Membangun	0,7800	0,7953	101,96%	10,44%	101,15%	105,47%
Rata-rata Capaian				101,96%	10,44%	101,15%	105%



Dari tabel sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator Indeks Desa Membangun dengan target 0,7800 realisasi 0,7953 dengan capaian 101,96% .

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran status kemajuan desa yang diklasifikasikan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu Desa Mandiri, Desa maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Penentuan status kemajuan Desa ini, ditentukan oleh data komposit indikator Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi.

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang: : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor $\leq 0,4907 - 0,8155$ Indeks Desa Membangun. Nama-Nama dan Status Desa adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:



Tabel 3. 46
Nama –nama dan Status Desa Tahun 2022- 2023

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	TAHUN 2023			NILAI IDM 2022	STATUS IDM TAHUN	
			IKS	IKE	IKL		2023	2022
1	PARIAMAN TENGAH	PAUH BARAT	0,9086	0,6667	0,9333	0,8362	Maju	Maju
2	PARIAMAN TENGAH	PAUH TIMUR	0,8686	0,7000	0,8667	0,8118	Maju	Maju
3	PARIAMAN TENGAH	RAWANG	0,9429	0,6500	0,8667	0,8199	Mandiri	Maju
4	PARIAMAN TENGAH	KAMPUNG BARU	0,9371	0,7000	0,9333	0,8568	Mandiri	Mandiri
5	PARIAMAN TENGAH	CIMPARUH	0,9486	0,7333	0,9333	0,8717	Mandiri	Mandiri
6	PARIAMAN TENGAH	JATI MUDIK	0,6971	0,7667	0,9333	0,7990	Maju	Maju
7	PARIAMAN UTARA	AMPALU	0,8171	0,6333	1,0000	0,8168	Mandiri	Maju
8	PARIAMAN UTARA	APAR	0,7486	0,6667	0,9333	0,7829	Maju	Maju
9	PARIAMAN UTARA	TANJUNG SABAR	0,7714	0,6667	0,8667	0,7683	Maju	Maju
10	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR SELATAN	0,7943	0,6167	1,0000	0,8037	Maju	Maju
11	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK BARAT	0,9029	0,7333	0,9333	0,8565	Mandiri	Mandiri
12	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK TIMUR	0,8171	0,5833	0,8667	0,7557	Maju	Maju
13	PARIAMAN UTARA	MANGGUNG	0,8171	0,7000	0,9333	0,8168	Mandiri	Mandiri
14	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR UTARA	0,7940	0,6170	1,0000	0,8037	Maju	Maju
15	PARIAMAN UTARA	TUNGKAL SELATAN	0,8400	0,7167	0,8000	0,7856	Maju	Berkembang
16	PARIAMAN UTARA	NARAS HILIR	0,8114	0,6833	0,6667	0,7205	Maju	Maju
17	PARIAMAN UTARA	NARAS 1	0,8286	0,7167	1,0000	0,8484	Mandiri	Mandiri
18	PARIAMAN UTARA	BALAI NARAS	0,8571	0,7000	0,9333	0,8301	Mandiri	Mandiri
19	PARIAMAN UTARA	PADANG BIRIK BIRIK	0,8171	0,6667	1,0000	0,8279	Mandiri	Maju
20	PARIAMAN UTARA	SINTUK	0,7943	0,6000	0,9333	0,7759	Maju	Maju
21	PARIAMAN UTARA	SUNGAI RAMBAI	0,7600	0,5000	1,0000	0,7533	Maju	Berkembang
22	PARIAMAN UTARA	TUNGKAL UTARA	0,7771	0,6000	1,0000	0,7924	Maju	Berkembang
23	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR	0,8000	0,7000	0,9333	0,8111	Maju	Maju
24	PARIAMAN SELATAN	PASIR SUNUR	0,7943	0,5667	0,9333	0,7648	Maju	Maju
25	PARIAMAN SELATAN	BALAI KURAI TAJI	0,8114	0,7500	1,0000	0,8538	Mandiri	Mandiri
26	PARIAMAN SELATAN	PAUH KURAI TAJI	0,8457	0,6667	0,8667	0,7930	Maju	Maju



No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	TAHUN 2022			NILAI IDM 2022	STATUS IDM TAHUN	
			IKS	IKE	IKL		2023	2022
27	PARIAMAN SELATAN	SIMPANG	0,8686	0,5333	0,8667	0,7562	Maju	Maju
28	PARIAMAN SELATAN	TOBOH PALABAH	0,9029	0,7500	1,0000	0,8843	Mandiri	Maju
29	PARIAMAN SELATAN	MARABAU	0,8057	0,5667	0,8667	0,7464	Maju	Maju
30	PARIAMAN SELATAN	BATANG TAJONGKEK	0,7943	0,5333	0,9333	0,7536	Maju	Maju
31	PARIAMAN SELATAN	SIKABU	0,8286	0,6167	0,9333	0,7929	Maju	Maju
32	PARIAMAN SELATAN	SUNGAI KASAI	0,8800	0,6000	0,8667	0,7822	Maju	Maju
33	PARIAMAN SELATAN	PALAK ANEH	0,7886	0,5333	0,9333	0,7517	Maju	Maju
34	PARIAMAN SELATAN	KAMPUNG APAR	0,8343	0,6000	0,8667	0,7670	Maju	Maju
35	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI	0,8686	0,6333	0,9333	0,8117	Maju	Maju
36	PARIAMAN SELATAN	TALUK	0,8514	0,6500	0,8667	0,7894	Maju	Maju
37	PARIAMAN SELATAN	PADANG CAKUR	0,7829	0,6667	0,8667	0,7721	Maju	Maju
38	PARIAMAN SELATAN	PUNGGUNG LADING	0,8343	0,6000	0,8667	0,7670	Maju	Maju
39	PARIAMAN SELATAN	RAMBAI	0,8057	0,6667	0,8667	0,7797	Maju	Maju
40	PARIAMAN TIMUR	TALAGO SARIK	0,7714	0,6667	0,8667	0,7683	Maju	Maju
41	PARIAMAN TIMUR	PAKASAI	0,8743	0,7333	0,8667	0,8248	Maju	Maju
42	PARIAMAN TIMUR	KP. BARU PADUSUNAN	0,8514	0,5833	0,8667	0,7671	Maju	Maju
43	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG GADANG	0,8857	0,7000	0,9333	0,8397	Mandiri	Mandiri
44	PARIAMAN TIMUR	KOTO MARAPAK	0,8286	0,6000	1,0000	0,8095	Maju	Maju
45	PARIAMAN TIMUR	BATANG KABUNG	0,8514	0,6000	0,9333	0,7949	Maju	Maju
46	PARIAMAN TIMUR	BATO	0,8229	0,5833	0,8667	0,7576	Maju	Maju
47	PARIAMAN TIMUR	AIR SANTOK	0,8686	0,6500	0,8667	0,7951	Maju	Maju
48	PARIAMAN TIMUR	CUBADAK MENTAWAI	0,8286	0,6667	0,9333	0,8095	Maju	Maju
49	PARIAMAN TIMUR	SUNGAI SIRAH	0,7657	0,6500	0,8667	0,7608	Maju	Maju
50	PARIAMAN TIMUR	SUNGAI PASAK	0,8229	0,5833	0,8667	0,7576	Maju	Maju
51	PARIAMAN TIMUR	BUNGO TANJUNG	0,9029	0,7000	0,8667	0,8232	Mandiri	Mandiri
52	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG TANGAH	0,8457	0,6167	0,8667	0,7764	Maju	Maju
53	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG KANDANG	0,8000	0,6500	0,9333	0,7944	Maju	Maju
54	PARIAMAN TIMUR	KALUAT	0,8914	0,5667	0,8667	0,7749	Maju	Maju
55	PARIAMAN TIMUR	KAJAI	0,7829	0,6167	0,9333	0,7776	Maju	Maju
		Jumlah	0,8317	0,644	0,9103	0,7953		



Dari tahun 2020 – 2023 terjadi peningkatan Status Desa Berkembang naik menjadi Desa Maju, yang awalnya tahun 2020 Desa berkembang berjumlah 19 Desa, menjadi 6 Desa pada tahun 2021, tahun 2022 hanya tinggal 3, sedangkan di tahun 2023 tidak ada lagi Status Desa Berkembang.

Disamping itu pada tahun 2020 belum ada desa yang berstatus Desa Mandiri, sedangkan di tahun 2021 ada 2 Desa Mandiri, kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 9 Desa Mandiri, ditahun 2023 ada beberapa desa naik statusnya yaitu:

1. Kecamatan Pariaman Tengah 2 Desa, yaitu Desa Rawang dan Desa Ampali dari Desa Maju meningkat menjadi Desa Mandiri;
2. Kecamatan Pariaman Utara 4 Desa, yaitu Desa Tungka Selatan, Desa Sungai Rambai dan Desa Tungka Utara dari Desa Berkembang menjadi Desa Maju, sedangkan Desa Padang Birik-Birik dari Desa Maju naik menjadi Desa Mandiri ;
3. Kecamatan Pariaman Selatan 1 Desa, yaitu Desa Toboh Palabah dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Adapun jumlah Status Desa mulai tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.47
Status Desa di Kota Pariaman pada tahun 2020 -2023

NO	KECAMATAN	MANDIRI				MAJU				BERKEMBANG				TOTAL			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PARIAMAN TENGAH	0	0	2	4	4	6	4	2	2	0	0	0	6	6	6	6
2	PARIAMAN UTARA	0	2	4	6	11	11	10	11	6	4	3	0	17	17	17	17
3	PARIAMAN SELATAN	0	0	1	2	16	16	15	14	0	0	0	0	16	16	16	16
4	PARIAMAN TIMUR	0	0	2	3	5	14	14	13	11	2	0	0	16	16	16	16
	Jumlah	0	2	9	15	36	47	43	40	19	6	3	0	55	55	55	55
	Presentase	0	4%	16%	27%	65%	85%	78%	73%	35%	10,9%	5%	0%	100%	100%	100%	100%

Dilihat dari tabel di atas mulai tahun 2020 – 2023 terjadi peningkatan, yaitu:



Terjadinya peningkatan status Desa di karenakan terpenuhinya nilai Indikator Desa yang sudah memiliki kemampuan mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan, yang di tetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Status Desa Maju Pada tahun 2020 berjumlah **36 Desa**, tahun 2021 bertambah **11 Desa** sehingga menjadi **47 Desa Maju**, sedangkan Tahun 2022 **berkurang menjadi 43 Desa**, dan di Tahun 2023 **berkurang lagi menjadi 40 Desa karena adanya peningkatan status desa menjadi Desa mandiri** .

Status Desa Berkembang tahun 2020 berjumlah **19 Desa**, tahun 2021 berkurang menjadi **6 Desa**, sedangkan Tahun 2022 **berkurang menjadi 3 Desa** , dan Tahun 2023 **tidak ada lagi Desa** .

Lonjakan perkembangan desa merupakan dampak dari penyaluran dana Desa,” dimana melalui dana desa juga telah meningkatkan kesempatan bagi desa untuk menumbuh kembangkan inovasi dan potensi lokal, sesuai dengan culture dan kebutuhan riil masyarakat yang ada.

Tabel 3.48
DATA KOMPOSIT INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
KOTA PARIAMANTAHUN 2019 - 2023

No	Indeks Desa Membangun(IDM)	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,7230	0,7195	0,7606	0,814	0,8317
2	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,5783	0,5730	0,59504	0.6249	0.6439
3	Indeks Ketahanan Ekologi (IKL)	0,8703	1,6897	0,88851	0.8970	0.9103

Sumber : Data Olahan Bag.Organisasi Setda Kota Pariaman Tahun 2023

Untuk meningkatkan Status Desa pada target 2024 maka sangat diperlukan kesinambungan program dan kegiatan peningkatan kapasitas



pemerintahan desa yang fokus kepada penguatan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan agar Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Pariaman dapat kian ditingkatkan menuju Desa Mandiri.

Tabel 3.49
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator dari
sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa
dengan target akhir RPJMD 2019-2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD TAHUN							REALISASI				
	SATUAN	AKHIR RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Desa Membangun	Nilai	0,0792	0,6850	0,6880	0,7400	0,7710	0,7800	0,7200	0,7250	0,7485	0,7744	0,7744

Program yang mendukung sasaran ini antara lain

- 1) Program Penataan Desa
- 2) Program Administrasi Pemerintah Desa
- 3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Anggaran yang tersedia untuk mendukung sasaran ini berjumlah Rp. 6.562.202.203,- dengan realisasi Rp. 5.973.206.269,- (91,02%)

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023, berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Jumlah Pendapatan tahun 2023 adalah Rp. **656.742.616.421,-** dengan realisasi Rp. **625.829.083.470,04,- (95,29%)**
2. Jumlah Belanja tahun 2023 adalah Rp. **680.904.853.354,-** dengan realisasi Rp. **619.164.014.291,- (90,93%)**
3. Surplus/Defisit Rp. **(24.162.236.933)** dengan realisasi Rp. **6.665.069.179,04 (27,58)**
4. Pembiayaan Daerah tahun 2023 Rp. **24.162.236.933,-** dengan realisasi Rp. **718.418.400,- (2,97%)**



5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. **0** dengan realisasi Rp. **7.383.487.579,51**
6. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2018 s/d 2023.

TAHUN	PAD	NAIK/TURUN	PENDAPATAN DAERAH	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)
		(%)		
2018	36.781.361.440,51	6,29 (naik)	653.325.805.028,51	5,6%
2019	42.885.560.142,00	16,6%	698.660.608.548	6,1%
2020	54.783.919.177,00	27,7%	689.025.589.885	7,95%
2021	46.451.454.431,00	-15,21%	632.793.161.257	7,3%
2022	53.383.877.506,00	14,92%	633.558.932.689	8,4%
2023	38.861.600.702,04	-27,20%	625.829.083.470,04	6,2%

Dari tabel di atas dapat dilihat proporsi PAD terhadap pendapatan daerah di 2018 sebesar 5,6 %. Pada tahun 2019 proporsi PAD mengalami peningkatan sebesar 0,5 %, sehingga menjadi 6,1 %. Demikian juga pada tahun 2020 juga kembali mengalami peningkatan sebesar 1,8 % dari tahun 2019 sehingga menjadi 7,95%. Dan tahun 2021 kembali turun 0,6% sehingga proporsi PAD terhadap Pendapatan menjadi 7,3%, sedangkan di tahun 2022 adanya kenaikan sebesar 1,1% sehingga menjadi 8,4%, sedangkan tahun 2023 turun kembali menjadi 6,3% .

Sedangkan PAD dilihat penganggaran di tahun 2018 sebesar Rp. 36.781.361.440,51. Pada tahun 2019 penganggaran PAD naik sebesar 16,6 % dari tahun 2018, dan ditahun 2020 naik lagi 27,7%. Sedangkan ditahun 2021 turun 15,21%, dan ditahun 2022 kembali naik 14,92%, sedangkan tahun 2023 turun sangat signifikan yaitu 27,20% .



7. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

TAHUN	DANA LAIN-LAIN	NAIK/TURUN	PENDAPATAN DAERAH	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)
		(%)		
2018	15.801.577.910,00	81,43%	653.325.805.028,51	2,42%
2019	111.023.072.406,00	602,6%	698.660.608.548,00	15,89%
2020	122.089.140.644,00	9,97%	689.025.589.885,00	17,72%
2021	16.878.706.228,00	86,18%	632.793.161.257,00	2,67%
2022	6.978.644.955,00	-58,65%	633.558.932.689,00	1,10%
2023	6.163.724.240,00	-11,68%	625.829.083.470,04	0,98%

Dari tabel di atas dapat dilihat penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2018 sebesar Rp. 15.801.577.910,00 . Pada tahun 2019 naik 602,6% dari tahun 2018, dan ditahun 2020 penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah, kembali naik 9.97 % dari tahun 2019. Dan didua tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu di tahun 2021 turun 86,18% dan Tahun 2022 turun lagi 58,65%, dan tahun 2023 turun lagi 11,68%.

Sedangkan proporsi lain-lain pendapatan daerah terhadap pendapatan ditahun 2018 sebesar 2,42%. Pada tahun 2019 ini proporsi naik sebesar 13,4 % dari tahun 2018, yaitu 15,89%, dan ditahun 2020 juga naik sebesar 1,91 % yaitu 17,72%. Dan Tahun 2021 proporsi Pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap Pendapatan kembali turun sebesar 15,05 menjadi 2,67%, sedangkan di Tahun 2022 hanya 1,10%, dan tahun 2023 hanya 0,98%.



8. Perkembangan Belanja Daerah

TAHUN	BELANJA				JUMLAH
	OPERASIONAL	MODAL	TAK TERDUGA	TRANSFER	
2018	44.513.868.080,253	176.974.701.133,00	400.000.000,00	92.740.265.722,00	44.783.983.047.108
2019	484.802.521.538,93	171.955.619.758,10	200.000.000,00	95.977.582.121,00	752.935.723.418
2020	453.214.258.088,22	123.785.351.815,34	30.325.902.755,00	97.395.172.863,00	704.720.685.522
2021	496.726.974.674,78	79.451.123.876,44	930.625.970.,00	97.017.307.226,54	673.195.405.778
2022	485.996.752.332,00	67.187.610.014,00	500.000.000,00	88.230.331.030,00	641.914.693.376
2023	467.272.136.266,00	63.799.160.485,00	0,00	88.092.717.540,00	619.164.014.291

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran belanja daerah sejak dari Tahun 2019-2023 selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Tahun 2023 Jumlah belanja daerah Rp. **619.164.014.291,00** turun sebesar Rp. 22.750.679.085,- dari tahun 2022 berjumlah Rp. 641.914.693.376,- mengalami penurunan sebesar Rp. 31.280.712.402 dari tahun 2021 dimana penganggaran belanja daerah berjumlah Rp. 673.195.405.778,-.

Untuk masing-masing kategori belanja dapat dijelaskan:

- belanja operasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 45.138.680.802,53,- ditahun 2019 mengalami peningkatan 8,9 %, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,5 % dan ditahun 2021 kembali naik sebesar 9,06 %, dan di tahun 2022 turun sebesar 2,16%, sedangkan di tahun 2023 turun lagi .
- Belanja Modal dari tahun 2018-2023 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 176.974.701.133,00 ditahun 2019 turun sebesar 2,8 % , tahun 2020 kembali turun 28,01 , ditahun 2021 kembali turun 35,81%, di tahun 2022 kembali turun sebesar 15,44%, dan tahun 2023 turun lagi.
- Sedangkan penganggaran belanja tak terduga pada tahun 2018 sebesar Rp. 400.000.000,00 , ditahun 2019 mengalami penurunan sekitar 50 %, dan ditahun 2020 melonjak naik sekitar 15.000 % namun ditahun 2021 kembali melonjak turun 96,93 % , sedangkan di tahun 2022 kembali turun sebesar 46,28%, sedangkan ditahun 2023 belanja tak terduga 0.



- Belanja transfer pada tahun 2018 sebesar Rp. 92.740.265.722,00, untuk tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan masing-masing 3,4% dan 14 % dan ditahun 2021 kembali turun sekitar 0,38 %, dan ditahun 2022 turun sebesar 9,06%, sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan.

9. Realisasi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	%
		(Rp)		
A	Pendapatan asli daerah	56.734.994.431,00	38.861.600.702,04	68,50%
	Pajak Daerah	12.825.000.000,00	14.323.956.113,00	111,69%
	Retribusi Daerah	15.482.768.976,00	3.115.174.963,00	20,12%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.986.510.155,00	10.042.663.440,00	100,56%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.	18.440.715.300,00	11.379.806.186,04	61,71%
B	Pendapatan Transfer	588.990.496.392,00	580.803.758.528,00	98,61%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	552.476.537.000	553.174.284.492	100,13%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.513.959.392	27.629.474.036	75,67%
C	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	11.017.125.598,00	6.163.724.240,00	55,95%
	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	1.272.000.000,00	21,20%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.017.125.598	4.891.724.240	97,50%
	Jumlah Pendapatan daerah	656.742.616.421,00	625.829.083.470,04	95,29%



Dari tabel diatas dapat dilihat semua jenis pendapatan tidak tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan PAD hanya mencapai 67,51 %, dan dana perimbangan tercapai 98,64 %. Sementara dari lain –lain pendapatan daerah yang sah tercapai sebesar 77,20 % sehingga realisasi pendapatan daerah tercapai sebesar 95,78 %.

10. Realisasi Belanja Daerah

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA OPERASI	518.089.467.654,00	467.272.136.266,00	90,19%
Belanja Pegawai	295.718.697.400,00	276.717.016.014,00	93,57%
Belanja barang jasa	206.360.291.439,00	174.336.493.316,00	84,48%
Belanja Hibah	15.302.718.815,00	15.822.266.936,00	103,40%
Belanja Bantuan Sosial	707.760.000,00	396.360.000,00	56,00%
BELANJA MODAL	72.924.374.789,00	63.799.160.485,00	87,49%
Belanja Modal tanah	1.220.000.000,00	117.700.000,00	9,65%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.568.139.577,00	12.528.002.806,00	86,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.239.469.731,00	23.033.557.412,00	87,78%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.393.012.481,00	27.638.459.867,00	90,94%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	502.753.000,00	480.440.400,00	95,56%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000	1.000.000,00	100,00%
BELANJA TAK TERDUGA	500.000.000,00	0,00	0,00%
Belanja Tak terduga	500.000.000,00	0,00	0,00%
BELANJA TRANSFER	89.391.010.911,00	88.092.717.540,00	98,55%
Belanja Bagi Hasil	2.830.776.896,00	1.532.483.527,00	54,14%
Belanja Bantuan Keuangan	86.560.234.015,00	86.560.234.013,00	100,00%
Jumlah Belanja	680.904.853.354,00	619.164.014.291,00	90,93%



Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi belanja operasi tercapai sebesar 94,29,7% dari anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan untuk belanja modal sebesar 91,26%, belanja tak terduga 0 % dan belanja transfer 98,46%. Jadi jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 606.420.401.478,57 (94,47%) dari total anggaran belanja Rp. 641.914.693.376,-



BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja yang tersaji ini merupakan cerminan kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2023 yang merupakan media pertanggungjawaban dari upaya pencapaian Visi dan Misi dalam RPJMD 2018-2023 Kota Pariaman.

Dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pariaman dimaksud, secara tahunan Pemerintah Kota Pariaman juga telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sebagai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 .

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 yang terdiri dari 5 Misi, 19 Sasaranyang diukur dengan 23 indikator kinerja sasaran, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Misi I terdiri dari 1 sasaran, dan 1 indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja 5%.
2. Misi 2 terdapat 4 sasaran 5 indikator kinerja sasaran dengan capaian rata-rata 103%.
3. Misi 3 terdapat 3 sasaran 5 indikator kinerja sasaran dengan capaian rata-rata 96%.
4. Misi 4 terdapat 5 Sasaran 6 indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 153 %.
5. Misi 5 terdapat 6 Sasaran 6 indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 79%.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja selama tahun 2023 melalui indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman dapat tercapai dengan baik, karena dari 23 Indikator, 8 indikator kinerja



mencapai $\geq 100\%$, 9 Indikator dengan capaian $\geq 90\%$, 4 indikator dengan capaian $\geq 80\%$, sedangkan 2 Indikator $\leq 50\%$.

Pencapaian di tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022 walaupun proses dan mekanisme masih belum baik, dimulai dari proses perencanaan, Perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi yang mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh hasil yang dicapai.

Hal ini disebabkan karena Indikator Kinerja dalam proses pencapaian target dari beberapa sasaran tersebut tergantung pada Perangkat Daerah terkait dan formula penghitungan ada yang tidak jelas.

Disamping itu kualitas perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen Sistem AKIP belum terbangun secara baik. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perencanaan belum seluruhnya memenuhi persyaratan dan kriteria sasaran dan indikator kinerja yang baik .

Agar pencapaian indikator sasaran dan pencapaian target kinerja tahun kedepannya dapat lebih optimal, maka dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman 2024-2026 Sasaran dan indikator harus selaras dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah, perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renja PD, RKPD, Perencanaan Anggaran dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman serta PK perangkat daerah.
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja setiap triwulan oleh masing-masing perangkat daerah yang menjadi pelaksana tugas teknis.
3. mengidentifikasi permasalahan yang muncul sejak dini pada saat pelaksanaan program dan kegiatan, jika muncul suatu permasalahan



dapat segera terkoreksi dan diberikan langkah solusinya, agar dalam pelaksanaan selanjutnya dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.

4. Seluruh Pimpinan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman harus mempunyai kepedulian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan mengontrol kinerja jajaran dibawahnya .
5. Melakukan koordinasi yang baik dan intensif antar perangkat daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Adapun Penghargaan yang telah diperoleh Pemerintah Kota Pariaman tahun 2023 adalah :

1. Ombudsman Republik Indonesia menetapkan Kota Pariaman sebagai salah satu kota yang masuk kedalam Zona Hijau dalam Penerapan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023.



2. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) oleh Wakil Presiden Indonesia yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian di Gedung Balai Sudirman Jakarta Selasa (14/03/2023).



3. Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten/kota bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada acara Peringatan Hari Neglected Tropical Diseases (NTDs) atau Penyakit Tropis Terabaikan Sedunia Tahun 2023. Penghargaan berupa sertifikat dari Menteri Kesehatan, Budi G Sadikin, itu diterima secara langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Nazifah, di Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta, Selasa (21/2/2023). Pemko Pariaman merupakan salah satu dari 103 kabupaten kota yang meraih penghargaan ini



4. Penghargaan Wiyata Dharma Pratama dari Menteri Pendidikan.



5. Media Center Kominfo Kota Pariaman Raih Penghargaan Anugerah Media Center Daerah 2023, yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, bertempat di The Margo Hotel Depok, Jl. Margonda Raya No.358, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/2)



6. Penghargaan sebagai kota yang berkomitmen terhadap perlindungan anak berbasis Sitem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak diterima langsung Wali Kota Pariaman Genius Umar, di Studio Grand Metro TV, Jakarta Barat, Kamis (20/7/2023), oleh Ketua KPAI melalui Wakil Ketua KPAI Jasra Putra dan Direktur Metro TV Don Bosco Selamun.



7. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), berupa penghargaan Kota Layak Anak Peringkat Nindya, bertempat di Hotel Asmad Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu malam (22/07/2023) diterima oleh Walikota Pariaman, Genius Umar yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada acara Malam Penganugerahan KLA tahun 2023



8. Penghargaan Anugerah Kota Paling Berkelanjutan di Indonesia. Penghargaan ini diserahkan pada acara Anugerah UI Green City Metric Rankings Tahun 2023, yang diumumkan di Balai Sidang Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Selasa sore (1/8/2023).



- Penganugerahan BKN Award 2023 ini diserahkan oleh Plt. Kepala BKN RI, Haryomo Dwi Putranto didampingi Kepala Kantor Regional Wilayah XII BKN Pekanbaru, Anna Hasnah Hasaruddin pada Rapat Koordinasi Kepegawaian se-wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dengan tema "Evaluasi dan Percepatan Layanan Kepegawaian" di Aula Hangtuh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (9/8/2023).



- Penghargaan Lencana Bakti Desa Pertama ini diberikan atas komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Pariaman dalam mendorong percepatan pembangunan desa yang ada di daerahnya. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Desa PDTT RI, Abdul Halim Iskandar, kepada Kepala DPMD Kota Pariaman, Yalviendri, dalam kegiatan Forum Sinergitas Kebijakan dan implementasi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Hotel Bidakara, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (10/10/2023).



11. Pemerintah Kota Pariaman meraih penghargaan sebagai Instansi Terbaik Pertama dalam Pemanfaatan Mail Multidomain tingkat Pemerintah Kota Tahun 2023 yang diserahkan pada rapat koordinasi nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, di Hotel Mulia Jakarta, pada Selasa (17/10/2023) diserahkan Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, kepada perwakilan Kota Pariaman.



12. Kota Pariaman berhasil meraih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Penghargaan diserahkan Menteri LHK, Siti Nurbaya dan diterima kepala sekolah masing-masing didampingi Sekretaris Daerah Kota Pariaman



13. Kota Pariaman meraih penghargaan tingkat nasional bidang Lingkungan Hidup Penghargaan Program Kampung Iklim



14. Penghargaan Swasti Saba Wistara Kabupaten Kota Sehat Tahun 2023 diterima oleh Walikota Pariaman yang diwakilkan kepada Kepala Bappeda Kota Pariaman, Hendri, di Grand Ballroom yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Suhajar Diantoro, di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (28/11/2023).



15. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai Kota Terinovatif pada Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023 diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dan diterima oleh Pj Wali Kota Pariaman, Roberia, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (12/12/2023).



16. Penghargaan Terbaik III Nasional dalam ajang Bangsa Berwisata di Indonesia (BBWI) 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.



17. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) yang diumumkan pada hari Selasa (19/12/2023) secara daring oleh Kementerian PPPA RI



18. Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman menerima penghargaan dari BPS Pusat atas prestasinya sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) pada Acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta (4/12/23).

